



**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA
DI DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG**

*(Studi Kasus Usaha Tambak Udang Pada
PT. Dipasena Citra Darmaja dan Plasma)*

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :
BAMBANG HARTONO
NIM : B4A 097 011**

**Pembimbing :
Prof. H. PURWAHID PATRIK, SH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

338.7
HAR
p e 1

**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA
DI DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG**

*(Studi Kasus Usaha Tambak Udang Pada
PT. Dipasena Citra Darmaja dan Plasma)*

TESIS

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 13 Juni 2000

Disusun Oleh :

BAMBANG HARTONO

NIM. B4A 097 011

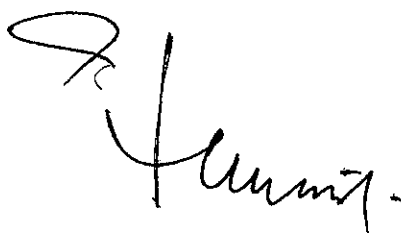
**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. H. Purwahid Patrik, SH

NIP. 130 307 058



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519

MOTTO :

- * PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN KERASAMA ADAPUN TIDAK AKAN PERNAH SUKSES DAN BERJALAN HARMONIS TANPA DIDASARI ITIKAD BAIK, KEPERCAYAAN DAN KEJUJURAN.
- * SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULTAN ITU ADA KEMUDAHAN. MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SESUATU URUSAN), KEDAHKANLAH DENGAN SINGGUAH-SINGGUAH (URUSAN) YANG LAIN. DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA BERHARAP. (Q.S. AL INSIRAH 6-8)

PERSEMBAHAN :

- * DIPERSEMBAHKAN DENGAN RASA HORMAT DAN CINTA UNTUK MENGENANG AYAHANDA ALM. KUMIN, SM, YANG TELAH MENGAJARKAN ARTI KEMANDIRIAN DAN KERJA KERAS UNTUK SEBUAH KEBERHASILAN, IBUNDA SAVUMI, YANG DENGAN SEGALA KETERBATASAN TELAH MEMBERIKAN YANG TERBAIK YANG DAPAT DIBERIKAN SEORANG IBU.
- * SERTA..., KUPERSEMBAHKAN DENGAN SEGALA RASA CINTA DAN KASIH SAYANG YANG TULUS UNTUK MENJADI KEBANGGAAN ISTRIKU DRA. SUKIRAH DAN KEDUA ANAKKU YURISTA PRASEPUDI DAN LUTHFI PASCAPRADANA, DENGAN HARAPAN AGAR DAPAT MENJADI DORONGAN MERAIH KEBERHASILAN DIMASA DEPAN.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya-lah Tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini berjudul : "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Di Daerah Tingkat II Tulang Bawang Propinsi Lampung", ini disusun dalam rangka untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan dikarenakan keterbatasan yang ada pada penulis. Meskipun demikian penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar Tesis ini tersusun dengan baik.

Disamping itu, dalam penulisan Tesis ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa moril maupun materiil. Oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang .
2. Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, SH., selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus sebagai Penguji yang banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian Tesis ini.

3. Ibu Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono., SH dan Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro., SH yang banyak memberi bimbingan, nasihat, ilmu dan saran selama penulis menimba ilmu serta dalam proses penulisan Tesis ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama belajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Seluruh karyawan dan karyawan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang banyak membantu kelancaran urusan administrasi dan akademik.
6. Bapak Kadit Sospol Tingkat I Jawa Tengah, Kadit Sospol Tingkat I Lampung, Kakansospol Kotamadya Bandar Lampung dan Kakansospol Tingkat II Tulang Bawang yang telah memberikan izin penelitian pada penulis.
7. Bapak- Bapak Aparat Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Aparat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang telah banyak membantu memberikan informasi, data, dokumen dan bimbingan serta saran dalam penulis melakukan penelitian.
8. Bapak Agus Salim Munawar dan Bapak Abadi.B. Darmo, SH selaku Humas dan Penasihat Hukum PT. Dipasena Citra Darmaja.
9. Bapak-Bapak Pengurus Perhimpunan Petambak Plasma Udang WinduDipasena Citra Darmaja (PPPUW DCD).

10. Pimpinan PT. Djarum Kudus Semarang.

11. Sahabat-sahabatku terutama HET Angkatan XVI UNDIP khususnya

Ibu Yat, Ketut, Polo, Pajar, Danang, Edison, Sri, Tamsil, serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan Tesis ini yang tidak sanggup penulis sebutkan satu-persatu.

Lebih dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a sepenuh hati. Khususnya kepada Ayahanda Alm. Klimin S.M, Ibunda Sayumi, serta Bapak dan Ibu Mertua, penulis sampaikan terimakasih dan Ta'zim yang mendalam atas do'a dan cinta kasih beliau yang telah memberikan kesejukan, nasihat, bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, karier dan jenjang pendidikan hingga yang sedang penulis jalani ini. Demikian pula terimakasih yang tak terhingga untuk isteriku Dra. Sukirah dan anak-anakku yang terkasih dan tercinta Yurista Praseputri dan Luthfi Pasca Pradana yang telah setia mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada serta tidak lupa kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Juni 2000

Penulis.

ABSTRACT

To change and increase gradually standard of living and welfare of the society, government takes policies by implementing some regulation on a partnership to be a legal basis in conducting a cooperation. The partnership is basically aimed to provide much protection for the grassroot level in conducting the cooperation. But, there are some problems and obstacles in the implementation to succeed effectively.

This condition took place on the community of Menggala Sub District that has a cooperative partnership in the extension of large prawn with PT. Dipasena Citra Darmaja using the pattern of Nucleus-Plasma. This cooperative partnership also dealt with some conflicts because the Plasma of 9.032 members had protested massively against the Nucleus Firm since 1997 until 1999. The Plasma considered the Nucleus Firm had broken the rules of partnership agreed on.

From results of the research, it could be found that reasons of the Plasma raised a protest against the Nucleus Firm because the engagement of cooperation had not been implemented properly and transparently. The Nucleus fixed partly on the shrimp price, calculated partly the rest of credit, so that the credit of the Plasma increased threefold, much more than the beginning of the engagement made. Whereas, the engagement of the cooperation had been carried out from 8 to 10 years and each harvest (generally 4 months) the Plasma paid installments through the Nucleus Firm but they never receive the receipt and the profit sharing. Besides that, the Nucleus Firm also made Severance of the Cooperation Relationship partly against the Plasma and took over the Plasma's fishpond to be Nucleus Fishpond.

While a pattern of the resolution of problems which was taken by The Plasma, represented by Association of Large Prawn Fishpond Farmer of Dipasena Citra Darmaja, was Mediation. Therefore, they appointed Lampung Local Government as a Mediator. From results of the mediation, there were some agreements between the Plasma and the Nucleus Firm mediated by Lampung Local Government. However, the agreements had never been implemented by the Nucleus Firm by now.

In order to assist to resolve the problems as to save the biggest large prawn producer in Southeast Asia, BPPN is involved as mediator. This is due to the Plasma makes the credit contract with Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) and the Nucleus Firm as the Underwriter, whereas BDNI is now liquidated. While between the Nucleus Firm and BDNI is one Group, that of Gajah Tunggal Group, so that BPPN holds responsibility for the existence and success of the business the Nucleus Firm is asset of BDNI.

RINGKASAN

Tujuan pembangunan secara berencana dasarnya untuk secara bertahap mengubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan tentang kemitraan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama secara kemitraan antara golongan ekonomi lemah (masyarakat pada umumnya) dengan usaha menengah maupun dengan usaha besar. Kiranya kita menyadari bahwa kemajuan dan perkembangan perekonomian dalam suatu masyarakat membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum pada masyarakat, sebagaimana ternyata dengan adanya suatu lapangan hukum baru yang dinamakan "Hukum Ekonomi" (Economic Law) yaitu bidang-bidang hukum yang secara langsung menunjang kemajuan perekonomian dalam suatu masyarakat, sehingga bidang hukum tersebut mendapat perhatian dalam skala prioritas.

Sedangkan pengertian kemitraan itu sendiri merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra. Kemitraan ini yang dilakukan antara masyarakat Kecamatan Menggala Dati II Tulang Bawang, Propinsi Lampung dengan PT. Dipasena Citra Darmaja dengan pola Inti Plasma. Hanya saja dalam pelaksanaannya kurang harmonis, hal ini terlihat dengan adanya unjuk rasa berulang kali secara massal yang dilakukan para plasma terhadap perusahaan Inti tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan gambaran permasalahan yang diajukan, yaitu (1). Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama kemitraan usaha yang dilakukan antara PT. Dipasena Citra Darmaja (sebagai plasma); (2). Mengapa Plasma tidak puas terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan Plasma tidak puas terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan Plasma tidak puas terhadap pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan perusahaan Inti dan melakukan unjuk rasa secara massal (3). Bagaimana peran Pemerintah Daerah Lampung dalam membina dan membantu penyelesaian masalah kerjasama kemitraan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam dan terinci mengenai akar permasalahan penelitian yang nampak dalam fenomena para plasma melakukan unjuk rasa berulang kali secara massal terhadap perusahaan Inti serta peran pemerintah Daerah Lampung untuk membantu dalam penyelesaiannya. Pendekatan Yuridis Empiris dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan yang tidak hanya dengan kajian norma hukum saja, tetapi juga dari sisi perilaku para plasma dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian yang dibuat antara masyarakat Kecamatan Munggalai Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sebagai Plasma) dengan PT. Dipasena Citra Darmaja (sebagai perusahaan Inti) bersifat tertulis yang terdiri dari Perjanjian Induk dan Perjanjian Pendukung lainnya. Bentuk Perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar (perjanjian baku), artinya para plasma menandatangani perjanjian yang klausalnya telah dibuat oleh perusahaan Inti dan plasma tidak dapat memperbaiki maupun merubahnya. Bahkan pada saat penandatanganan dilakukan secara kolektif dan masih merupakan blanko kosong, serta perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan.
2. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama kemitraan dimulai tahun 1989 sampai sekarang (tahun 2000). Sampai dengan tahun 1997 hubungan kemitraan sangat harmonis, hanya sejak tahun 1997 hubungan kemitraan menjadi tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena perjanjian sudah berjalan 8 s/d 10 tahun ternyata belum ada dari plasma yang memiliki tambak, perusahaan Inti melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasama, secara sepihak; tidak adanya transparan terhadap harga udang; hutang plasma justru membengkak tiga kali lipat lebih dari kredit semula dibuatnya perjanjian.
3. Peran Pemerintah Daerah Lampung, sebenarnya telah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut hanya saja memang kurang jeli dan kurang tegas. Hal ini terlihat para plasma sampai sekarang tidak mempunyai bukti apa-apa terhadap perjanjian yang dilakukan dengan perusahaan Inti. Dalam hal membantu dalam penyelesaian yang dihadapi plasma dengan perusahaan Inti adalah sebagai mediator, sebab cara yang dipilih plasma dalam penyelesaian konfliknya adalah menggunakan mediasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	21
F. Sistematika Penulisan	33
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 35
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya	35
B. Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian	45
C. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	52

D. Konsepsi Kemitraan Sebagai Solusi Ketimpangan Ekonomi	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	103
A. Tinjauan Umum PT. Dipasena Citra Darmaja	105
B. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja Dengan Plasma	123
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja Dengan Plasma	137
D. Peran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dalam Membina dan Membantu Menyelesaikan Permasalahan Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja Dengan Plasma	178
BAB IV PENUTUP	225
A. Kesimpulan Umum	225
B. Kesimpulan Khusus	225
C. Saran	230
DAFTAR PUSTAKA	232

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan secara berencana adalah untuk secara bertahap mengubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan-perubahan hubungan antara manusia, yang mungkin tidak dikehendaki atau tidak disadari oleh pihak-pihak akan terjadi. Hal ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang kian hari akan kian meningkat jumlah dan frekuensinya. Dengan sering timbulnya ketegangan dalam hubungan-hubungan tersebut karena perubahan-perubahan yang bertubi-tubi, dan yang bagi kebanyakan anggota masyarakat merupakan perubahan-perubahan yang tidak terduga-duga, maka perubahan-perubahan yang cukup mendasar ini dirasakan sebagai ketidak adilan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut senada juga dengan yang dikemukakan oleh **Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH** yang menyatakan bahwa :¹

Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat yang bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja.

Oleh karena itu merupakan tugas hukum untuk mempersiapkan norma-norma baru, yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang mengubah hubungan antar manusia yang lama menjadi hubungan antar manusia yang baru. Dalam menentukan norma-norma baru itu hukum senantiasa harus mengusahakan cara atau penyelesaian masalah yang seadil-adilnya, terutama bagi pihak yang lemah. Disinilah letak peranan hukum sebagai sarana penegak keadilan, sehingga inilah sebabnya hukum dalam pembangunan harus senantiasa melihat jauh kedepan dan memperhitungkan masalah-masalah yang sangat mungkin sekali akan terjadi. Baru dengan cara demikian usaha pembangunan kita akan menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, yang akan terus dan tetap menegakkan keadilan di dalam masyarakat, sekalipun perubahan masyarakat dan pembangunan akan terus ditingkatkan.

Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan pembangunan baik bidang ekonomi, hukum, sosial politik, budaya dan pertahanan keamanan, maka fungsi dan tujuan hukum mengalami pergeseran dan bergerak dari

¹. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 202.

keamanan dan ketertiban atau stabilitas masyarakat semata-mata. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh **Roscoe Pound** yang menyatakan bahwa :²

Dalam rangka usaha untuk memuaskan kebutuhan berbagai golongan masyarakat, yang dinamakan "*social engineering*" perlu diberi tekanan pada cara yang secara terus menerus mengusahakan "*a continuity more complete and effective elimination of waste and precluding of fiction in human employment of the goods of existence*" yaitu pencegahan yang efektif dari pemborosan dan pencegahan konflik-konflik antar kebutuhan hidup manusia dalam rangka menikmati kebutuhan hidup manusia.

Dari yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tersebut menunjukkan kepada suatu tujuan lain dari hukum, yaitu kesejahteraan semua dan setiap warga masyarakat. Inilah yang merupakan cita-cita suatu *welvaart staat* (*negara kesejahteraan*). Dalam falsafah Pancasila juga menghendaki tercapainya keadilan sosial, sebagaimana secara lebih terperinci dinyatakan oleh UUD'45, baik dalam Pembukaannya maupun didalam Pasal 33. Dari ketentuan tersebut pada dasarnya dapat diketahui bahwa menurut falsafah hukum Pancasila, keadilan sosial itu baru akan tercapai, apabila terdapat keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perseorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat itu. Untuk mengatur agar tidak saling berbenturan kepentingan serta menjamin keseimbangan di masyarakat, maka diperlukan aturan atau hukum.

². CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal. 16

Agar bangsa Indonesia dapat mencapai suatu negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45, maka dilakukan pembangunan usaha nasional yang terdiri atas koperasi, usaha negara dan usaha swasta. Pembangunan tersebut diarahkan pada pengembangan usaha nasional menjadi kekuatan ekonomi nasional yang sehat, mandiri dan tangguh serta mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi Pancasila dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Selain itu, juga untuk memperkuat struktur usaha nasional dengan memantapkan kelembagaan dan manajemen dalam menghadapi era persaingan bebas, mengembangkan kemitraan dan keterkaitan usaha. Selanjutnya juga untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung dan sehat, memupuk semangat kewirausahaan, profesionalitas, memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, meningkatkan peran serta aktif masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperluas akses terhadap faktor-faktor produksi.

Dunia usaha merupakan tumpuan prioritas pembangunan nasional negara kita. Melalui aktifitasnya, diharapkan dapat memberi kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi, sehingga tercapai suatu perekonomian nasional yang mandiri dan andal, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD'45. Harapan yang diletakkan pada badan usaha khususnya swasta, sebenarnya juga merupakan beban tanggung jawab semua pihak terkait yang meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya bidang hukum. Bagi hukum sebagai suatu institusi sosial padanya

dapat dimunculkan berbagai fungsi dan tujuan. Melalui pengaturan (regulasi) yang diadakan seyogyanya fungsi dan tujuan hukum tersebut harus disesuaikan dengan kinerja badan usaha swasta yang ada di era globalisasi ini. Tentunya dengan tetap berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan badan usaha swasta (berbentuk perusahaan), dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) tentu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu dan untuk memperoleh laba sebagai tujuannya. Sedangkan hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukumnya, mengenai perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah pengatur dalam dunia usaha niaga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha menurut hukum (legal).³

Saat ini Bangsa Indonesia sedang melakukan reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum serta agama dan sosial budaya. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kemerosotan pembangunan sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Fundamental ekonomi yang semula dianggap

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, ndar Maju, Bandung, 1997, hal. 1

kuat karena didukung oleh munculnya konglomerasi oleh sekelompok kecil pengusaha yang tidak mempunyai semangat kewirausahaan sejati, ternyata tidak mampu menanggulangi gejolak krisis. Kelemahan fundamental tersebut juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif.

Oleh karena itu kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional kedepan akan mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya **keterkaitan dan kemitraan** yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Selain dari pada itu, diharapkan kebijakan pembangunan tersebut dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan pembangunan, usaha kecil memegang peranan yang strategis, mengingat jumlahnya yang sangat besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Disisi lain juga potensinya yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, memiliki kemampuan

untuk memanfaatkan bahan baku lokal serta menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Sedangkan karakteristik pengusaha kecil pada umumnya mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan dalam banyak hal, sehingga kalau dirangkai-rangkai, dapat menjadi suatu mata rantai kegagalan yang cukup panjang. Menurut Jantje Bambang Soepriyanto, SH. MM menyatakan bahwa bila diidentifikasi, beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan usaha dari pengusaha kecil diantaranya adalah :⁴

1. memang kurang mampu menjalankan usahanya;
2. lemah didalam pengelolaannya;
3. value sistem yang lebih condong pada cara hidup konsumtif;
4. puas dengan apa yang telah dicapai;
5. terlalu percaya pada "fasilitas";
6. profesionalisme yang rendah;
7. kesadaran akan "kualitas" yang masih rendah;
8. bersifat hit & run;
9. banyak percaya pada hal yang bersifat mistis, takhayul, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal di atas, kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi antara lain menetapkan bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program untuk memberikan

⁴ Jantje Bambang Soepriyanto, *Micro-Lending untuk Microentrepreneurs, sebuah Model Kemitraan*, Makalah, Fak. Hukum-UNDIP, Semarang, 13, September 1997.

kegiatan kepada usaha kecil guna memperluas dan mengatur usahanya dengan mengikutsertakan dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar dengan jalan memperkuat permodalannya, meningkatkan ketrampilannya dan membantu pemasaran hasil produknya. Oleh karena itu menganjurkan kepada pengusaha kecil dan pengusaha besar dalam melakukan usahanya agar melakukan kerjasama kemitraan.

Hal di atas tidak lepas dengan tumbuhnya anggapan bahwa hal-hal yang telah dicapai dari hasil pembangunan adalah sebagai suatu hal yang sudah selayaknya dinikmati, mendorong munculnya pemikiran dan gagasan untuk menjawab pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai sekarang ini telah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum, maupun secara khusus oleh masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Pertanyaan demikian timbul karena adanya anggapan dari beberapa kalangan, bahwa dalam suatu negara yang sedang membangun walaupun stabilitas moneter dan laju pertumbuhan pendapatan nasional cukup memuaskan namun hasil perkembangan tersebut kurang merata dinikmati oleh lapisan masyarakat.⁵

Adanya anggapan maupun fakta yang menunjukkan bahwa masih adanya sebagian rakyat yang belum menikmati tingkat kehidupan yang layak, sementara sebagian kecil anggota masyarakat berhasil dalam memanfaatkan peluang usaha dalam proses pembangunan sehingga memperoleh tingkat

⁵ Arifin M. Siregar, *Prolog Dalam Sumber Daya Manusia; Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 1992

pendapatan yang sangat tinggi. Kondisi demikian menunjukkan adanya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah dan kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi, atau dengan kata lain bahwa gejala demikian menunjukkan adanya ketimpangan pemerataan pendapatan di masyarakat. Dengan adanya gejala tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan orientasi dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dari pembangunan yang berorientasi pertumbuhan kepada aspek pemerataan.

Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk, demikian juga hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati seluruh penduduk secara merata. Aspek pemerataan sendiri dicerminkan pada pengurangan ketimpangan antara pendapatan yang diperoleh kelompok berpendapatan rendah dan kelompok berpendapatan tinggi. Usaha tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Daerah Lampung dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, karena perlu disadari bahwa dimasyarakat Lampung juga masih cukup banyak terdapat pengusaha kecil, pengusaha menengah maupun masyarakat yang sangat kekurangan atau kesulitan modal dalam berusaha, selain itu juga masih mempunyai banyak kelemahan dalam berusaha.

Dengan adanya kelemahan yang menjadi penyebab kegagalan usaha para anggota masyarakat (dalam hal ini petani maupun petambak) maupun pengusaha kecil tersebut yang juga dialami oleh masyarakat Lampung, maka

diperlukan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan yaitu dengan cara kemitraan dengan pihak pengusaha besar.

Salah satu masyarakat yang termasuk sebagai pengusaha kecil maupun sebagai petani atau petambak yang mata pencahariannya membudidayakan udang adalah masyarakat Kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

Untuk meningkatkan usahanya agar dapat berhasil dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut, maka diadakan kerjasama kemitraan dengan PT. Dipasena Citra Darmaja. Memang selama ini (kurang lebih dimulai tahun 1989) sudah terjalin kerjasama kemitraan antara petani tambak atau dalam perjanjian disebut "*Plasma*" dengan PT. Dipasena Citra Darmaja yang dalam perjanjian disebut sebagai "*Perusahaan Inti*". Hanya saja sejak krisis moneter yang terjadi di Indonesia, maka membawa dampak perubahan terhadap ekonomi Indonesia, khususnya bagi para Plasma dan Perusahaan Inti. Sebaliknya, pengaruh dari adanya krisis moneter ini justru harga udang di luar negeri menjadi naik. Hal ini disebabkan hasil kerjasama kemitraan antara Plasma dengan Perusahaan Inti tersebut dipasarkan diluar negeri (di ekspor).

Dengan menurunnya nilai rupiah dan naiknya nilai dollar (khususnya Amerika Serikat), mempengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari para Plasma. Sementara itu, penghasilan yang diterima oleh Plasma dari Perusahaan Inti tidak ada kenaikan. Untuk menjamin dan melindungi para masyarakat yang lemah kedudukannya dalam mengadakan kerjasama dengan Perusahaan yang

kedudukannya lebih kuat, maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama kemitraan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, seperti yang tertuang dalam Kepmentan No. 334/Kpts./IK.210/6/1986, Kepmentan No.509/Kpts./IK.120/7/95, Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997, Kepmentan No.940/Kpts./OT.210/10/97, Kepmentan. No. 944/ Kpts./OT.210/10/97 dan Kepditjendkan No. 1251/Kpts./ KL.420/II/98, serta SK. Gubernur Nomor : 5 tahun 1996 tertanggal 23-2-1996 tentang Kerjasama Kemitraan Usaha Budidaya Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Oleh karena itu menurut para Plasma perjanjian yang telah dibuat terdahulu yaitu mulai tahun 1989 dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini karena tidak berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Selain itu, Plasma menuduh Perusahaan Inti tidak transparan dalam melakukan manajemen maupun harga udang dan angsuran kredit yang dibayarkan oleh para Plasma. Sebagai wujud dari ketidakpuasan para Plasma terhadap Perusahaan Inti, para Plasma melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kelancaran usaha, seperti antara lain berupa unjuk rasa secara massal kepada Perusahaan Inti dan sebagainya baik berunjuk rasa di lokasi Perusahaan Inti, di DPRD Tingkat II Tulang Bawang, di DPRD Tingkat I Propinsi Lampung, menemui Wakil Presiden RI di Lampung bahkan mengadukan permasalahannya kepada Presiden RI. Unjuk

rasa yang agak rawan dilakukan para Plasma yaitu di DPRD Tingkat I Propinsi Lampung, yaitu diikuti oleh seluruh anggota Plasma yang berjumlah kurang lebih 9.032 orang (semua laki-laki) selama 10 hari dimulai dari tanggal 13 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1999. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi, Muspida Tingkat I Lampung, membuat kesepakatan dengan Plasma dan Pihak Perusahaan Inti (PT. Dipasena Citra Darmaja yang ternyata tidak bersedia bertanda tangan) pada tanggal 22 Oktober 1999 dengan tujuan akhir agar para Plasma pulang kelokasi tambak dengan pengawasan aparat Kepolisian sebagai jaminan keselamatan. Ternyata di Lokasi pertambakan para Plasma tersebut ditolak oleh Pihak Perusahaan, sehingga esok harinya para Plasma kembali lagi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tingkat I Lampung. Sehubungan dengan usaha yang dilakukan para Plasma tersebut belum membawa hasil, sehingga para Plasma yang didukung oleh DPRD Tingkat I Propinsi Lampung maupun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung membawa penyelesaian masalah tersebut ke Jakarta untuk dapat menyelesaikan (baik kepada Wakil Presiden RI, Presiden RI maupun DPR RI).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, untuk mengetahui sumber masalah yang sebenarnya dan pola kerjasama kemitraan usaha pertambakan (budidaya) udang dimaksud yang dilakukan antara masyarakat Kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sebagai Plasma) dengan PT. Dipasena Citra Darmaja

yang berkedudukan di Bandar Lampung (sebagai Perusahaan Inti), maka penelitian terhadap perjanjian Kemitraan tersebut perlu dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Atas dasar pokok pikiran yang melandasi dan melatar belakangi penulisan Tesis ini, maka untuk mempertajam penelaahan dan analisis diajukan permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana isi perjanjian kerjasama kemitraan usaha budidaya udang yang dilakukan antara PT. Dipasena Citra Darmaja (sebagai Perusahaan Inti) dengan masyarakat Kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sebagai Plasma) ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan usaha yang dilakukan Perusahaan Inti dengan Plasma tersebut?
3. Seberapa jauh peran Pemerintah Daerah Lampung dalam mewujudkan kemitraan usaha dan membantu penyelesaian masalah yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diajukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami isi perjanjian kerjasama kemitraan usaha budidaya udang yang dilakukan antara PT. Dipasena Citra Darmaja

- (sebagai Perusahaan Inti) dengan masyarakat Kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sebagai Plasma).
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan usaha yang dilakukan antara Perusahaan Inti dengan Plasma. Serta dapat memberikan sumbang saran dalam usaha menyelesaikan masalah tersebut.
 3. Mengetahui dan memahami sejauhmana peran Pemerintah Daerah Lampung dalam mewujudkan tujuan kemitraan dan membantu penyelesaian masalah yang timbul dan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan usaha tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yang bertumpu pada data sekundair;

Data sekundair dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga : yaitu bahan-bahan hukum primair, bahan-bahan hukum sekundair dan bahan-bahan hukum tersiair.

Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk mengetahui beberapa peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama kemitraan, sejauhmana asas-asas hukumnya, untuk menemukan

hukum in concreto, sistematik hukum yang diterapkan sebagai pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum seperti masyarakat, subyek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum serta taraf sinkronisasi vertikal / horizontal dari hukum.⁶

- b. Pendekatan Yuridis Empiris, yang akan bertumpu pada data Primair (hasil penelitian lapangan).

Pendekatan Yuridis Empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha, untuk mengetahui sumber masalah yang terjadi yang menyebabkan Plasma melakukan unjukrasa secara massal, untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah Lampung dalam membina dan membantu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan antara Perusahaan Inti dan Plasma.

Dalam melakukan pendekatan Yuridis Empiris ini, metode yang digunakan adalah Kualitatif, induktif dan fenomenologis. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.12.

responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian Studi Kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analisis. Yaitu di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸

Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek perjanjian kerjasama kemitraan usaha dari segi teori maupun praktek.

3. Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini dilakukan terhadap Masyarakat Kecamatan Menggala yang menjadi petani tambak dalam usaha budidaya udang sebagai Plasma dan PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti serta Aparat Pemerintah Daerah Lampung yang terkait.

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara Purpsive sampling (acak bertujuan). Disebut purposive karena subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan usaha tersebut, dan nara sumber yang

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal.5

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 hal. 10.

dimiliki mampu memberi pandangan mengenai perjanjian kerjasama kemitraan usaha budidaya udang dan pelaksanaannya.

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga, maka kelompok subyek penelitian yang jumlahnya relatif banyak diambil beberapa orang saja sebagai sampel. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka subyek penelitian meliputi :

1. Masyarakat yang menjadi Plasma dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha budidaya udang.
2. Pejabat yang berwenang di Perusahaan Inti yang melakukan kerjasama kemitraan usaha budidaya udang dengan Plasma.
3. Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang perjanjian kerjasama kemitraan usaha budidaya udang dan pelaksanaannya.
4. Pejabat yang terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang Proponsi Lampung.
5. Pejabat yang terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Sampel awal adalah dua orang, kemudian berkembang mengikuti prinsip *Snowballs Teory* dan berakhir sampi terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Istilah teknik pengumpulan data disini mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis data yang diperlukan untuk penyusunan tesis. Data yang dikumpulkan

dalam penelitian ini meliputi data primair dan sekundair, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun survai lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumentair. Kajian dokumentair ini dilakukan untuk memperoleh data sekundair yang meliputi .

1. Bahan hukum primair

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 - 2004;
- c) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Perseroan Terbatas;
- d) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut perjanjian maupun tentang kerjasama kemitraan.

2. Bahan hukum sekundair

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan perusahaan swasta/ Perseroan Terbatas;
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian maupun tentang kerjasama kemitraan usaha;
- c) Hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama kemitraan usaha.

3. Bahan-bahan hukum tersiair, terdiri atas :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Hukum Ekonomi;
- c) Kamus Bahasa Indonesia.

b. Survei Lapangan

Di dalam survei lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung, khususnya di Kecamatan Menggala.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada masyarakat tersebut dimana mayoritas (kebanyakan) mata pencahariaannya sebagai petani tambak dalam budidaya udang dan menjadi Plasma yang melakukan kerjasama kemitraan dengan PT. Dipasena Citra Darmaja. Selain itu, lokasi penelitian sangat jauh dari pusat kota (Bandar Lampung), yaitu berjarak kurang lebih 300 KM yang ditempuh dengan waktu rata-rata 8 jam karena lokasi jalan darat yang kurang bagus dan juga harus menggunakan perahu motor (speedboat) untuk menyeberangi sungai. Hal ini membawa dampak kurang adanya pengawasan oleh Instansi terkait terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan

usaha yang dilakukan para pihak serta minimnya informasi dan publikasi yang dilakukan baik oleh media cetak maupun media elektronik.

5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis data *induksi konseptualisasi*.⁹ Dalam kaitan dengan penelitian ini, peneliti berusaha menarik data/informasi empirik ketingkat yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domein untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, peneliti kemudian berusaha lebih mem fokuskan pada domein tertentu dengan menggunakan analisis taksonomis guna memperoleh analisis yang lebih rinci dan lebih mendalam. Kemudian peneliti akan mencoba melakukan analisis komponensial yang berguna menemukan pengertian yang komprehensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai suatu domein sehingga dapat memahami makna dari masing-masing domein secara holistik.

⁹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh Malang, 1990, hal.90.

E. Kerangka Pemikiran

Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi terbatas pada suatu negara. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah memungkinkan arus orang, barang, jasa dan informasi bergerak dengan jauh lebih cepat, dalam jumlah yang makin besar, dengan kualitas yang makin baik dan dengan biaya yang makin murah. Konsekuensi proses globalisasi ekonomi tersebut sangat besar terhadap perekonomian negara manapun. Indonesia juga tidak dapat menghindar dari arus perubahan ini. Oleh karena itu, segala upaya harus diarahkan untuk memperoleh manfaat daripadanya, dan mengatasi kerugian yang dapat ditimbulkannya.

Arus globalisasi dan pola perkembangan ekonomi global seperti di atas akan membawa perekonomian suatu bangsa makin terintegrasi secara dinamis dengan perekonomian dunia. Namun disini akan berlaku hukum persaingan, yaitu yang akan keluar sebagai pemenang dan memperoleh manfaat dari ekonomi dunia adalah yang telah secara mantap mempersiapkan diri.¹⁰ Oleh sebab itu, dalam menghadapi perkembangan dunia, khususnya globalisasi ekonomi itu bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan arah. Sebaliknya harus tetap berpegang pada amanat konstitusi yang merupakan landasan dan acuan pembangunan, pada tingkat perkembangan dan kondisi apapun seperti yang dimuat dalam pasal 33 UUD 1945.

¹⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996, hal. 106.

Saat ini bangsa Indonesia sedang melakukan reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional, untuk mewujudkan pembaharuan disegala bidang pembangunan nasional terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum serta agama dan sosial budaya. Dengan adanya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 ternyata bangsa Indonesia terpuruk. Kelemahan fundamental dari sistem perekonomian Indonesia adalah disebabkan karena pengabaian perekonomian kerakyatan yang bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif dan kompetitif.¹¹ Oleh karena itu diharapkan kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional kedepan akan mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ada dugaan bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini kurang tepat bahkan dinilai salah. Hal ini terlihat terutama dalam dunia usaha, bahwa pemerintah hanya mementingkan bahkan memberikan fasilitas kepada pengusaha besar saja dan akhirnya mereka membentuk kelompok sendiri yang sering disebut sebagai "konglome rat". Ternyata ada masalah struktural dalam dunia usaha yang ditunjukkan oleh adanya lapisan pengusaha besar yang relatif sedikit jumlahnya namun menguasai sebagian besar aset produktif, sedangkan lapisan pengusaha kecil dan menengah sebagai dasar perekonomian rakyat dan merupakan bagian

¹¹ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal.vii.

besar dari pengusaha, kurang andal dan hanya menguasai sebagian kecil aset nasional.

Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak merata-nya pemilikan sumber daya produksi dan produktifitas, serta sistem distribusi dan pasarnya, diantara pelaku ekonomi. Kesenjangan itu telah menyebabkan terjadinya dikotomi, yaitu antara pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah, serta menumbuhkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan struktural ini tercermin baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun permodalan. Dualisme dalam perekonomian Indonesia itu tidak mudah dihilangkan karena menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar dan sumber daya manusia.

Proses membesarnya kesenjangan tersebut harus dihentikan. Caranya memang tidak dengan menghambat upaya meningkatkan efisiensi perekonomian (seperti deregulasi), tetapi dengan mendorong percepatan perubahan struktural, yang memperkuat ekonomi usaha kecil dan ekonomi rakyat pada umumnya, serta membangun lapisan menengah yang kukuh dan andal. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern, ekonomi yang lemah ke ekonomi yang kuat dan tangguh, ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan dari kedudukan ketergantungan ke kedudukan kemandirian. Upaya ini antara lain dilakukan melalui program-program kemitraan.¹²

¹² Ginanjar Kartasasmita, op. cit hal. 188.

Untuk dapat melakukan kemitraan, antara pengusaha kecil maupun pengusaha menengah dengan pengusaha besar, hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya jaminan hukum diantara para pihak. untuk menghindari kerugian salah satu pihak dikemudian hari (misalnya wanprestasi, dan sebagainya), maka para pihak sebelum mengadakan kemitraan yang telah disepakati sebelumnya melalui diplomasi maupun perundingan, maka kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam *perjanjian*. Dengan demikian apabila kita membahas kemitraan, maka tidak dapat dilepaskan dengan perjanjian itu sendiri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam pasal 1313 disebutkan bahwa : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut *Rutten* rumusan perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.¹³

Lain halnya dengan pendapatnya Prof. R. Subekti, SH yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan perikatan.¹⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, maka perjanjian itu menerbitkan

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hal.1.

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebenarnya perjanjian tidaklah sama dengan perikatan, tetapi perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan selain undang-undang.

Sebenarnya undang-undang telah menjamin dan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apasaja, baik mengenai hal yang sudah diatur, ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus atau bahkan untuk hal-hal yang belum di atur dalam undang-undang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebab yang terlarang yang ditentukan undang-undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum. Pada dasarnya para pihak yang membuat perjanjian, dikarenakan saling membutuhkan. Oleh karena itu agar setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat berlaku sah, maka dalam pasal 1320 KUH Perdata telah ditentukan 4 (empat) syarat yang harus ada pada setiap perjanjian.

Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, dimana hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini membebaskan orang untuk mebuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih

undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.¹⁵ Berdasarkan batasan pengertian tersebut, maka masyarakat bebas menentukan atau memilih pihak lain dalam melakukan perikatan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan usahanya agar lebih efisien, lebih maju dan lebih mendapatkan keuntungan, para masyarakat yang termasuk dalam golongan pengusaha kecil ini melakukan kerjasama kemitraan usaha dengan pengusaha besar.

Kemitraan, terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergi, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum game*, tetapi *positive-sum game* atau *win-win situation*. Dengan perkataan lain kemitraan usaha merupakan hubungan kerja sama antar usaha yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pengusaha kecil yang akan melakukan kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar, yang memang sangat didorong dan dibantu pertumbuhannya oleh pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan di bidang pertanian dan perikanan sebagai pedoman untuk melakukan kemitraan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, antara lain :

¹⁵ Purvahid Patrik, *Asas-Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal.3.

1. Kepmentan No.334/Kpts./IK.210/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
2. Kepmentan No.509/Kpts./IK.120/7/95 tanggal 13 Juli 1995 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 44 tahun 1997 tentang Kemitraan;
4. Kepmentan No.940/Kpts./OT.210/10/97 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
5. Kepmentan.944/Kpts./OT.210/10/97 tanggal 13 Oktober 1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian;
6. Kepditjenkan No.1251/Kpts./KL.420/II/98 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola PIR.

Dengan kebijakan pemerintah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah sangat menyadari para pengusaha kecil (masyarakat bawah) harus dilindungi dalam melakukan usahanya yang bekerjasama menggunakan pola kemitraan dengan pengusaha besar. Pola kemitraan disini bertujuan agar pengusaha besar tidak menjadikan pengusaha kecil sebagai objek usahanya yang dapat diperlakukan semena-mena, begitu juga kepada pengusaha kecil tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang dimiliki pengusaha besar, sehingga justru pengusaha besar merasa diganggu dalam usahanya dan pengusaha kecil

dianggap sebagai "*parasit*" saja. Tetapi diharapkan dengan pola kemitraan ini baik pengusaha kecil (masyarakat) maupun pengusaha besar mempunyai kedudukan yang seimbang dan dalam usaha-nya sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan demi kemajuan usahanya.

Oleh karena itu bagi masyarakat maupun Badan Hukum yang akan mengadakan kerjasama kemitraan, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian kemitraan tersebut selain yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, maka juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai kerjasama kemitraan. Disinilah letak perbedaan perjanjian biasa dengan perjanjian kerjasama kemitraan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, masyarakat Kecamatan Menggala yang melakukan usahanya dengan membudidayakan udang melakukan kerjasama kemitraan dengan PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Pola PIR. Sebagai batasan pengertian bahwa yang dimaksud Pola Tambak Inti Rakyat menurut pasal 5 Kepmentan No.334/Kpts./IK.210/6/1986, disebutkan bahwa :

Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) dalam usaha pertambakan udang merupakan pola pengembangan dan perusahaan pertambakan udang dengan menggunakan perusahaan pertambakan udang sebagai Inti yang membantu dan membimbing petani tambak sebagai Plasma, dalam membangun dan mengusahakan tambaknya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

Kebijakan di atas dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa potensi lahan pantai untuk pertumbuhan udang sangat besar dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya serta diarahkan guna terciptanya iklim berusaha yang sehat

dan mewujudkan asas-asas pemerataan berusaha serta pemerataan hasil pembangunan dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. Selain itu, pengembangan pertambakan udang dapat memberi peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja.

Selain peraturan di atas, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan yaitu Kepmentan. No.509 / Kpts. / IK.120/7/95. Keputusan Menteri Pertanian tersebut ditempuh dengan pertimbangan bahwa agribisnis perikanan Indonesia dikembangkan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi, melalui pengembangan serta penerapan teknologi maju dalam berbagai usaha budidaya ikan maupun udang di daerah pantai, tambak, dan air tawar. Dalam meningkatkan pendapatan petani tambak atau nelayan perlu meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan maupun udang melalui *kemitraan* usaha perikanan yang saling menguntungkan dengan perusahaan perikanan.

Selanjutnya dalam pasal 1 Sub. e dari Kepmentan No. 940/Kpts./OT.210/10/97 disebutkan bahwa : "Usaha perikanan adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani / nelayan atau pengusaha baik di perairan darat maupun di laut, mulai dari usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan, pengolahan sampai dengan pemasarannya." Sedangkan pengertian **Kemitraan** itu sendiri menurut UU Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa : Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan

yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, kemitraan usaha merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan ketrampilan yang didasari saling percaya mempercayai antara perusahaan mitra dengan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Lebih dari itu, sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha perikanan Dengan Pola PIR, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Kepditjenkan (Keputusan Direktur Jenderal Perikanan) Nomor: 1251/Kpts. /KL.420/II/98, dimana didalamnya memuat batasan pengertian tentang Kemitraan Usaha Perikanan. Menurut Kepditjenkan tersebut yang dimaksud dengan

"Kemitraan usaha Perikanan adalah pola pengembangan usaha perikanan dengan suatu sistem kemitraan antara kegiatan usaha Nelayan dan Petani ikan baik secara perorangan maupun secara kelompok atau gabungan kelompok Nelayan dan Petani ikan atau Koperasi Perikanan sebagai kelompok mitra dengan Perusahaan Perikanan atau Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan (Koperasi, BUMN dan Swasta) sebagai Perusahaan Mitra dengan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan dan berkesinambungan".

Mengingat masih melekatnya berbagai keterbatasan dan kelemahan struktural pada nelayan dan petani ikan (maupun udang), maka salah satu kebijaksanaan dalam pembangunan dibidang perikanan khususnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan petani

tambak (ikan dan udang), perlu dilaksanakan kerjasama kemitraan usaha perikanan.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perikanan dengan melakukan kerjasama kemitraan tersebut, di Daerah Lampung mendapat dukungan dan perhatian yang besar dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Hal ini terbukti dengan menindak lanjuti kebijaksanaan pemerintah dimaksud Gubernur mengeluarkan Keputusan Nomor: 5 Tahun 1996 tertanggal 23 - 2 - 1996 tentang Kerjasama Kemitraan Usaha Budidaya Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud :

- Perusahaan Inti : adalah pengembangan usaha perikanan dengan melibatkan Perusahaan Perikanan sebagai Inti yang bekerjasama dengan Petani Ikan (Udang) sebagai Plasma dalam suatu sistem kemitraan usaha perikanan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan;
- Plasma : adalah Petani Ikan dan/atau Udang yang menerima lahan untuk dimiliki baik secara perorangan atau kelompok yang bekerjasama dengan Perusahaan Inti.

Sedangkan dalam pasal 2 Keputusan Gubernur tersebut dimuat bahwa Kerjasama Kemitraan Usaha Perikanan antara Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dengan Plasma dituangkan dalam Suatu Perjanjian Tertulis yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang. Dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung,

diharapkan memantapkan dan meningkatkan pelaksanaan kemitraan usaha khusus-nya di bidang perikanan di Propinsi Lampung.

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Selain itu, usaha kecil disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi dilain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, kerjasama yang baik yang dapat dilakukan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan/atau pengusaha besar adalah dengan kerjasama kemitraan, dimana dalam kemitraan tersebut para pihak memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Seperti telah diketahui bersama, bahwa akibat pembangunan yang tidak merata, membawa dampak pada terjadi-nya kesenjangan sosial ekonomi dimasyarakat. Sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi atau mempersempit terjadinya kesenjangan tersebut, ditempuh pengembangan kemitraan usaha antara pengusaha besar (kuat) dengan pengusaha kecil (lemah). Kemitraan ini diharapkan dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional (wilayah). Keberhasilan pelaksanaan kemitraan yang besar dengan yang kecil, dimana

terjadi pemberdayaan yang kecil/lemah, merupakan wujud nyata dari pengamalan ekonomi kerakyatan.¹⁶

Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi begitu penting terutama dalam menciptakan lingkungan, iklim, kondisi dan nuansa yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas sarana prasarana, permodalan, manajemen, teknologi dan rekayasa rancang bangun kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan.

Dalam era globalisasi dewasa ini dimana aspek sosial ekonomi, komunikasi yang serba transparan, batas-batas administrasi negara yang semakin kabur, persaingan perdagangan semakin tinggi menuntut produktivitas dengan efisiensi tinggi, sehingga kemitraan merupakan salah satu strategi dan kiat memenangkan persaingan bebas tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Secara menyeluruh tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini diuraikan Latar Belakang dari pembangunan ekonomi secara umum menuju pada pola kemitraan di Propinsi Lampung, Perumusan masalah yang

¹⁶ Muhammad Jafar Hafsah, op. cit. hal. XV.

akan dibahas dalam tesis ini, Tujuan Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab . II : Tinjauan Pustaka

Dalam Tinjauan Pustaka ini akan diuraikan tentang Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya, Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Konsepsi Kemitraan Sebagai Solusi Ketimpangan Ekonomi.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Dalam Bab III ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti, Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma, Peran Pemerintah Daerah Lampung Dalam Membina Dan Membantu dalam Menyelesaikan Permasalahan Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma.

Bab IV : Penutup

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan pada umumnya dan di Lampung pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Perjanjian Pada Umumnya

Dikalangan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa perjanjian adalah sama dengan perikatan. Ini adalah pendapat yang salah karena perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Perikatan lahir apabila ada dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan antara dua orang atau lebih tersebut.

Mengenai perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul "Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Digunakan kata "atau" diantara "kontrak" dan "perjanjian" menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III KUH Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.¹⁷

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata rumusan perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) yaitu : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Indonesia, Hersa, Purwokerto, 1989, hal.16

satu orang atau lebih. Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksudkan adalah perbuatan hukum.¹⁸ Lain halnya menurut R. Setiawan definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri, untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta

¹⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal.49

¹⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, hal. 9

kekayaan.²⁰ Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka unsur-unsur perjanjian terdiri dari :

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjianitu maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 78

- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Sebelum orang mengadakan perjanjian, maka tidak kalah pentingnya dan bahkan menjadi penentu sebelum terjadinya suatu perjanjian yaitu mengenai asas-asas yang ada dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apasaja, baik bentuknya, isinya dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaannya, maupun syarat-syarat,

dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis, dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apasaja (tentang apasaja), dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- perjanjian-perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang;
- perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum di atur dalam undang-undang.

Dari ketentuan hal di atas, dengan demikian asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, karena dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

b. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.²¹

²¹ A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.20

Dengan kata lain perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

c. Asas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.²²

d. Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang.

Jadi dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.²³

Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

²² Ibid, hal. 19

²³ Ibid, hal. 20

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.²⁴

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

"Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri".

Dalam hukum perjanjian, selain asas-asas perjanjian juga terdapat jenis-jenis perjanjian yang ada. Jenis-jenis perjanjian tersebut antara lain :

- a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Dalam perjanjian jenis ini, yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik tidak berwujud berupa hak.²⁵

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH

²⁴ Ibid, hal. 20

²⁵ Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal. 86

Perdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.²⁶

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.²⁷

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

²⁶ Ibid, hal. 87

²⁷ Ibid, hal. 87

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.²⁸

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.²⁹

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak

²⁸ Ibid, Hal. 88

²⁹ Ibid, Hal. 89

yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

- a. Persetujuan kehendak
- b. Kecakapan pihak-pihak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Apabila suatu perjanjian yang telah dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka akibat dari perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dimana disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian timbullah perikatan bagi mereka.

Dalam suatu perjanjian sebenarnya yang paling penting adalah isinya. Keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan pada isi perjanjian. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka salah satu pihak sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.³⁰

Menurut P. Scholten, di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat penting, yaitu : janji itu mengikat, janji itu

³⁰ J. Satrio, op. cit, hal. 354.

menimbulkan hutang yang harus dipenuhi. Karena janji saja (yang memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata) sudah mengikat, maka orang mengatakan bahwa perjanjian menurut KUH Perdata mempunyai sifat atau ciri konsensual. Bahwa orang terikat kepada apa yang dijanjikan sebenarnya merupakan suatu kebutuhan masyarakat, adalah sulit untuk membayangkan suatu kehidupan masyarakat, dimana pihak yang satu tak dapat mengandalkan janjinya kepada pihak yang lain.³¹

B. Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian

Perjanjian timbul karena adanya kebutuhan hidup dalam masyarakat. Dengan bertambahnya waktu, para anggota masyarakat merasa makin banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itulah diperlukan bantuan orang lain dengan mengadakan perjanjian dimana dua pihak berjanji sesuai dengan kebutuhan para pihak. Tanpa adanya bantuan orang lain tidak akan ada perkembangan dan kemajuan dalam hubungan antara para anggota masyarakat, terutama dalam dunia perdagangan dan ekonomi.³²

Dalam pembuatan perjanjian seperti yang telah dikemukakan di atas, dikenal asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini orang bebas untuk mengatur sendiri isi perjanjian yang akan dibuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan untuk membatasi tanggung jawab yang harus dipikulnya.

³¹ J. Satrio, *Ibid*, hal. 359.

³² Purwahid Patrik, *op. cit*, hal. 1

Dengan adanya kebebasan ini maka setiap orang yang telah berjanji harus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.³³

Menurut Ny. Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, S.H menyatakan bahwa menarik kembali secara sepihak suatu perjanjian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada umumnya tidak diperbolehkan, kecuali jikalau itu telah diperjanjikan, yang itu mungkin adanya, asalkan masih terdapat juga sekedar ikatan dari pihak yang mempunyai hak untuk menarik kembali, karena jika tidak demikian maka berdasarkan Pasal 1256 KUH Perdata akan terdapat suatu syarat yang membuat perjanjian itu batal.³⁴

Setiap pihak yang membuat perjanjian, terutama pihak kreditur sangat menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna sesuai dengan isi perjanjian. Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Boleh jadi debitur ingkar dalam menepati pelaksanaannya. Keingkaran debitur inilah yang memberi hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melaksanakan prestasi.³⁵ Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian yang mengikat bagi para pihak perlu diperhatikan keseimbangan prestasi para pihak tersebut pada waktu menutup perjanjian.

³³ Purwahid Patrik, *Penyalahgunaan Keadaan, Kapita Selekta Hukum Perdata* (Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fak. Hukum Undip, 1986), hal. 27.

³⁴ Sri Soedewi, Mosjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1975, hal. 34

³⁵ M. Yaiya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 58

Ketidak seimbangan prestasi antara dua pihak dapat terjadi apabila pihak yang satu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang lain. Dalam keadaan seperti ini pihak yang kedudukannya lebih rendah, baik secara ekonomi, phisik maupun kekuasaan akan menutup perjanjian dalam keadaan tidak bebas atau terpaksa. Seharusnya pihak yang berkedudukan lebih tinggi tidak memanfaatkan kedudukannya sehingga kedua pihak dapat menutup perjanjian yang mengikat kedua pihak tersebut dalam keadaan bebas dan tidak ada unsur terpaksa.³⁶ Sehubungan dengan hal di atas, Prof. Purwahid Patrik, S.H menambahkan bahwa ketidakseimbangan prestasi dapat terjadi apabila terdapat perubahan keadaan yang mengakibatkan debitur keberatan untuk memenuhi perjanjian. Perjanjian akan bertentangan dengan kepatutan apabila dalam keadaan seperti itu debitur tetap diwajibkan untuk memenuhi prestasinya yang sebenarnya berat untuk dilaksanakan.³⁷ Selanjutnya dalam hal ini R.M. Suryodiningrat, S.H berpendapat bahwa kewajiban kedua belah pihak ialah melaksanakan perjanjian dengan ikhtikad baik memberi kepastian hukum mengenai isi suatu perjanjian yang tidak selalu dinyatakan dengan jelas. Hakim harus mempertimbangkan apakah dalam perkara yang dihadapinya asas-asas kepatutan dan keadilan perjanjian harus ditafsirkan menyimpang dari kata-kata.³⁸ Ikhtikad baik berlaku sebagai pelengkap dalam perjanjian apabila terdapat keadaan yang lain dari apa yang

³⁶ J. Satrio, op. cit, hal. 231

³⁷ Purwahid Patrik, op. cit, hal. 14-15.

³⁸ Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, 1985, hal. 114.

dibayangkan semula. Sedangkan berlaku sebagai yang menyampingkan perjanjian apabila hakim mengambil keuntungan dari keputusan dengan menysihkan atau merubah suatu perjanjian.³⁹

Menurut Riduan Syahrani, S.H menyatakan seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidak membawa hasil apa-apa, walaupun perjanjian itu telah dibuat secara sah dan mengikat orang tersebut.⁴⁰

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian yang mengikat bagi para pihak juga dapat terjadi bila debitur atau salah satu pihak wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji terjadi apabila debitur atau salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur atau salah satu pihak tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa. Wanprestasi seorang debitur atau salah satu pihak dalam perjanjian dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

³⁹ Purwahid Patrik, *Op. cit*, halaman 17-18.

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hala. 248.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut atau melakukan perbuatan tertentu), tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas.⁴¹

Senada dengan hal di atas, ditegaskan pula oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa jika satu pihak telah melanggar kewajibannya dalam perjanjian yang mengikat pihak tersebut, biasanya tidak ada pembelaan baginya bahwa pelanggaran itu bukanlah kesalahannya. Hanya saja jika ada sebab dari luar yang membuat pelaksanaan itu secara fisik, hukum dan perdagangan tidak mungkin dilakukan, sehingga kepadanya dapat dimaafkan karena tidak melaksanakan perjanjian itu. Kenyataan bahwa ia telah melakukan pemeliharaan secara layak, tidak dapat dijadikan alasan baginya untuk membela diri.⁴²

Selanjutnya menurut Pitlo menegaskan bahwa ada perkecualian, karena tidak diperkirakan juga oleh pembentuk undang-undang bahwa kehendak dari pihak-pihak kadang-kadang harus menyisih demi kepentingan

⁴¹ Subekti, Op. cit, hal. 14

⁴² Abdulkadir Muhammad, Op.cit, halaman 156.

masyarakat, karena beranggapan dalam undang-undangleh selalu terdapat pembatasan kebebasan kepada para pihak.⁴³ Selain itu Prof. Purwahid Patrik, S.H menyatakan bahwa kadang-kadang undang-undang mengatur dengan kata-kata yang banyak bahwa ketentuan itu adalah hukum pemaksa, apabila peraturan itu mengenai ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁴

Suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak dan sah menurut hukum, membawa konsekuensi perjanjian tersebut mengikat para pihak sendiri. Hal ini adalah logis, dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari padanya hanyalah untuk para pihak sendiri.⁴⁵ Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa atas namanya sendiri orang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri. Dengan mengikatkan diri tersebut berarti meletakkan kewajiban pada dirinya. Yang demikian itu kiranya sudah layak, karena kalau orang dapat dengan semaunya sendiri meletakkan kewajiban-kewajiban kepada orang lain, kiranya akan muncul ketidakadilan yang besar. Jadi dari Pasal 1315 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa orang tidak dapat meletakkan kewajiban kepada orang lain tanpa sepakatnya.

Untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan bagi para pihak yang telah melaksanakan perjanjian, maka dapat dilihat dari beberapa sumber, antara lain :

⁴³ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.65.

⁴⁴ Purwahid Patrik, Ibid.

⁴⁵ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku 1), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.75.

- Dari sumber undang-undang sendiri

Pada umumnya undang-undang hukum perjanjian telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan sempurna;

- Akta/Surat Perjanjian

Dalam hal ini yang dibuat berdasar persetujuan / *overeenkomst* dan kehendak para pihak. Akte/surat demikianlah yang kita sebut "*contract beding*". Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa setiap persetujuan mempunyai kekuatan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain;

- Kewajiban lain juga dapat dilihat menurut tujuan (*strekking*) dari perjanjian dan sifat perjanjian. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain seperti yang disebut dalam Pasal 1348 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : isi persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan-perjanjian.

- Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1245/Sip/1974 tanggal 9-11-1976 yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang telah ditentukan dalam perjanjian (*besteding en gebruikelijk beding*).

Demikian juga Pasal 1339, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa para pihak dalam pembuatan perjanjian agar memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang, oleh karena itu apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian harus memenuhi kausa yang sah. Dalam hal ini perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Dalam pelaksanaan perjanjian yang mengikat, maka para pihak harus memenuhi prestasinya secara sukarela. Selain itu para pihak tidak boleh mentah-mentah menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam KHU Perdata saja, tetapi hendaknya juga mengetahui perkembangan hukum yang ada dengan memperhatikan saran-saran para sarjana hukum seperti yang telah penulis uraikan dalam penulisan tesis ini di atas.

C. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Perhatian serius terhadap posisi ekonomi rakyat mulai timbul beberapa tahun belakangan ini. Perhatian ini muncul dikalangan pemikir-pemikir ekonomi dan hukum Indonesia setelah mereka melihat semakin tersingkirnya aktor-aktor ekonomi rakyat dalam konstelasi ekonomi Indonesia

Istilah ekonomi kerakyatan mengandung konotasi lahirnya aliran ekonomi baru yang berbeda dari aliran-aliran ekonomi yang selama ini menjadi acuan. Adapun maksud dari istilah tersebut adalah mengacu pada suatu sektor perekonomian tertentu yang dihuni oleh massa rakyat. Berpedoman pada penggunaan istilah kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, maka makna istilah kerakyatan tersebut dapat dipastikan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Jika kata kerakyatan dalam ungkapan ekonomi kerakyatan itu dicari maknanya sesuai dengan kedudukannya sebagai kata sifat, maka kata lain dari ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah ekonomi yang demokratis atau demokrasi ekonomi.

Pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma neoklasik tidak diiringi dengan penataan struktur sosial, dalam pengertian tidak diiringi dengan penataan apa yang disebut dialektika hubungan ekonomi antara aktor ekonomi di dalam masyarakat. Akibat pelaksanaan strategi pembangunan neoklasik ini, proses pembangunan terfokus kepada peningkatan tanpa mempertimbangkan siapa yang menikmatinya. Faktor modal dan faktor teknologi merupakan faktor-faktor yang krusial dalam proses produksi.

Model neoklasik yang diterapkan di Indonesia boleh dikatakan kurang bahkan (tidak) mempertimbangkan secara serius masalah-masalah sosial, seperti pengangguran (terbuka maupun terselubung), kemiskinan, distribusi pendapatan dan kekayaan, dampak teknologi yang digunakan dalam proses produksi dan lain sebagainya, yang ada dalam masyarakat. Bahkan model

neoklasik yang diterapkan di Indonesia ini tidak mempertimbangkan aspek kelembagaan masyarakat dalam sistem sosial Indonesia sebagai warisan feodalisme dan kolonialisme.

Seperti kita ketahui, kedua sistem sosial ini mengalienasikan sebagian besar rakyat dalam konstelasi ekonomi, sehingga mereka hanya merupakan ektor-aktor ekonomi yang marginal.⁴⁶ Marginalisasi rakyat ini tercermin dalam bentuk status ekonomi di masyarakat yaitu : yang kuat bertambah kuat, yang lemah bertambah lemah (yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin). Surplus ekonomi bukannya menyebar keseluruh strata sosial seperti yang diantisipasi dalam paradigma neoklasik, tetapi diserap keatas. Ini dapat dibuktikan dengan menurunnya nilai tukar petani, merosotnya upah riil buruh diukur dengan kebutuhan fisik minimum, dan tidak berhasil meningkatnya surplus konsumen akibat struktur pemasaran yang monopolis dan oligopolis.

Adanya monopoli dan oligopoli memperkuat posisi kelompok (group) perusahaan besar yang muncul akibat daripada kombinasi kebijaksanaan Pemerintah yang yang menguntungkan mereka seperti subsidi kredit investasi dimasa lalu, sistim perijinan usaha, peraturan investasi, ataupun dari pembelian pemerintah. Kenyataan ini menurut Anwar Nasution mengatakan bahwa :

"menunjukkan bahwa adanya konglomerat-konglomerat ini belum tentu menyumbang pada peningkatan efisiensi, penurunan biaya

⁴⁶ Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal.vi

produksi, dan peningkatan produktivitas ekonomi nasional. Oleh karenanya, kong-lomerat-konglomerat seperti itu belum tentu memberikan manfaat positif bagi ekonomi nasional secara keseluruhan, akan tetapi justru menjadi beban tambahan dalam keadaan ekonomi yang tengah mengalami kesulitan. Hutang-hutang luar negeri beberapa kong-lomerat-konglomerat besar yang diambil alih pemerintah baru-baru ini, seperti ini misalnya, telah menambah beban hutang luar negeri negara".⁴⁷

Keseluruhan proses ekonomi ini jelas menunjukkan suatu bentuk dialiktika hubungan ekonomi yang bersifat eksploitatif. Struktur masyarakat akhirnya terdiri atas sekelompok kecil penduduk yang berpendapatan tinggi dan massa rakyat miskin dan tertindas. Tertindas bukan hanya dalam pengertian ekonomi, bahkan dalam pengertian politik. Aspirasi rakyat untuk meningkatkan posisi ekonomi mereka dihadang oleh belenggu struktural. Proses pembangun yang berciri "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", yang merupakan misi kemerdekaan hanya menjadi impian indah saja (sirna). Partisipasi rakyat diartikan semata-mata dalam bentuk mobilisasi, bukan dalam pengertian yang disebut di atas, yakni sebagai suatu masyarakat yang bebas dan merdeka.

Penguasaan politik yang diperkuat oleh penguasaan ekonomi telah menimbulkan berbagai bentuk perilaku yang sangat tidak terpuji dikalangan elit kekuasaan dan para birokratnya. Nepotisme ekonomi dan nepotisme politik menyatu dengan perilaku korupsi dan kolusi. Tujuan perilaku yang seperti ini adalah untuk memperbesar dan memperkuat masyarakat

⁴⁷ Anwar Nasution, *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia Jakarta, Jakarta, 1987, hal. 17

pemupuk dan penikmat rente ekonomi yang merupakan proses akumulasi yang sangat primitif. Ini adalah status quo yang dihadapi masyarakat di Indonesia sehingga jikalau ini terus berlangsung dan bertambah kukuh, jelas sistem sosial kita menjauhi suatu sistem sosial masyarakat modern. Sungguh tragis, dalam memasuki abad ke-21, budaya ekonomi dan politik atau sistem sosial kita masih merupakan sistem sosial pra-modern.

Sistem sosial semacam inilah yang ingin dihilangkan dari alam Indonesia, sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. Sistem sosial ini harus dihilangkan, karena ini jelas kondusif bagi tumbuhnya negara kekuasaan yang memperlakukan rakyat sebagai "bukan apa-apa". Negara kekuasaan tidak memungkinkan terwujudnya faham kerakyatan dalam sistem ekonomi dan politik. Faham ini mengandung paradigma pendekatan partisipatoris dan emansipatoris berdasarkan kedaulatan rakyat dalam sistem ekonomi dan politik.

Berdasarkan Konstitusi Indonesia, mengenai ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) ini penjabarannya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Salah satu penggalan kalimat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut berbunyi : "Dalam penjelasan pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang".

Berdasarkan penggalan kalimat tersebut maka makna ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dapat dipahami dengan mudah. Ekonomi

kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 33 ayat 1) UUD 1945 tersebut, maka situasi perekonomian seperti itulah yang disebut perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sehubungan dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang perorang, maka reinkarnasi istilah tersebut sulit dipisahkan dengan fenomena kesenjangan ekonomi yang kini mewarnai perekonomian Indonesia. Lebih dari itu, karena dalam kesenjangan ekonomi tersebut peranan para konglomerat yang berkolusi dengan para birokrat cenderung sangat dominan, maka reinkarnasi gagasan ekonomi kerakyatan itu jelas sulit dipisahkan dari reaksi terhadap dominasi ekonomi konglomerat yang ditopang oleh ekonomi birokrat tersebut.

Konglomerat dan birokrat memang merupakan dua kelompok masyarakat yang saat ini menentukan merah birunya perekonomian Indonesia. Merekalah yang paling berperan dalam menentukan kegiatan produksi, mereka pula yang paling banyak menikmati hasil-hasilnya, sementara segala kegiatan yang mereka lakukan sangat sulit dikendalikan

oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas diungkapkan juga oleh Drs.

Revrison Baswir, MBA yang menyatakan bahwa :

Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan masyarakat sulit membedakan mana yang konglomerat dan mana yang birokrat, seperti siapa yang lebih berkuasa diantara keduanya. Sebagaimana dapat disaksikan dalam perbincangan mengenai kapitalisme birokrat atau bisnis anak pejabat, para konglomerat dan birokrat itu kini cenderung lebur menjadi satu kesatuan.⁴⁸

Arah perkembangan ekonomi yang diamanatkan dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) tidak dapat terjadi dengan sendirinya, artinya kemajuan yang diukur dengan melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Masalah utamanya adalah ketidak seimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru keseimbangan itu dapat makin membesar yang mengakibatkan makin melebarnya jurang kesenjangan. Dalam upaya mengatasi tantangan itu diletakkan strategi pemberdayaan masyarakat.

Dalam memecahkan problematika kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, selain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga perlu ada pembaharuan sosial. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan kebijaksanaan ekonomi dan sosial harus seimbang dan terpadu. Dalam dasawarsa ini, tingkat pertumbuhan yang tinggi tetap diyakini akan dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan sosial seperti penanggulangan

⁴⁸ Revrison Baswir, *Op-cit*, hal. 5

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Namun pertumbuhan ekonomi saja disadari tidak cukup, karena harus didukung pula oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, keseimbangan pembangunan antara daerah, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Selain itu, adapula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotong royongan, dan bagi bangsa Indonesia kebhinekaan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap dan himpitan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam rangka pikiran tersebut di atas, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah.

Sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pemanfaatan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu.

Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund For Agriculture Development (IFAD)* menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula. Hal ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.⁴⁹

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang

⁴⁹ Ginanjar Kartasasmita, Op. cit, hal.143.

diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus yang menikmati, begitupula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Oleh sebab itu berbagai input seperti prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pemanfaatan haruslah ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal dan mengarahkan, menganjurkan dan membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak pengusaha yang lebih kuat melalui kemitraan.

Dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural (*structural adjusment* atau *struktural transformation*) seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas. Oleh karena itu dapat dilakukan dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal di atas, seperti yang diungkapkan oleh DR. Gunawan Sumodiningrat M. Ec., yang menyatakan bahwa :

Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam upaya ini pilihan kebijakan dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.⁵⁰

⁵⁰ Gunawan, Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal.7

Sehubungan dengan hal di atas, untuk melakukan perubahan struktural mensyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam upaya ini beberapa langkah strategis harus ditempuh. Diantaranya yang penting adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses kepada aset produksi (productive assets).

Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu kebijakan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sungguh penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi rakyat ini. Pemilikan tanah yang makin mengecil (marginalisasi) harus dicegah.

Persoalan ini tidak mudah, karena menyangkut budaya dan hukum waris. Namun dalam rangka proses modernisasi budaya masyarakat, kebiasaan untuk membagi tanah semakin kecil sebagai warisan harus dihentikan. Untuk dapat melakukan hal itu memang harus ada alternatif, antara lain berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisien (misalnya *mixed farming*), penciptaan lapangan kerja pedesaan diluar pertanian (agroindustri dan industri jasa), program transmigrasi dan lain sebagainya.

Dalam rangka ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas (dan dengan demikian nilai asset) lahan harus ditingkatkan, misalnya dengan pengairan, pemupukan, diversifikasi

usaha tani atau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nilai komersial yang tinggi), contohnya "dengan usaha udang".

2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Lebih jauh lagi dalam operasinya mereka biasanya menghadapi kekuatan usaha besar yang melalui persaingan tidak seimbang akan mengambil keuntungan yang lebih besar.

Akibatnya tidak ada insentif untuk meningkatkan mutu karena keuntungan dari peningkatan mutu justru akan ditarik oleh usaha besar. Oleh karenanya kualitas dan tingkat ketrampilan rendah menjadi karakteristik pula dari ekonomi rakyat.

Keadaan ini harus diperbaiki, untuk itu pertama-tama rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya.

Selain itu rakyat juga harus pula diorganisasikan untuk bersama-sama memasarkan hasil produksinya sehingga sedikit banyak memperkuat posisinya.

Yang tak kalah pentingnya juga pemberian informasi pasar mengenai kecenderungan permintaan dipasar domestik maupun pasar internasional, harga, kualitas, standar dan lain sebagainya sehingga produksi rakyat sejalan dengan permintaan pasar. Ini

tentunya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi ini juga tugas dunia usaha untuk turut membantu.

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat.

Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional.

Proses industrialisasi harus mengarah kepedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat, yang umum-nya adalah agroindustri. Industri pedesaan adalah industri kecil dan sedang yang memanfaatkan sumber daya alam setempat dengan cara yang lestari, memakai tenaga kerja setempat, menggunakan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang ada, dan memperkuat ekonomi rakyat pada umumnya.

Pola industri serupa ini harus ditempuh bersamaan dengan pengembangan industri berteknologi tinggi dan padat modal yang berkembangnya di perkotaan.

5. Kebijaksanaan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.

Dalam rangka itu secara luas harus disediakan pelatihan ketrampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan.

6. Pemerataan pembangunan antar daerah.

Ekonomi rakyat tersebar diseluruh penjuru tanah air. Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat ini, perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk juga berkembang.

7. Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

Pemerataan dan dalam hal ini peningkatan kesempatan untuk berkembang lebih cepat pada ekonomi rakyat, harus ditangani secara tersendiri dan bukan sebagai hasil sampingan. Dengan cara itu diharapkan akan dihasilkan pertumbuhan, bahkan secara makin kukuh dan berkesinambungan.

Hal ini yang sering disebut sebagai paradigma pembangunan baru, yaitu pertumbuhan dengan pemerataan.

Dalam strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan ini, setidaknya ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan :

- pertama : upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang populer disebut keberpihakan. Hal ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya;
- kedua : program itu harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran;
- ketiga : karena keterbatasannya, secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

Berdasarkan hal di atas, maka pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Konsep ini telah dioperasionalkan dalam strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk sekaligus sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang berorientasi kerakyatan, pendekatan konsep pembangunan juga harus bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan manusia yang sesuai harkat dan martabat manusia Indonesia dengan memperhatikan kemampuan dan pengembangan potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian dalam rangka pembangunan yang berorientasi kerakyatan perlu menggali kekuatan-kekuatan yang ada dimasyarakat serta mencermati kelemahan-kelemahan sehingga dapat ditemukan cara-cara atau metode yang paling tepat untuk mengembangkan serta dukungan yang perlu baik aspek teknologi maupun permodalan.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat, tidak berarti akan menghambat upaya mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi pertumbuhan hanya akan berkesinambungan dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat itu sendiri, baik berupa produktivitas rakyat maupun sumber daya yang berkembang melalui penguatan ekonomi rakyat.⁵¹

Proses pembangunan akan sama dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan apabila menurut Dr.Gunawan Sumodiningrat M.Ec ada 3 (tiga) asumsi yang harus dipenuhi, yaitu :

- Pertama, *full employment* atau partisipasi, artinya semua faktor produksi dan faktor ekonomi ikut serta dalam kegiatan ekonomi;
- Kedua, Homogenitas
artinya semua pelaku ekonomi memiliki faktor produksi, kesempatan berusaha dan kemampuan menghasilkan yang sama;

⁵¹ Muhammad Jafar Hafsah, Op. cit, hal.32

- Ketiga, Bekerjanya mekanisme pasar atau efisiensi artinya interaksi antar pelaku ekonomi terjadi dalam suatu keseimbangan (*equilibrium*).⁵²

Asumsi itu bersifat normatif dan tidak selalu bahkan sulit dipenuhi. Artinya proses pembangunan tidak melibatkan semua pelaku ekonomi, dan peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut tidak dinikmati oleh seluruh penduduk. Secara natural ada sebagian penduduk yang tidak ikut serta dalam menghasilkan, sehingga tidak menikmati hasil pembangunan. Mekanisme pasar tidak berlangsung secara alamiah. Ada kekuatan tunggal, baik dari sisi produksi (monopoli) ataupun dari sisi konsumsi (monopsoni), sehingga distribusi manfaat tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing pelaku ekonomi. Pasar tidak berfungsi secara wajar. Inilah yang sering disebut sebagai kegagalan pasar (*market failures*), yang merupakan masalah dalam pembangunan.

Untuk mengembalikan keseimbangan pasar, perlu campur tangan pihak independen yang memihak si lemah, tetapi tidak mengabaikan yang kuat. Dengan adanya campur tangan tersebut, mekanisme pasar tidak murni lagi. Inilah yang dikenal sebagai sistem ekonomi campuran. Sedangkan dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang bertugas menyempurnakan mekanisme pasar. Pemerintah bertugas mengarahkan proses pembangunan melalui 3 (tiga) bidang utama, antara lain

⁵² Gunawan Sumodiningrat, Op. cit , hal. 25

terciptanya iklim usaha yang menggairahkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana dasar, serta pengembangan sumber daya manusia. Ekonomi campuran ini di Indonesia dikenal dengan istilah "ekonomi pasar terkelola".

Selanjutnya menurut Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec mengatakan bahwa dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat ini, maka pilihan kebijakan dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis, yaitu :⁵³

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi;
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar;
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang;
6. Pemerataan pembangunan antar daerah.
7. Perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk juga berkembang.
8. Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

Melihat pilihan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa langkah strategis tersebut di atas, maka sebenarnya mengenai akses produksi yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat.

⁵³ Gunawan Sumodiningrat, *Ibid*, hal.7-9.

Sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.

Secara teoritis, modal usaha yang diperlukan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produksi harus berasal dari kemampuan sendiri. Modal tersebut harus dihimpun dari tabungan yang diperoleh dari surplus pendapatan, setelah dikurangi untuk konsumsi jangka pendek. Tabungan yang dikumpulkan kemudian ditingkatkan menjadi investasi dan digunakan sebagai pembentukan modal. Dengan modal inilah produksi (kegiatan ekonomi) akan semakin meningkat.

Selanjutnya, usaha produksi tersebut akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan pembentukan modal yang bersumber dari kemampuan sendiri. Namun yang menjadi masalah bagi penduduk miskin mereka yang tidak mampu menciptakan tabungan adalah keterbatasan modal usaha pada permulaan siklus kegiatan ekonomi. Masalah ini diharapkan dapat dipecahkan dengan suntikan dana sebagai stimulan.

Selain itu upaya yang tidak kalah pentingnya adalah melalui memperkuat posisi dan kemitraan usaha. Dalam memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi ini adalah dengan pendekatan kebersamaan. Dengan membangun kesetiakawanan dan rasa kesamaan, akan menimbulkan rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi. Yang perlu dipupuk adalah peningkatan kesadaran, kemauan dan

tanggungjawab bahwa kemenangan dalam pergulatan perdagangan bebas ini tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan.

Sedangkan industri rakyat yang akan berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat, harus menjadi tulang punggung industri nasional. Proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro industri. Dalam proses ini harus dihindari pengusuran ekonomi rakyat dengan perluasan industri berskala besar yang mengambil lahan subur, merusak lingkungan, menguras sumber daya, dan mendatangkan tenaga kerja dari luar.

Telah dipaparkan di atas, pendapat yang mengatakan bahwa dengan pertumbuhan secara otomatis akan dihasilkan pemerataan, secara empiris ternyata tidak terbukti. Memang pendekatan pertumbuhan tidak mungkin sama sekali ditinggalkan. Tetapi cara menghasilkannya tidak harus dengan memusatkan investasi pada sektor-sektor tertentu, usaha-usaha tertentu, kawasan-kawasan tertentu atau sikap diskriminasi yaitu pemerintah memberi fasilitas hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Cara ini terbukti tidak efektif untuk pemerataan pendapatan. Pemerataan dalam hal ini peningkatan kesempatan ekonomi rakyat untuk berkembang lebih cepat, harus ditangani secara tersendiri, dan bukan sebagai hasil sampingan. Dengan cara tersebut, pembangunan diharapkan akan lebih kukuh dan berkesinambungan. Inilah yang sering disebut sebagai paradigma pembangunan baru, yaitu pertumbuhan dengan pemerataan.

D. Konsepsi Kemitraan Sebagai Solusi Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan di Indonesia yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tiga dasa warsa, telah menunjukkan adanya hasil yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Aktivitas dan keberhasilan pembangunan tersebut disisi lain juga membawa dampak pada terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Kesenjangan ini merupakan eksek dari pembangunan ekonomi yang lebih bertumpu pada mengejar pertumbuhan yang tinggi, dan kurang memperhatikan aspek pemerataan. Kondisi ini sering menjadi pemicu timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan.

Perbincangan mengenai kemitraan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dorongan untuk mengembangkan kemitraan itu adalah untuk mempersiapkan usaha kecil dalam menghadapi era perdagangan bebas, namun pengembangan gagasan tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari masalah kesenjangan usaha akhir-akhir ini melanda perekonomian Indonesia. Disatu pihak usaha-usaha besar terlanjur berkembang menjadi usaha raksasa, sedangkan usaha-usaha kecil cenderung jalan ditempat, sehingga makin jauh tertinggal.

Dalam hal ini yang menjadi persoalan, selain pelaksanaan program kemitraan bukan sesuatu yang mudah, efektifitas program itu juga sangat tergantung pada faktor-faktor struktural yang selama ini menyebabkan memburuknya kesenjangan usaha di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kesenjangan usaha yang terjadi selama ini tidak hanya disebabkan oleh

kondisi keterbelakangan usaha kecil. Selain itu merupakan sebab kondisi keterbelakangan itu juga merupakan skibat dari adanya kekuatan-kekuatan struktural yang memang cenderung menghambat berkembangnya usaha kecil secara sehat.

Sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi atau mempersempit terjadinya kesenjangan tersebut, ditempuh melalui pengembangan kemitraan usaha antara pengusaha besar (kuat) dengan pengusaha kecil (lemah). Kemitraan ini diharapkan dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi regional (wilayah). Keberhasilan pelaksanaan kemitraan yang besar dengan yang kecil, dimana terjadi pemberdayaan yang kecil/lemah, merupakan wujud nyata dari pengamalan ekonomi kerakyatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 seperti yang telah dikemukakan di atas.

Era globalisasi menuntut persaingan antar bangsa, para pelaku ekonomi, bahkan sosial politik yang makin tajam. Untuk itu kata kunci untuk memenangkan persaingan adalah efisiensi yang ditakar dari kemampuan bangsa-bangsa itu maupun pelaku ekonominya untuk dapat memenangkan persaingan secara efektif. Untuk itulah maka strategi usaha sudah dijalin melalui aliansi ataupun kemitraan strategis. Dalam konteks global, aliansi ini identik dengan strategi kemitraan bagi pelaku ekonomi antar bangsa-bangsa. Sedangkan aliansi yang berbasis nasional seyogyanya berpola kemitraan antar pelaku ekonomi besar, menengah dan kecil yang berorientasi kerakyatan.

Dalam perspektif inilah maka konsepsi dan strategi kemitraan usaha menjadi sangat relevan.

Sudah tidak saatnya lagi untuk menguasai satu usaha secara vertikal dan horisontal mulai dari hulu sampai ke hilir dengan alasan demi tercapainya efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Hal ini bukan hanya tidak etis tetapi juga memperluas kesenjangan pelaku ekonomi. Untuk menjembatannya maka diperlukan suatu aturan main dan *political will* dari semua pihak yang saling terkait untuk memperbesar kelompok lapis tengah pengusaha sehingga terjadi suatu kemitraan usaha yang saling bersinergi antara semua pelaku ekonomi.

Kemitraan yang ingin dicapai/diwujudkan dengan misi utamanya adalah membantu memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antara wilayah, ketimpangan kota dan desa. Kemitraan yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggungjawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut.

Gejala umum munculnya usaha besar dan menengah di Indonesia berawal dari fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan dan berbagai fasilitas kemudahan ini diberikan merupakan keputusan politik pemerintah pada masa lalu yang sekarang terbukti kurang menguntungkan kondisi perekonomian secara nasional. Fasilitas kemudahan yang diberikan

tersebut menyebabkan tumbuhnya usaha besar yang tidak efisien, kurang produktif dan tidak mampu bersaing di pasar internasional.

Terjadinya turbulensi ekonomi sangat mempengaruhi *performance* dan eksistensi usaha besar di Indonesia. Hal ini terbukti banyak usaha besar yang kurang siap menghadapi berbagai badai ekonomi tersebut sehingga banyak yang gulung tikar.⁵⁴ Namun demikian masih banyak dijumpai usaha besar dan menengah yang tetap bertahan terutama usaha besar dan menengah yang tumbuh berkembang dari bawah tanpa atau sangat sedikit menerima berbagai fasilitas kemudahan dari penguasa. Umumnya usaha besar dan menengah tersebut lebih banyak mengandalkan pada dukungan sumber daya manusia yang profesional, manajemen dan teknologi modern sehingga mampu menghasilkan produk yang lebih efisien dan lebih kompetitif di era persaingan bebas.

Berbeda dengan usaha besar dan menengah, usaha kecil dan koperasi tampaknya lebih mampu bertahan terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi bahkan menjadi tumpuan harapan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Usaha kecil dan koperasi yang terbukti tangguh terutama pada usaha kecil dan koperasi yang berorientasi pada ekspor dan menggunakan bahan baku dalam negeri.

Pengertian Kemitraan itu sendiri menurut Dr, Muhammad Jafar Hafsah yaitu :

⁵⁴ Muhammad Jafar Hafsah, Op. cit, hal. 35

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepa-tuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.⁵⁵

Dari pengertian di atas, maka pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Sedangkan pengertian dari kemitraan menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dimaksud :

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan batasan pengertian kemitraan tersebut di atas, maka dapat dimengerti bahwa para pelaku ekonomi yang melakukan kerjasama kemitraan tetap terikat dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian, maka bagi pengusaha menengah maupun pengusaha besar yang melakukan kemitraan

⁵⁵ Muhammad Jafar Hafsah, Ibid, hal. 43

dengan usaha kecil tidak boleh menganggapnya sebagai objek atau bahkan sebagai "parasit" dan diperlakukan semena-mena dalam menjalankan usahanya, begitu juga bagi usaha kecil yang bernitira dengan usaha menengah maupun usaha besar tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang dimiliki pengusaha besar atau menengah sehingga justru pengusaha menengah atau pengusaha besar merasa diganggu dalam usahanya. Tetapi diharapkan dengan pola kemitraan ini baik pengusaha kecil (juga petani perorangan /kelompok) maupun pengusaha menengah atau besar mempunyai kedudukan yang seimbang dan dalam usahanya sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan demi kemajuan usaha yang dilakukannya.

Senada dengan pengertian tersebut di atas, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997, yang dimaksud dengan :

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut di atas; untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Diharapkan dengan terwujudnya

kemitraan yang kokoh, terutama antara usaha Besar dan Usaha Menengah dengan usaha kecil, akan lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi perekonomian serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.

Usaha besar dan menengah diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha kepada usaha kecil. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) usaha kecil, sehingga menjadi lebih profesional. Disamping itu peran usaha besar dan menengah diharapkan dapat membantu permodalan yang dibutuhkan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

Kalau dicermati, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil masing-masing mempunyai keunggulan atau kekuatan tersendiri, sekalipun keterbatasan usaha kecil relatif lebih banyak, namun kalau kedua kekuatan ini dipadu dalam bentuk kemitraan usaha maka akan terbentuk sinergi baru, dengan kekuatan dahsyat berupa kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Sebenarnya, kemitraan juga dapat terjadi karena adanya kepentingan bersama yang menjadi kekuatan-kekuatan faktor pendorong terwujudnya

kerjasama kemitraan. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan pendorong terlaksananya kemitraan tersebut menurut Ian Linton, yaitu :⁵⁶

- Meningkatnya persaingan dalam dunia perdagangan;
- Harapan pelanggan lebih tinggi;
- Penekanan pada biaya-biaya;
- Perubahan teknologi yang cepat;
- Persaingan dalam pasar-pasar yang lebih luas;
- Kebutuhan akan pengembangan produk baru yang cepat;
- Kekurangan-kekurangan keahlian;
- Pengenalan proses-proses bisnis baru;
- Memusatkan perhatian pada keahlian inti.

Sedangkan menurut Drs.Revrison Baswir,MBA mengemukakan bahwa ada beberapa ciri keterbelakangan atau kelemahan yang dimiliki oleh usaha kecil. Kelemahan-kelemahan atau ciri-ciri keterbelakangan tersebut secara garis besarnya yaitu :⁵⁷

- a. Lebih dari separuh didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan;
- b. Selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha;
- c. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank;
- d. Hampir 60% masih mempergunakan teknologi tradisional;
- e. Hampir separuh hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60 %;
- f. Pangsa pasar cenderung menurun;
- g. Hampir 70 % melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; dan
- h. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.

Walaupun demikian, yang perlu diketahui bahwa kondisi keterbelakangan usaha kecil itu tidak dapat dituduh sebagai penyebab

⁵⁶ Ian Linton, (Alih Bahasa : Sularno Ciptowardojo) *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Pener bit Halirang, Jakarta, 1997, hal. 18

⁵⁷ Revrison Baswir, Op. cit hal.55

memburuknya kesenjangan usaha di Indonesia. Menuduh kondisi keterbelakangan itu sebagai penyebab tertinggalnya usaha kecil, sama saja dengan menuduh kemiskinan sebagai penyebab miskinnya orang miskin. Dengan kata lain, selain merupakan sebab, kondisi keterbelakangan itu juga merupakan akibat dari adanya kekuatan struktural yang cenderung menggilas usaha-usaha ekonomi rakyat tersebut. Oleh karena itu, maka untuk menghadapi dan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia sekarang ini diperlukan usaha kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha menengah dengan pengusaha kecil.

Filosofi hakiki dari kemitraan adalah kebersamaan dan pemerataan. Dengan demikian kemitraan akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan belum teratasi. Dilain pihak kemitraan adalah suatu proses jangka panjang yang berubah secara dinamis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari seluruh pelaku kemitraan. Melalui kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan menengah dengan perusahaan kecil dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung resiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin distribusi pemasaran. Dari kerjasama tersebut diharapkan dapat menciptakan kemitraan yang saling mendukung dalam proses perubahan struktur ekonomi nasional.

Melihat kenyataan tersebut di atas, sangatlah dimaklumi betapa pentingnya kemitraan usaha ditanam tumbuhkan antara pelaku ekonomi golongan usaha besar, menengah dengan golongan usaha kecil. Selain alasan

tersebut di atas, adapula dugaan bahwa terdapat masalah dalam tatanan dan iklim usaha di Indonesia sehingga dipandang perlu untuk mengatasinya dengan upaya-upaya yang strategis. Dasar pertimbangannya adalah pandangan bahwa ada kepincangan dalam mesin perekonomian yang menyebabkan perekonomian tidak berfungsi secara optimal. Seperti kepinangan pada semua jenis mesin, kepincangan pada mesin perekonomian menyebabkan mesin tidak berjalan mulus, tidak efisien, sering tersendat-sendat, dan boros dalam penggunaan sumber daya.

Keadaan itu tercermin antara lain dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kalau tumbuh sedikit tinggi saja menyebabkan laju inflasi meningkat. Negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga yang mesin perekonomiannya lebih efisien mencatat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, tanpa banyak terganggu oleh laju inflasi.⁵⁸ Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut mampu menghasilkan tingkat pendapatan nyata yang lebih tinggi, dan merangsang gerak perekonomian selanjutnya. Mesin perekonomian Indonesia yang pincang itu juga menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang menimbulkan rasa ketidakadilan.

Keseluruhannya itu terjadi justru dalam dunia yang makin ketat persaingannya, yang menuntut ketahanan dan efisiensi yang lebih tinggi. Proses globalisasi menuju ekonomi dunia yang makin menyatu, menuntut mesin perekonomian berjalan dengan serasi, dan dengan demikian berdaya

⁵⁸ Ginanjar Kartasmita, Op. cit. hal. 185.

saing tinggi. Globalisasi selain membuka peluang yang besar, juga merupakan tantangan terutama bagi sektor ekonomi yang tertinggal dalam proses modernisasi karena dapat mengakibatkan ketertinggalan yang makin jauh, yang berarti kesenjangan yang makin melebar.

Usaha memecahkan masalah ini menuntut perhatian dan konsentrasi upaya yang besar. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan kemitraan usaha. Kemitraan dilakukan diantara para pelaku ekonomi itu sendiri. Namun peran pemerintah tidak dapat diabaikan, bahkan sangat menentukan. Dalam hubungan ini maka tinjauan khusus mengenai peran birokrasi dalam pengembangan kemitraan dirasa perlu untuk dilakukan. Dari uraian di atas, diharapkan dapat tertangkap pesan betapa besarnya manfaat kemitraan bagi perkembangan dunia usaha dan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Kemitraan adalah sebuah konsep bisnis yang menjanjikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait. Disadari bahwa usaha ke arah itu tidaklah mudah, dan memerlukan upaya sungguh-sungguh, terutama prakarsa yang datang dari dunia usaha itu sendiri. Namun demikian, sebelum melembaga dalam masyarakat bisnis dan berkembang menjadi budaya bisnis, pemerintah bersama birokrasinya harus berperan, bahkan perannya itu menentukan. Peran tersebut haruslah tepat bentuk dan kadarnya, agar kemitraan dapat berkembang secara sehat dan efektif.

Makna kemitraan itu sendiri sebenarnya dalam UUD 1945 terutama dalam Pasal 33 ayat (1) telah disebutkan dengan jelas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kata

"disusun" dalam pasal tersebut mengisyaratkan perlunya peran aktif pemerintah dalam menjabarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam amanat tersebut ke dalam nilai-nilai normatif praktis yang sesuai. 6

Salah satu instrumen untuk mewujudkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah kemitraan usaha. Kemitraan, terutama dalam dunia usaha menurut Prof. DR. Ginanjar Kartasasmita adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum game*, tetapi *positive-sum game* atau *win-win situation*.⁵⁹ Dengan perkataan lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama antar usaha yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Setiap pelaku usaha, memiliki potensi, kemampuan dan keistimewaan sendiri, walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat dan tempat usahanya. Setiap pelaku usaha juga memiliki kelebihan dan kelemahan / kekurangannya. Didalam kelebihan dan kekurangan tersebut timbul keperluan kerjasama dan kemitraan. Kemitraan bukan sebuah konsep baru. Dalam dunia usaha bisnis internasional sudah lama dikenal dan dipraktikkan, dengan berbagai nama, seperti *strategic alliance*. Dalam dunia yang makin sarat dengan persaingan, justru kerjasama dan kemitraan menjadi makin marak dalam praktik bisnis.

⁵⁹ Ginanjar Kartasasmita, Ibid, hal. 189.

Banyak pengamat menunjukkan betapa kecenderungan didunia usaha sekarang bukan kepada membangun usaha yang makin besar, tetapi kepada unit-unit usaha yang kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar juga akan terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, tetapi atas peluang-peluang kecil (*smaller market niches*). Dengan demikian maka pola yang akan terjadi bukan penguasaan vertikal atau horizontal, seperti gejala umum pada dasawarsa-dasawarsa terakhir abad kedua puluh ini, tetapi adalah kerja sama atau dalam konsep kemitraan.

Peranan pengusaha kecil dinegara maju sangat besar dalam perekonomian negara mereka. Menurut Naisbitt menyatakan bahwa 50 % ekspor Amerika Serikat dilakukan oleh perusahaan dengan pekerja kurang dari 20 orang. Hanya 7 % ekspor Amerika Serikat dilakukan oleh perusahaan yang jumlah pekerjanya di atas 500 orang; 90 % ekonomi Amerika Serikat dikuasai oleh usaha kecil dan menengah (tentunya menurut ukuran mereka). Hal yang serupa juga terjadi di Jerman dan Jepang serta negara-negara lain yang ekonomi-nya kuat.⁶⁰ Dengan demikian bahwa dalam ekonomi Indonesia, sebagian besar adalah usaha kecil, sebenarnya tidak perlu menjadi masalah, asalkan usaha kecil itu kuat kedudukan persaingannya.

⁶⁰ John Naisbitt, (alih bahasa : Budijanto), *Global Paradox; Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Besar Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994

Kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing. Tujuannya adalah untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh, saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha besar, melalui ikatan-ikatan kerja sama kedepan dan kebelakang. Kemitraan meliputi bidang produksi, distribusi dan permodalan. Kemitraan tidak boleh diartikan sebagai penguasaan yang satu atas yang lain. Kemitraan harus menjamin kemandirian masing-masing pihak. Dengan pola yang demikian, maka prakarsa dan daya kreasi akan berkembang, karena kemitraan tidak menghilangkan persaingan. Dalam suasana persaingan yang sehat, kemitraan justru akan tumbuh lebih subur.

Kemitraan mendukung efisiensi ekonomi karena pihak-pihak yang bermitra masing-masing menawarkan sisi-sisi unggulnya. Melalui kemitraan kita dapat menghindarkan diri dari kecenderungan monopoli. Monopoli menyebabkan distorsi dalam pasar, sedangkan kemitraan memperkuat mekanisme pasar, dengan sekaligus menghindari persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan. Dengan demikian, hakikat kemitraan tidak sama, bahkan berlawanan dengan sifat kartel atau kerjasama lain untuk menguasai pasar, yang menjurus ke arah monopoli dan oligopoli, atau monop-soni dan oligopsoni.

Kemakmuran yang meningkat juga telah melahirkan kelas konsumen yang berpendapatan cukup tinggi (*affluent*) dan tidak mau begitu saja membeli barang yang seragam yang dihasilkan oleh metode produksi massal model lama (*mass production*). Kebutuhan mereka makin terspesialisasi, dan

harus dipenuhi dengan skala produksi yang kecil tetapi efisien. Upaya ini dapat dicapai melalui kemitraan antara usaha yang satu dan usaha yang lain.

Dapat dimaklumi apabila terdapat keraguan diantara sementara pihak yang beranggapan bahwa program kemitraan adalah program *belas kasihan*, yang lebih merupakan kewajiban sosial dari pada kepentingan ekonomi, yang cenderung mengarah kepada inefisiensi, dan karenanya tidak akan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan. Dalam kenyataannya memang ada program kemitraan yang gagal karena pendekatannya yang keliru. Namun tidak sedikit program kemitraan yang berhasil. Program kemitraan (*sub contracting*) yaitu usaha kecil menghasilkan komponen yang dibutuhkan usaha besar mitra usahanya, merupakan salah satu contoh pola kemitraan dengan model keterkaitan kebelakang yang telah terbukti keampuannya dalam menumbuh kembangkan usaha kecil di berbagai negara maju dan negara industri baru.

Syarat bagi keberhasilan kemitraan usaha adalah adanya imbalan remunerasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu untuk dapat berhasil, program kemitraan, disamping saling menguntungkan juga harus adil dan dinamis. Adil dalam arti kemitraannya tidak bias kepada salah satu pihak, misalnya yang kuat, tetapi harus sesuai dengan sumbangan masing-masing pihak dalam bermitra. Dinamis dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa berkembang sehingga efektifitas, produktifitas, dan kualitas usaha kemitraan senantiasa berkembang pula.

Pengembangan kemitraan ini memerlukan waktu dan menuntut kesabaran, keterbukaan, kearifan dan ketekunan dari semua pihak. namun keberhasilannya mempunyai dampak yang tidak kecil karena bukan saja menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi secara lebih luas akan besar dampaknya pada pembentukan tatanan dan pengembangan iklim dunia usaha yang kuat, sehat dan bergairah.

Dalam upaya mengembangkan dunia usaha yang demikian, menurut Prof. DR. Ginanjar Kartasasmita terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan, yaitu:⁶¹

- * *pertama* : yaitu kemitraan antarskala usaha.
Khususnya kemitraan antara pengusaha atau industri besar dan pengusaha atau industri kecil serta menengah, termasuk disini hubungan antara BUMN, Swasta dan Koperasi.
- * *kedua* : ialah kemitraan usaha antar daerah atau antar kawasan.
Hal ini mendorong meningkatnya kemitraan antar- skala usaha saja tidak cukup. Terutama Indonesia, karena potensinya yang begitu luas untuk pening-katan perekonomian, maka kemitraan antara daerah atau antar kawasan juga menjadi penting untuk diperhatikan.
- * *ketiga* : ialah kemitraan usaha antar sektor.
Pada saat ini sektor industri dan jasa tumbuh dengan pesat, sementara sektor pertanian tertinggal pertumbuhannya. Kemitraan antar sektor ini tercermin antara lain dalam pengembangan agro industri dan agro bisnis. Dengan kemitraan antar sektor, keuntungan komparatif berdasarkan potensi masing-masing sektor dapat dioptimalkan dan kegiatan ekonomi dapat terwujud dalam suatu rangkaian kegiatan yang terpadu.
- * *keempat* : ialah kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek. Ini merupakan aspek yang amat penting dalam program kemitraan. Pelatihan sumber daya manusia dan bantuan teknologi bagi mitra akan meningkatkan efektifitas dan keuntungan yang akan diperoleh dari kerja sama kemitraan.

⁶¹ Ginanjar Kartasasmita, Op-cit, hal. 192-193.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam era globalisasi dimana mekanisme pasar menjadi acuan semua pelaku ekonomi, maka kata kunci yang menjadi indikator keunggulan adalah produktivitas. Secara umum produktivitas diidentifikasi dalam model ekonomi sebagai *output* dibagi dengan input. Dengan kata lain produktivitas akan meningkat apabila dengan input yang sama dapat diperoleh hasil yang tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan input yang lebih rendah.⁶²

Berpijak dari teori di atas dikaitkan dengan pendekatan kemitraan, maka peningkatan produktivitas diharapkan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bermitra. Bagi perusahaan yang lebih besar, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, pertama tingkat produksi (*output*) yang diharapkan dapat dicapai dengan mengurangi faktor input, misalnya target penjualan dapat dicapai dengan pengurangan tenaga kerja lapangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan menerapkan model pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) dimana kegiatan pemasaran dilapangan dilakukan oleh pemasar lepas atau perusahaan mandiri. Disektor pertanian model ini dilaksanakan dalam pola PIR dimana perusahaan besar dapat mengoperasikan kapasitas pabriknya secara *full capacity*, tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut datanggung oleh petani plasma peserta program PIR.

⁶² Muhammad Jafar Hafsa, Op. cit, 54.

Cara lain yaitu peningkatan produktivitas bagi perusahaan besar dilakukan dengan cara meningkatkan produksi (*output*) dengan menggunakan sumber daya sendiri yang sama / tetap baik jumlah maupun kualitasnya. Contoh ini dapat diambil dari model usaha Waralaba, dimana perusahaan induk (pemilik nama) dapat meningkatkan pangsa pasarnya tanpa harus membiayai sendiri pembukaan cabang-cabang barunya.

Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar yang kuat dikelasnya dengan pengusaha kecil yang kuat dibidangnya yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

Oleh sebab itu sebelum bermitra perlu adanya kesiapan pihak yang akan bermitra, terutama pada pihak pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ipteknya rendah agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. Pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pementapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan dapat berjalan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya. Menurut teori Interaksi Simbolik struktur sosial dari masing-masing mitra merupakan hasil interaksi manusia dan tindakan manusia saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota

kelompok, dimana sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, sehingga melahirkan aturan sosial di dalam kemitraan tersebut. Kegagalan yang terjadi pada kemitraan usaha sering disebabkan oleh karena pondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari rasa belas kasihan semata atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Walaupun kemitraan dilaksanakan berdasarkan kemauan kedua belah pihak namun jika kurang didasari oleh etika bisnis, maka kemitraan tersebut rapuh dan menyebabkan kemitraan tidak dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini menjadi kedudukan usaha kecil dipihak yang lemah dan usaha menengah dan besar sangat dominan dan cenderung mengeksploitasi yang kecil. Disamping itu lemahnya manajemen dan penguasaan teknologi yang disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki usaha kecil sering menjadi faktor kegagalan kemitraan usaha.

Batasan kemitraan usaha yang dipublikasikan dalam berbagai tulisan adalah hubungan bisnis usaha yang melibatkan satu atau sekelompok orang/badan hukum dengan satu atau sekelompok atau beberapa kelompok orang/badan hukum dimana masing-masing pihak memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan yang dilandasi saling menguntungkan, saling memerlukan dan saling melaksanakan etika bisnis.

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan tersebut dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat/kondisi dan tujuan usaha yang

dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Pembinaan kemitraan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang berlaku di suatu wilayah. Oleh karena itu dukungan kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan ditunjang operasionalisasi yang baik seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerjasama kemitraan dan secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Kontrak kerjasama ini bukan hanya berupa *Memorandum of Understanding* namun kontrak kerjasama sudah memuat perjanjian waktu, harga, dan jumlah produksi, yang dibarengi dengan sanksi yang ditetapkan apabila salah satu pihak melanggar atau merugikan pihak lain. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilakukan/dilaksanakan, dapat terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1. Pola Inti Plasma

Dari beberapa bentuk tulisan yang telah dipublikasikan dan juga seperti yang telah dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan di lingkup pertanian maupun perikanan maka Pola Inti Plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara Kelompok Mitra Usaha sebagai Plasma dengan Perusahaan Inti yang bermitra. Salah satu contoh kemitraan ini adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana Perusahaan Inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Disamping itu Perusahaan Inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan.

Sedangkan Kelompok Mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sehingga hasil yang diciptakan harus mempunyai daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi.

Didaerah Propinsi Lampung, yang melakukan kerjasama kemitraan jenis Pola Inti Plasma tersebut di atas, salah satunya adalah Masyarakat Kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung (yang berjumlah sebanyak 9.032 orang/kepala keluarga) sebagai Plasma dengan PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti. Dalam kerjasama kemitraan ini yang menjadi usahanya adalah dibidang Budi Daya Udang Windu, dimana hasil / produk dari kerjasama kemitraan ini dijual / dipasarkan diluar negeri (dieksport). Hanya saja sekarang ini kerjasam tersebut mengalami masalah yang cukup serius antara Plasma dan Perusahaan Inti sehingga belum dapat beroperasi secara maksimal lagi serta sampai sekarang masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara damai walaupun telah ditempuh dengan beberapa cara dan di berbagai instansi pemerintah antara lain dimusyawarahkan di Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang, di DPRD Tingkat I Lampung (Muspida Tingkat I Lampung), KOMNAS HAM bahkan sampai ke Wakil Presiden Republik Indonesia dan terakhir ini sudah di tangan Presiden Republik Indonesia. Hal ini terjadi tentunya ada ketidak harmonisan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung dalam hal ini sebagai Plasma dengan

PT> Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan.

Ada anggapan yang selama ini melekat dengan keberadaan Pola Inti Plasma adalah bahwa kondisi petani yang masih terhimpit oleh masalah-masalah ekonomi sehingga kehidupannya tak kunjung membaik. Untuk menghilangkan kesan negatif tersebut maka perlu lebih mensosialisasikan hak dan kewajiban plasma dan inti kepada masyarakat luas serta menyusun aturan yang memihak kepada plasma untuk lebih memberdayakan plasma yang sebagian besar adalah petani yang tingkat kesejahteraannya kurang baik. Contoh aturan yang memihak pada plasma adalah diberlakukannya *option* dalam bentuk saham kepemilikan dari perusahaan inti.

Sebagai dasar pedoman, aturan pelaksanaan kerjasama kemitraan jenis Pola Inti Plasma tersebut dapat dijumpai dalam :

- a. UU Nomor: 9 Tahun 1995, Kepmentan No.334/ Kpts./IK.210/6/1986, tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat;
- b. Kepmentan No.509/Kpts./IK.120/7/95 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- d. Kepmentan No. 940/Kpts./OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

- e. Kepmentan No. 944/Kpts./OT.210/10/97 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian;
- f. Kepditjenkan No. 1251/Kpts./KL. 420/II/98 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola PIR;
- g. Bahkan di Lampung sendiri telah dikeluarkan peraturan khusus Kemitraan dalam bidang usaha Perikanan didalamnya juga mengatur tentang usaha Budi Daya Udang, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Kerjasama Kemitraan Usaha Budidaya Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Setiap kebijakan atau sistem yang diterapkan dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam, maka tentu saja memiliki keuntungan-keuntungan atau keunggulan-keunggulan. Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma ini menurut Muhammad Jafar Hafsah, antara lain:⁶³

- a. Kemitraan inti plasma memberi manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran;
- b. Dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan;
- c. Beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/menengah mampu memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi;

⁶³ Muhammad Jafar Hafsah, Ibid, hal. 69.

- d. Pengusaha besar/menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun internasional;
- e. Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun asing;
- f. Dengan tumbuhnya kemitraan inti plasma akan tumbuh pula pusat-pusat ekonomi baru sehingga sekaligus merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Disamping hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaannya dilapangan perlu memperhatikan beberapa hal antara lain :

- a. Kemitraan inti plasma dalam kondisi awal adalah merupakan proses sehingga memerlukan waktu, perhatian dan upaya terus menerus serta kesabaran hingga betul-betul menjadi pola kemitraan yang berhasil dan saling menguntungkan;
- b. Kemitraan inti plasma akan dapat berhasil baik apabila jenis kegiatan usaha dari pengusaha besar/menengah adalah sama dan terkait erat dengan apa yang dihasilkan oleh usaha kecil yang dibimbing;
- c. Kemitraan inti plasma baru berjalan dan berhasil apabila telah tercapai pada skala ekonomi tertentu; dan
- d. Dalam kemitraan inti plasma harus dibuat perjanjian antara perusahaan inti dengan plasma yang merinci secara jelas kewajiban dan tugas-tugas masing-masing pihak yang bermitra.

Untuk selanjutnya menurut Muhammad Jafar Hafsah, ada beberapa masalah yang dihadapi dan menjadi kendala di lapangan dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan inti plasma, yaitu : ⁶⁴

- a. Karena yang bermitra adalah perusahaan besar dan petani yang tergabung dalam kelompok atau koperasi, organisasi petani disini belum *solid*, belum dapat mewakili aspirasi dan kepentingan anggotanya;
- b. petani belum memahami hak dan kewajibannya dengan baik;
- c. Perusahaan mitra sebagai inti belum sepenuhnya memberikan perhatian dalam memenuhi fungsi dan kewajiban seperti apa yang diharapkan; dan
- d. Belum adanya kontrak kemitraan yang benar-benar menjamin hak dan kewajiban dari komoditi yang dimitrakan.

Oleh sebab itu dengan diketahuinya beberapa kendala dalam melakukan kemitraan jenis ini, diharapkan kendala tersebut dapat diantisipasi oleh para pihak yang akan melakukan kerjasama kemitraan.

2. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Kemitraan subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat

⁶⁴ Muhammad Jafar Hafsah, Ibid, 70.

mendo-rong terciptanya alih teknologi, modal dan ketrampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

Ada beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pola kemitraan jenis subkontrak ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Erna Ermawati Chotim pada tahun 1994 menunjukkan bahwa :⁶⁵

"hubungan subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi".

Oleh sebab itu pembinaan terhadap pelaksanaan kemitraan dengan jenis pola subkontrak ini sangat dibutuhkan, baik oleh pemerintah yang memberikan pembinaan secara berkelanjutan melalui penerapan kebijaksanaan yang tegas dan tindakan yang konkret secara konsisten di dalam pelaksanaan kemitraan tersebut, dalam rangka melindungi pengusaha kecil terhadap penyimpangan dari pelaksanaan hubungan kemitraan tersebut.

Dukungan dari pihak perusahaan mitra usaha senantiasa menjalin dan menumbuhkan hubungan kemitraan atas asas saling membutuhkan dan saling percaya, sehingga tercipta suatu iklim yang kondusif dalam pengembangan usahanya.

⁶⁵ Erna Ermawati Chotim, Subkontrak dan Aplikasinya terhadap Pekerja Perempuan, Kasus Industri Kecil Batik Pekalongan, Penerbit Akatiga, Pusat Analisis Sosial, Bandung, 1994.

Komponen yang sangat berperan dalam pelaksanaan pola kemitraan ini adalah sumber daya manusia dan permodalan bagi pengusaha kecil. Sumber daya manusia yang terampil dalam penguasaan teknologi produksi yang dihasilkan sangat mendorong terhadap pelaksanaan kemitraan secara berkelanjutan dan didukung oleh pendanaan biaya produksi yang memadai serta manajemen yang baik. Demikian pula sangat diperlukan organisasi dari pengusaha kecil, paling tidak kelompok yang mempunyai posisi tawar dengan mitra usaha, agar dapat menetapkan harga, volume dan waktu yang lebih proporsional kearah *win-win solution*.

3. Pola Dagang Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997, Pola Dagang Umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Berdasarkan batasan pengertian tersebut, maka pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang lebih kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil. Hal ini disebabkan membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Lembaga penunjang dalam mendukung pembiayaan kegiatan ini sangat mendukung proses pelaksanaan sistem kemitraan pola dagang umum ini.

Keuntungan dalam pola kemitraan ini yaitu adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun kelemahannya, selain membutuhkan modal yang besar dari pengusaha kecil untuk memproduksi, juga umumnya sifat dari pelaksanaan kemitraan jenis ini ditentukan oleh pengusaha besar dalam bentuk konsinyasi, sehingga pembayaran barang-barang perusahaan kecil tertunda. Kondisi ini sangat merugikan perputaran uang pengusaha kecil yang terbatas dalam permodalan.

4. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha besar atau usaha menengah sebagai perusahaan mitra usaha bertanggung jawab terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan, sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra diberi kewajiban untuk memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi atau fee yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan usaha menengah. Oleh karena itu peranan agen agar dapat memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling

memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran, karena dalam pemasaran tidak cukup dengan pengetahuan saja akan tetapi diperlukan kepaiawaian dalam mencari nasabah dan pelanggan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Agen akan berhubungan langsung dengan konsumen, berarti keberhasilan para agen sebagai usaha kecil juga merupakan keberhasilan usaha menengah dan usaha kecil.

5. Waralaba

Pola waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Oleh karena itu perusahaan mitra usaha sebagai pemilik waralaba, bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran, merek dagang, dan hal-hal lainnya, kepada mitra usahanya sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. Sedangkan pemegang usaha waralaba, hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba serta memberikan sebagian dari pendapatnya berupa royalty dan biaya lainnya yang terkait dari kegiatan usaha tersebut.

Menurut Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, pada dasarnya menyatakan bahwa kelebihan dari pola waralaba ini antara lain adalah perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keuntungan tersebut dapat berupa adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Disamping itu pola waralaba ini dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas. Sedangkan kelemahannya adalah apabila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.⁶⁶

Selain hal di atas, sebaliknya perusahaan pewaralaba tidak mampu secara bebas mengontrol atau mengendalikan perusahaan terwaralaba terutama dalam hal jumlah penjualan. Salah satu keberhasilan usaha waralaba adalah adanya konsistensi mutu atas produk yang diberikan kepada masyarakat dan pelayanan yang baik serta apabila dapat diterima khalayak ramai, maka akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen yang tidak mempunyai banyak waktu dan cenderung tidak mencoba produk baru yang tidak diketahuinya.

Waralaba ini salah satu gejala dampak dari globalisasi dimana dicirikan dengan makanan yang diproduksi dari negara maju, masih melanda negara berkembang dan waralaba ini masih banyak sekali bergerak pada bisnis boga atau makanan seperti *Mc Donald*, *Kentucky*, *Texas*, *Dunkin' Donuts*, *Hoka-Hoka Bento*, *Coca Cola*, dan masih ada

⁶⁶ Mohammad Jafar Hafsah, Op-cit, 78

yang lainnya.⁶⁷ Yang menarik disini, jenis makanannya biasa-biasa saja, tidak banyak berbeda dengan makanan tradisional, namun dapat menyedot banyak pembeli, sehingga dibeberapa tempat menggeser restoran dan warung tradisional dengan jenis makanan yang sama. Ini berarti bahwa usaha waralaba, terutama makanan memberi dampak negatif terhadap warung dan restoran serupa, begitu pula pada umumnya menggunakan bahan baku impor untuk menjamin standar yang telah ditetapkan perusahaan pewaralaba.

Dalam era globalisasi ini, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana perusahaan waralaba lokal dapat berkembang, diperlukan upaya konkret berupa teknologi, kewirausahaan dan standar serta pembinaan dan penyediaan dana yang cukup, hingga sekarang ini investor masih terbatas menanam modalnya pada waralaba lokal. salah satu masalah adalah belum adanya standar baku yang seragam mulai dari bahan mentah sampai bentuk produk akhir yang menjadi patokan bagi para investor.

Selain itu juga peran pemerintah seyogyanya lebih aktif lagi dalam memacu pertumbuhan waralaba lokal. Peran yang sangat berarti sekali bagi investor adalah perlindungan atau jaminan hak paten dari produk yang akan dikembangkan, sehingga ada kepastian hukum untuk merek dagang yang dihasilkan.

⁶⁷ Mohammad Jafar Hafsah, Op-cit, 79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan bahwa penentuan sampel menggunakan prinsip "bola salju" (*Snowballs*), maka data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan informan (responden) yang terpilih. Khusus untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Di Daerah Tingkat II Tulang Bawang Propinsi Lampung (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Pada PT. Dipasena Citra Darmaja dan Plasma), maka penentuan informan (responden) dilakukan terhadap Pimpinan atau pegawai/karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja yang mempunyai kewenangan dan mengetahui pelaksanaan dan permasalahan terhadap Perjanjian Kerjasama (Kemitraan) yang dilakukan dengan Plasma. Pada masing-masing Pimpinan atau Pegawai PT. Dipasena tersebut telah dilakukan wawancara dengan 5 (lima) informan (responden) sebagai berikut :

1. Agus Ismail Munawar (Humas PT. Dipasena Citra Darmaja);
2. Abadi B. Darmo, SH dan Naspudin, SH (Penasihat Hukum/Kuasa Hukum PT. Dipasena Citra Darmaja);
3. Christopher Lim dan Harijanto (Yang mewakili Pimpinan PT. Dipasena Citra Darmaja;

Disamping Pimpinan dan Pegawai/Karyawan PT. Dipasena yang ditunjuk tersebut di atas, telah dilakukan wawancara dengan beberapa Plasma yang

tergabung dalam Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Dipasena Citra Darmaja (PPPUW DCD) dan Penasihat Hukum/Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Abdu Syukur (Ketua Umum PPPUW) PT. D.C.D;
2. Ahmad Zamhari (Ketua I PPPUW) PT. D.C.D;
3. Nana Sumpena (Ketua II PPPUW) PT. D.C.D;
4. Ikhwan (Sekretaris I PPPUW) PT. D.C.D;
5. Erwan Santoso (Sekretaris II PPPUW PT. D.C.D;
6. Waras (Biro Budidaya Udang Windu PPPUW PT. D.C.D;
7. Nurmizan, Firdaus, Jauhari, Husin, Sadri, Sumarno, Sugiono, Syamsudin, Saragih, Asdar, Afrizal (Kesemuanya merupakan Plasma dan menjadi Pengurus Sub Blok);
8. Syaiful Alam, SH dan Dwi Pujo Prayitno, SH, M.Si.(Selaku Kuasa Hukum/Penasihat Hukum PPPUW/Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja.

Selain Kuasa Hukum/Penasihat Hukum, Pengurus PPPUW maupun Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja, untuk mengetahui lebih jauh Permasalahan, Cara /Usaha yang dilakukan serta peran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam Melaksanakan Perjanjian Kemitraan Usaha Tambak Udang Windu antara PT. Dipasena Citra Darmaja (sebagai Perusahaan Inti) dan Plasma, juga telah diwawancarai Pegawai dari Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, Yaitu :

1. Drs. Firdaus Agustian (Ketua Bappeda Tk.II Tulang Bawang);
2. Drs. Husnia Hannan (Ass.II Sekwilda Tk.II Tulang Bawang);
3. Ir. M. Agustinus Sinaga (Kepala Dinas Perikanan Tk.II Tulang Bawang);

4. Ir. Helmi Machmud (Kepala Dinas Perikanan Tk.I Lampung);
5. Isgiyanti, BSc. (Ka.Sub.Din. Perikanan Tk.I Lampung) sekaligus selaku Ketua Tim Mediasi;
6. Chairullah Gultom, BIE (Ass.II Sekwilda Tk. I Lampung;
7. Mochtar Hasan, SH (Wakil Ketua I DPRD Tk. I Lampung);
8. Syahrial Alamsyah, SH (Anggota DPRD Tk. I Lampung);
9. Drs. Teddy Junaidi (Karo. Perekonomian Tk. I Lampung);
10. Drs. Hi. Syarifudin Efendi, SH (Ketua BKPMMD Tingkat I Lampung).

Berdasarkan perolehan data, baik data yang bersifat kepustakaan, dokumen maupun lapangan, maka dalam uraian berikut akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian dan analisa datanya. Bahasan yang akan dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggambarkan jawaban permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

A. Tinjauan Umum PT. Dipasena Citra Darmaja

1. Sejarah Berdirinya PT. Dipasena Citra Darmaja

PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 174 tanggal 23 Oktober 1987 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Nomor : C.2-3224.HT.01.01 TH'88 tanggal 9 April 1988. Hadir sebagai sentra industri baru dipesisir timur Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Kegiatannya dibidang Agribisnis ini berintikan budidaya

perairan (aqua culture) dengan komoditas Udang Windu berpola Inti - Plasma dengan keterpaduan sistem produksi dalam satu Kawasan Pertambakan Terpadu meliputi antara lain : pembudidayaan tambak, penyediaan pakan udang, pengolahan pasca panen di sentra pengolahan udang (Processing and Cold Storage Plantation), hingga menjadi produk berkualitas Internasional yang siap ekspor.

Tahapan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Dipasena Citra Darmaja untuk melaksanakan kegiatannya meliputi :

- a. Tahap Perizinan;
- b. Tahap Pembebasan Tanah;
- c. Tahap Pembukaan Tanah serta Pembukaan Tambak; dan
- d. Pembangunan Sarana Penunjang, antara lain : perumahan, kawasan sosial serta kawasan industri.

Rincian pelaksanaan setiap tahapan kegiatan itu adalah:

Ad. a. Tahap Perizinan

Dalam rangka memperoleh tanah untuk suatu kegiatan pembangunan, dalam hal ini tambak udang Inti Rakyat Terpadu diperlukan surat pencadangan tanah atau Surat Keputusan Izin Lokasi. Adapun surat pencadangan tanah dan Keputusan Izin Lokasi dimaksud adalah :

1. Surat Pencadangan Tanah untuk pengembangan tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja dari Ketua BKPMMD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 594/542/I/BKPMMD/1988 Tanggal 11 April 1988 luas areal dicadangkan 12.500 Ha, dengan lokasi di

Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang).

2. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 228/I/PMDN/88 tanggal 19 April 1988. Didalam Surat Persetujuan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan dapat mengusahakan tambak udang tanpa pola Tambak Inti Rakyat (TIR) seluas 100 hektar. Penambahan areal di atas 100 Ha harus menggunakan Pola TIR dengan perbandingan 60 % untuk Inti dan 40% untuk Plasma (petambak), dan tatacara pelaksanaannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 334/KPTS/IIK.210/ 6/1986 tanggal 4 Juni 1986.
3. Surat Keputusan Izin Lokasi tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 14/IL /PMDN/ 1988 tanggal 28-5-1988. Luas areal \pm 12.500 Ha dengan lokasi Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang).
4. Surat Keputusan Izin Lokasi tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 20/IL/ PMDN/ 1988 tanggal 30-12-1988 tentang Perubahan Luas Areal Izin Lokasi dari \pm 12.500 Ha menjadi

16.250 Ha (setelah diadakan pengukuran secara Kadesteral oleh Direktorat Agraria Propinsi Lampung).

Ad. b. Tahap Pembebasan Tanah

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 14/IL/PMDN/1988 tanggal 28 Mei 1988 PT. Dipasena Citra Darmaja diwajibkan menyelesaikan pembebasan tanah/ganti rugi dengan pemilik tanah sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 jo Nomor : 2 Tahun 1976 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1984.

Menimbang pada waktu itu penggunaan tanah pada lokasi yang dimohon merupakan hutan rawa yang tidak ada penduduknya serta lebih dari 10 tahun secara terus menerus tidak diusahakan, maka oleh Pemerintah Daerah lokasi tersebut dianggap Tanah Negara.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka PT. Dipasena Citra Darmaja tidak pernah melaksanakan pembebasan/mengganti rugi tanah seluas \pm 16.250 Ha. Pelaksanaan Proses kepemilikan tanah dilaksanakan, melalui beberapa tahapan, yaitu :

- 1). Tahap sertipikasi tanah pada areal tambak plasma dan telah terbit sertipikat Hak Milik atas nama petani tambak (Plasma) sebanyak 9032 Kepala Keluarga, seluas + 5.267,5061 Ha (hektar).
- 2). Tahap sertipikasi tanah infrastruktur, kawa san industri, perumahan pola BTN dan perumahan Tata Kota sampai saat ini

telah terbit sertipikat HGB (Hak Guna Bangunan) seluas : 720,60 Ha.

3). Tahap sertipikasinyang belum dilaksanakan dan direncanakan akan diproses Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) adalah :

- a). Saluran inlet (tanah + saluran);
- b). Sub-Sub saluran inlet/out let;
- c). Kanal primer;
- d). Infra Blok (0 - XVI);
- e). Sebagian tanah diwilayah tata kota;
- f). Tambak Inti.

Ad. c. Proses Pembukaan Lahan dan Pembuatan Tambak

Komitmen PT. Dipasena Citra Darmaja dalam mencetak tambak selalu mempertimbangkan pada kelestairan lingkungannya demi kelangsungan budidaya udang windu, dimana sangat bergantung pada daya dukung kualitas perairan yang bersih.

Sejak tahapan pioneering pada pertengahan tahun 1988 hingga akhir tahun 1997 telah mencetak 18.064 unit tambak yang tersebar di 15 Blok (Blok 0 sampai dengan Blok XV = Plasma) dan 1 Blok (Blok XVI = Inti).

Blok 0 s/d Blok XV (Plasma) seluas = 5.267,5061 Ha telah terbit sertipikat Hak Milik untuk Petani tambak diperuntukan 9032 Kepala Keluarga petani tambak (Plasma).

Blok XVI seluas + 2560 Ha merupakan tambak Inti beserta fasilitas dikelola oleh PT. Dipasena Citra Darmaja, merupakan tambak untuk penelitian budidaya Tambak Udang, areal tersebut yang akan dimintakan Hak Guna Usahanya.

Ad. d. Pembangunan Perumahan, Fasilitas Sosial serta Kawasan Industri.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengembangan budidaya Tambak Udang yang telah dilaksanakan pembangunannya adalah :

- 1). Perumahan para Karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja;
- 2). Rumah-rumah petani tambak (Plasma);
- 3). Sarana pendidikan (T.K, S.D, S.L.T.P serta S.M.K Perikanan);
- 4). Fasilitas kesehatan (poliklinik), Fasilitas sosial (masjid, gereja, pura) dan fasilitas perdagangan (pasar, pertokoan, koperasi);
- 5). Pembangunan kawasan industri (pabrik pakan udang, cold stroge, pembangkit tenaga listrik tenaga disel yang mampu menghasilkan daya 54 megawatt).
- 6). Pembangunan sarana dan prasarana lainnya (jalan, pusat kegiatan olah raga, dermaga serta infrastruktur kota).

2. Kegiatan PT. Dipasena Citra Darmaja

Dipilihnya wilayah Pantai Timur Kabupaten Tulang Bawang (Eks. Kabupaten Lampung Utara) Propinsi Lampung yang jaraknya kurang lebih 300 KM dari Kota Bandar Lampung dengan jarak tempuh rata-rata 7 s/d 8 jam dengan melalui jalan darat dan sungai sebagai lokasi Proyek Pengembangan Kawasan

Tambak dan Pemukiman petani udang terpadu, pertimbangannya antara lain :

- a. Letaknya sangat cocok untuk mendapatkan suplai air laut bagi kebutuhan sekitar 18.064 unit tambak, disamping itu kondisi lahan dan ekosistem sangat menunjang bagi berkembang biaknya habitat udang;
- b. Propinsi Lampung telah berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan pembangunan di Pulau Sumatera Bagian Selatan dan telah memiliki jaringan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional;
- c. Lokasi kegiatan sebelumnya belum dimanfaatkan berupa tanah gambut/hutan rawa (swampy areas) yang tidak produktif, pengembangan kegiatan tambak diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi usaha pengembangan wilayah sekitarnya. Luas areal keseluruhan yang akan dikembangkan dalam rangka proyek kawasan tambak dan pemukiman petani udang (Plasma) adalah sekitar 16.250 Ha, telah direncanakan (lay out) alokasi pemanfaatan tanahnya sebagai berikut :

- Kawasan Tambak seluas kurang lebih 6.250 Ha.

Pada areal plasma dibangun tambak-tambak untuk pembesaran (grow-out roud) berbentuk petak-petak tambak berukuran 40x50 m yang telah digali kemudian dilapis dengan plastik lining agar kepadatan permukaan tambak dapat bertahan sesuai sifat tanah gambut yang sangat labil;

- Kawasan Prasarana Sosial seluas kurang lebih 600 Hektare.
Dibangun berbagai fasilitas dan prasarana sosial bagi para penghuni disana (yaitu plasma dan karyawan perusahaan beserta keluarganya) yang meliputi sarana seperti jaringan jalan, pasar/pertokoan, sekolah, poliklinik, pusat rekreasi/olah raga dan sebagainya;
- Kawasan Produksi dan Pergudangan seluas kurang lebih 150 Hektare.
Dibangun beberapa unit perakitan / manufactur, perbengkelan, kantor serta gudang;
- Kawasan Penghijauan/green belt seluas kurang lebih 3750 Hektare.
Disediakan jalur hijau diantara setiap Blok tambak plasma untuk menampung air hujan. Sedangkan green belt setebal kurang lebih 200 s/d 500 meter dari garis pantai/sungai memanjang ditepi pantai timur, tepi sungai/Way Tulang Bawang dan tepi sungai/Way Mesuji;
- Selebihnya seluas kurang lebih 5.000 Ha merupakan lahan tambak
Inti berikut sarana pendukungnya.

Lokasi PT. Dipasena Citra Darmaja yang mempunyai areal seluas kurang lebih 16.250 Ha, yang terletak di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Eks. Kabupaten Lampung Utara), Propinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Way Mesuji (Propinsi Sumatera Selatan);
- Sebelah Timur berbatasan dengan langsung dengan laut Jawa;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Tulang Bawang dan Kawasan tambak Udang PT. Central Pertiwi Bratasena (Bahari);
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Transmigrasi lokal Rawajitu dengan penggunaan tanah areal persawahan dan pemukiman.

Sedangkan Pola penggunaan tanah yang telah terbentuk saat ini (pada waktu dilakukan penelitian dilapangan) meliputi : kawasan tambak plasma, kawasan tambak inti dan sarana pendukungnya; kawasan tata kota dan kawasan industri, dan areal Research and Development.

a. Kawasan Tambak Plasma

Kawasan tambak plasma merupakan suatu hamparan tambak yang akrab lingkungan dengan petak-petak tambak yang terletak pada Blok I sampai dengan Blok XV. Pada masing-masing tambak terdapat bangunan rumah petani tambak (plasma) dengan pekarangan untuk memudahkan mengelola tambaknya.

Dalam setiap 2 (dua) Blok tambak plasma terdapat infrastruktur blok yang dilengkapi dengan T.K, S.D, perkantoran, gudang, kantin, poliklinik, perumahan, tempat peribadatan, balai desa, lapangan olah raga dan prasarana lainnya.

Untuk memudahkan administrasi kemasyarakatan, kawasan tambak plasma yang terdiri dalam 15 (lima belas) Blok (Blok 1 sampai dengan Blok XV), dibagi dalam 7 (tujuh) Desa yaitu :

1. Desa Dipasena Utama (Blok 0 s/d Blok III);
2. Desa Dipasena Agung (Blok IV s/d Blok V);

3. Desa Dipasena Jaya (Blok VI s/d Blok VII);
4. Desa Dipasena Mulia (Blok VIII s/d Blok IX);
5. Desa Dipasena Makmur (Blok X s/d XI);
6. Desa Dipasena Sejahtera (Blok XII s/d Blok XIII);
7. Desa Dipasena Abadi (Blok XIV s/d Blok XV).

Konstruksi kanal-kanal pemasukan air laut (inlet - kanal) dibuat sedemikian rupa, sehingga memiliki fungsi maksimal sebagai sumber irigasi yang juga difungsikan sebagai tandon (reservoir) untuk supplay air tambak. Kanal pengeluaran (out let canal) setelah air terpakai ditambak, dibangun sebagai saluran pembuangan sekaligus sebagai sarana transportasi air. Demi keseimbangan ekosistem, diseluruh kanal out let ini ditanami benih ikan nila. Selain sebagai indikator ekosistem juga layak untuk dikonsumsi oleh petani tambak (plasma) maupun warga PT. Dipasena Citra Darmaja.

b. Kawasan Tambak Inti dan sarana Pendukungnya

Pada kawasan tambak Inti (Blok XVI) seluas kurang lebih 250 Ha, pemanfaatannya adalah sebagai tambak yang dikelola oleh Karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja diperuntukkan sebagai tambak / kolam penelitian. Petak-petak tambak berbeda ukurannya dengan petak tambak yang berada di tambak Plasma.

Tabel 1 : Luas tambak pada Blok XVI (Tambak Inti) adalah :

TIPE TAMBAK	LUAS (Ha)	JUMLAH PETAK	TOTAL LUAS (Ha)
A	0,26	30	7,8
B	0,50	28	14,0
C	1,00	123	123,0
D	2,00	8	16,0
Jumlah		189	160,8

Sumber : PT. Dipasena Citra Darmaja

Penggunaan lain pada Blok XVI (Tambak Inti) selain petak tambak seluas kurang lebih 89,2 Ha merupakan :

- Kantor, gudang, perumahan;
- Jaringan jalan;
- Kanal leter S, inlet dan out let;
- Reservoar, tempat pembuangan lumpur;
- Pompa air beserta jaringan saluran air.

c. Kawasan Tata Kota dan Kawasan Industri

Kegiatan PT. Dipasena Citra Darmaja dalam membuka kawasan hutan rawa (kawasan tidur) menjadi kawasan produktif membutuhkan sarana pendukung dan fasilitas sosial kemasyarakatan, yaitu :

- Kawasan Prasarana Sosial (kurang lebih 600 Ha).

Dibangun sebagai fasilitas dan prasarana sosial bagi petani tambak (plasma) dan seluruh karyawan beserta keluarganya yang meliputi : jaringan jalan, perumahan, perkantoran, pasar/pertokoan, sekolah,

poliklinik, tempat beribadat, pusat rekreasi/olah raga, dermaga dan lain sebagainya.

- Kawasan produksi dan pergudangan (+ 150 Hektare).

Dibangun beberapa unit pengolahan dan produksi seperti unit cold stroge, unit perakitan/manufactur perbengkelan, kantor serta gudang.

- Dalam kawasan tata kota terdapat lahan kosong yang sudah diperuntukan, tetapi belum dibangun sebab pembangunannya dialihkan untuk pembangunan diareal PT. Wahyuni Mandira.
- Adanya lahan yang penggunaan tanahnya masih merupakan tanaman prumpung, gelam, memang dipertahankan untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Penguasaan tanah pada kawasan tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja seluas kurang lebih 16.250 Ha, yang meliputi :

- a. Kawasan tambak plasma (Blok 1 s/d Blok XV);

Pada kawasan tambak plasma ini status penguasaan tanahnya meliputi:

- Tambak Plasma sebanyak 18.064 unit ditempati oleh sebanyak 9032 Kepala Keluarga, dan telah terbit sertipikat Hak Milik atas nama Plasma seluas kurang lebih 5.267,5061 Ha;
- Infra struktur telah terbit sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), seluas 245,30 Ha.

Yang belum memperoleh sertipukat HGU dan HGB pada kawasan ini antara lain :

- saluran inlet (tanah dan saluran);
- sub-sub saluran (canal) inlet/outlet;
- canal primer (main canal); dan
- infra struktur (Blok 0 - I).

b. Kawasan tambak Inti (Blok XVI) dan areal Research and Development;

Pada kawasan ini seluas kurang lebih 250 Ha yang meliputi petak-petak tambak seluas kurang lebih 160,8 Ha dan sarana pendukungnya yang terdiri dari kantor, perumahan, jalan, reservoir, saluran/canal seluas kurang lebih 89,2 Ha dan belum memperoleh sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

Areal Research and Development terletak diujung sebelah Barat Blok V dan Blok VI, seluas kurang lebih 2 Ha yang merupakan areal yang digunakan untuk laboratorium, perumahan dan tambak inti.

c. Kawasan perumahan, tata kota dan kawasan industri;

Pada kawasan ini telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan, yang meliputi :

- perumahan pola Bank Tabungan Negara (BTN), seluas kurang lebih 105,30 Ha;
- perumahan tata kota seluas kurang lebih 220,90 Ha;
- kawasan industri seluas kurang lebih 149,10 Ha;

- masih ada sebagian wilayah tata kota yang belum diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan.
- d. Kawasan green belt dan kawasan inti beserta sarana pendukungnya.

Pada kawasan ini terdiri dari :

- Kawasan green belt, seluas kurang lebih 3750 Ha oleh PT. Dipasena Citra Darmaja, demi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan kawasan pertambakan dimohonkan sertipikat HGU karena sampai sekarang belum bersertipikat;
- Kawasan inti dan saran pendukungnya seluas kurang lebih 5000 Ha oleh PT. Dipasena Citra Darmaja juga sedang dimohonkan sertipikat HGU dan HGBnya, karena sampai sekarang juga belum bersertipikat. Kawasan ini merupakan sisa areal yang telah diberikan / diterbitkan sertipikat Hak Milik atas nama Plasma dan HGB (tata kota dan infra struktur), dimana penggunaan tanahnya tetap dipertahankan seperti sekarang ini guna melestarikan ekosistem dan lingkungan.

PT. Dipasena Citra Darmaja dalam membuka lahan hutan rawa (lahan tidur) mulai tahun 1988 menjadi kawasan produktif, pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan, yaitu antara lain :

Tabel 2 : Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

NO.	PELAKSANAAN KEGIATAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
		1988-1989	1990-1992	1993-1996
		(1 Th)	(2 Th)	(3 Th)
1.	Pencetakan	2.500	10.000	5.564
	Tambak	Unit	Unit	Unit
2.	Pembangunan prasarana fisik (infra struktur :			
	- jalan	Terbatas	Perluasan	
	- perumahan	Terbatas	Perluasan	Perluasan
	- sarana penunjang	Terbatas	Perluasan	Perluasan
3.	Perakitan/produksi	Import	sebagian	Perluasan
	Mesin dan		diproduksi	Produksi
	Peralatan		sendiri	sendiri

Sumber : PT. Dipasena Citra Darmaja

Sebelum tahap pertama dilaksanakan, tahap pioneering (perintisan) yang dimulai pada pertengahan tahun 1988 merupakan tahapan uji coba dengan luas lahan kurang lebih 150 Ha yang terletak pada ujung bagian selatan dari pada lokasi proyek PT. Dipasena Citra Darmaja.

Pelaksanaan tahap pioneering ini ternyata gagal, disebabkan karena abrasi dan tingkat pelumpuran pada lokasi tersebut sangat tinggi.

Kemudian dilakukan ujicoba berikutnya kearah utara dengan sistem pembuatan petak-petak tambak sebanyak 2500 unit dengan dilapis plasticlining agar permukaan air tambak dapat dipertahankan, penggunaan plastic lining ini dengan pertimbangan bahwa sifat tanah gambut yang sangat labil.

Keberhasilan pelaksanaan pada tahap I ini dikemudian dilanjutkan pada tahap II dan Tahap III.

Tabel 3 : Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan PT. Dipasena Citra Darmaja sampai saat ini (Oktober 1999).

NO	JENIS KEGIATAN	RENCANA		PELAKSANAAN	
		VOLUME	LUAS (Ha)	VOLUME	LUAS (Ha)
1.	Pecetakan Tambak				
	a. Perintis (Pioneer)	2 Blok	150,00	2 Blok	150,00
	b. Plasma	18.064 unit	5.267,5061	18.064 unit	5.267,5061
	c. Inti	189 unit	160,80	189 unit	160,80
	d. Sub Canal	-	2.736,05	-	2.736,05
	e. Out Let	-	539,99	-	539,99
	f. In Let	-	726,51	-	726,51
2.	Pembangunan Prasarana/				

Infrastruktur					
a. Jalan					
b. Perumahan	17,50 KM	14,00	17,50 KM	14,00	
- Pola BTN					
- Tata kota	-	105,30	-	105,30	
(jaringan	-	5000 Ha	-	5000 Ha	
jalan, pasar/					
pertokoan,					
sekolah,					
klinik, tem-					
pat ibadah,					
dan lain-					
lain.)					
c. Kawasan	7 unit	150,00	7 unit	220,90	
Industri dan					
Pergudangan					
d. Infrastruktur	8 blok	300,00	8 blok	149,10	
Blok.					
- Centra Out	-	459,00	-	245,30	
let					
- Centra In	-	251,68	-	251,68	
let					

Sumber : PT. Dipasena Citra Darmaja

PT. Dipasena Citra Darmaja terletak pada kawasan pantai timur Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan laut Jawa, kawasan pantai ini terletak diantara 2 (dua) muara sungai yaitu sungai Mesuji dan sungai Tulang Bawang. Penggunaan tanah kini (Exsisting) sekitar kawasan pantai berupa hutan rawa dengan jenis tanaman antara lain : nipah, bakau dan api-api setebal 200 s/d 500 meter. Kondisi ini oleh PT. Dipasena Citra Darmaja akan tetap dipertahankan, dijaga dan dilestarikan serta melakukan kegiatan penanaman bakau dengan tujuan :

- mengamankan areal tambak udang dari adanya abrasi serta intrusi air laut.
- memelihara biota laut yang hidup sepanjang kawasan pantai timur pada areal PT. Dipasena Citra Darmaja.
- mencegah masuknya masyarakat melalui pantai untuk melakukan penjarahan di areal tambak.

Pada kawasan sepanjang jalur Way Mesuji yang merupakan areal PT. Dipasena Citra Darmaja penggunaan tanah eksisting sebelah utara merupakan suatu kawasan yang dimanfaatkan untuk pengamanan dari pada areal pertambakan yang berfungsi sebagai green belt (kawasan lindung) disamping berfungsi sebagai jalur suplai air tawar. Demikian juga untuk kawasan sepanjang jalur Way Tulang Bawang disebelah selatan, juga dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keasliannya dan ketebalannya penggunaan tanahnya (setebal 200 s/d 500 meter).

B. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja Dengan Plasma.

Dalam bahasan di atas telah dikemukakan bahwa PT. Dipasena Citra Darmaja memulai usahanya dari tahun 1988, untuk mempersiapkan lahan yang akan dijadikan tempat usaha. Untuk dapat melaksanakan usahanya tersebut, maka PT. Dipasena Citra Darmaja membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin berwiraswasta dalam bidang pertambakan udang windu. Oleh sebab itu, mulai tahun 1989 PT. Dipasena Citra Darmaja mulai menerima anggota masyarakat yang ingin bergabung bersama PT. Dipasena Citra Darmaja untuk mengolah tambak yang telah dipersiapkan dalam rangka memelihara/budidaya udang windu. Penerimaan anggota masyarakat tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1997, tetapi paling banyak penerimaan dilakukan pada tahun 1990 - 1991.

Agar dalam melakukan usaha tersebut mempunyai kedudukan yang jelas baik hak dan kewajiban masing-masing, maka sebelum melakukan usahanya para pihak membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plasma terdiri dari *Perjanjian Induk dan Perjanjian pendukung lainnya* (seperti Surat Kuasa Memasang Hipotik, Perjanjian Kredit Investasi, Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akta Pelepasan Hak dan surat-surat lainnya). Sedangkan judul atau nama untuk Perjanjian Induk tersebut pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 diberi nama *Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. Dipasena Citra Darmaja*. Sedangkan perjanjian yang dibuat tahun 1997 berjudul

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat. Kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama kemitraan usaha pertambakan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yaitu pola pengembangan usaha pertambakan dengan melibatkan PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti yang bekerjasama dengan Petani Plasma, dalam suatu sistem kemitraan usaha pertambakan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan di Desa Bumi Dipasena, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Untuk selanjutnya, dalam perjanjian disebut bahwa PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti sedangkan Petani/Anggota masyarakat yang ikut bergabung tersebut disebut sebagai Plasma.

Sebelum menandatangani Perjanjian, para Plasma dilakukan tes seleksi terlebih dahulu oleh perusahaan inti. Apabila lulus, barulah para calon Plasma dikumpulkan disuatu tempat untuk menandatangani Perjanjian tersebut secara kolektif. Dalam perjanjian tersebut dimuat hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti serta hak dan kewajiban Petani tambak sebagai Plasma. Pada intinya/dasarnya hak dan kewajiban para pihak tersebut antara lain :

1. Kewajiban Perusahaan Inti dan merupakan Hak Plasma, yaitu :

- a). menyediakan sebidang lot lahan tambak di atas tanah yang terdiri dari 2 (dua) lahan tambak (dengan ukuran setiap lot lahan 40x50 M =

2000 M2) lengkap berikut peralatan/perlengkapannya yaitu sebuah rumah tinggal lengkap dengan alat-alat rumah tangga standar;

b). membantu mengusahakan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya fasilitas-fasilitas kredit yaitu :

- Kredit Investasi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), agar petani tambak/Plasma dapat melunasi sisa ganti rugi atas tambak;
- Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk keperluan biaya operasi seperti pembelian bibit/benur, makanan udang, obat-obatan/pupuk, penggantian/pemeliharaan alat-alat produksi dan bahan bakar dan lain-lain;

c). selama Plasma belum memiliki sesuatu hak milik atas tambak dan/atau belum memiliki deposito sebagai jaminan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja, maka Perusahaan Inti bersedia memberikan jaminan perusahaan;

d). menyediakan dan menyelenggarakan sarana, prasarana, fasilitas yang memadai serta menyelenggarakan infra struktur yang penting bagi lot-lot lahan tambak yang diperlukan.

e). menyediakan dan menyelenggarakan Pusat Latihan (Training Center) bagi para Plasma/Petani Tambak berupa pendidikan teori/praktek, memberikan penyuluhan, petunjuk, nasihat dan penerapan teknologi/metode mengenai tata cara pengelolaan budidaya udang yang baik dan benar;

UPT-PUSTAK-UNDIP

- f). inenyediakan tempat pelayanan penyediaan/penjualan bahan baku, natura, peralatan dan suku cadangnya, serta bahan bakar yang diperlukan;
- g). membeli dan menampung seluruh hasil panen dari Para Petani Tambak/Plasma sesuai dengan standar dan harga dasar yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti;
- h). membantu pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perbankan dari para Petani Tambak/ Plasma antara lain pengambilan formulir-formulir, statemen/laporan-laporan bulanan, melakukan pembayaran-pembayaran angsuran kredit dan hutang-hutang lainnya dengan cara mengurangi/mendebit rekening Petani Tambak/Plasma, menyetorkan hasil panen yang diterima langsung kerekening Petani Tambak/Plasma, serta mengurus segala sesuatu berkenaan dengan permohonan fasilitas-fasilitas kredit yang diperlukan untuk kelancaran usaha para Plasma, termasuk pengurusan permohonan Hak Milik atas tanah;
- i). membantu proses permohonan hak milik atas tambak tersebut keatas nama Petani Tambak/Plasma ke kantor Agraria dan instansi lainnya.

2. Kewajiban Plasma dan merupakan Hak Perusahaan Inti, yaitu terdiri dari :

- a). menjual hasil panen hanya kepada Perusahaan Inti;
- b). membeli segala kebutuhan tambak dari unit pelayanan / penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Inti;

- c). mematuhi semua dan setiap peraturan, ketentuan, tata tertib lingkungan/kawasan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Inti maupun peraturan hukum yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d). mendepositokan sebagian penghasilan hasil panen pada Bank/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti;
- e). Plasma/Petani Tambak dilarang menjual/mengoperkan/ mengalihkan dan/atau memindahkan hak milik atas tambak beserta hak pengelolaannya kepada siapapun juga dan dengan cara bagaimanapun juga tanpa seijin tertulis dari Perusahaan Inti selama kewajiban kepada Bank belum dilunasi atau selama Perusahaan Inti masih menjadi penjamin pinjaman Plasma;
- f). membayar jasa pembinaan yang dilakukan oleh Perusahaan Inti;
- g). membayar pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang sah oleh pihak Pemerintah sehubungan dengan usaha Budidaya Tambak yang dilakukan oleh petani Plasma.

Selain hal-hal di atas, guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali kredit yang diterima petani tambak/plasma dari Bank/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit dengan sebagaimana mestinya serta untuk kelancaran pengelolaan tambak secara keseluruhan, maka petani tambak/plasma juga memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dan dengan hak substitusi kepada Perusahaan Inti dan baik bersama-sama maupun secara

masing-masing khususnya untuk bertindak untuk dan atas nama petani tambak/plasma dalam hal-hal :

- a). menyeter hasil panen yang dijual kepada Perusahaan Inti langsung kerekening petani tambak pada Bank/ Lembaga Pemberi Kredit;
- b). mengambil laporan-laporan bulanan, surat menyurat dan administrasi dengan pihak Bank/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit;
- c). melakukan pemotongan langsung dari rekening petani tambak/plasma atas pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar kepada bank/lembaga keuangan pemberi kredit dan/atas hutang-hutang pembelian kebutuhan sehari-hari, biaya operasi satu dan lain hal sebagaimana ternyata dari tanda-tanda bukti tagihan bank dan bukti penerimaan barang (delivery order) yang ditandatangani oleh petani tambak/plasma;
- d). mengikut sertakan atas nama petani tambak sisa/kelebihan hasil panen (bila ada) setelah dikurangi dengan pembagian anggaran kredit, biaya operasi dan biaya hidup sehari-hari.

Untuk selanjutnya, ada hal-hal yang juga dimuat dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu :

- a. selama Petani Tambak/Plasma belum memiliki sesuatu hak atas tambak dan/atau belum memiliki deposito sebagai jaminan kredit investasi dan kredit modal kerja, maka Perusahaan Inti bersedia memberikan jaminan perusahaan;

- b. pada saat penandatanganan Akta Pelepasan Hak dan kepentingan dari Perusahaan Inti kepada Plasma, maka Plasma akan memberikan Akta Kuasa Menjual dan Akta Memasang Hipotik kepada bank Penyedia Kredit Program demikian dengan hak substitusi agar setelah sertipikat hak milik atas Plasma tersebut diperoleh maka bank dapat melaksanakan sendiri pemasangan hipotik dan pendaftarannya untuk kepentingan Bank/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit yang bersangkutan;
- c. untuk menjamin lebih jauh atas kredit investasi dan kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit, maka Plasma berjanji akan memberikan jaminan tambahan berupa deposito atas setiap kelebihan hasil panen yang diterima dari Perusahaan inti setelah dikurangi dengan angsuran kredit, biaya operasi dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. segera setelah Plasma dapat memenuhi sendiri jaminan / agunan atas fasilitas kredit yang diterimanya maka Perusahaan Inti dapat menarik kembali jaminan perusahaan yang diberikannya.
- e. Dalam hal petani tambak meninggal dunia, sakit berkepanjangan, atau menderita kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik sehingga petani tambak/plasma tidak mampu melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian, menurut perjanjian ini diatur bahwa perusahaan inti berhak untuk menentukan dan menunjuk salah seorang ahli waris yang dianggap mampu dan berbobot untuk menggantikan kedudukan pewaris.

Melihat dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Petani Tambak sebagai Plasma dan PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai Perusahaan Inti, ada hal-hal yang sangat mendasar yang tidak dimuat, seperti penentuan harga udang windu hasil dari produksi para Plasma, batas akhir perjanjian yang tidak jelas. Selain itu juga pada saat penandatanganan perjanjian tidak dibacakan terlebih dahulu dan cara penandatanganannya bersifat kolektif. Hal ini tidak memungkinkan untuk para Plasma membaca isi perjanjian selain karena tergesa-gesa juga disebabkan yang ditandatangani oleh para Plasma sangat banyak. Sebenarnya dilihat dari aturan normatif dalam perjanjian yang ada memang standar perjanjian baku telah terpenuhi, seperti yang dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu :

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶⁸ Lahirnya

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1995.

perjanjian baku di latar belakang karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan yang lebih besar dalam melakukan/mengadakan kerjasama dengan yang lebih lemah untuk kepentingan mereka tersebut ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (segi ekonomi) lemah, baik karena posisinya, maupun karena kaidah tahunnya, hanya menerima apa yang disodorkan. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan inti dengan plasma, maka para plasma dianggap menyetujui syarat-syarat yang ditentukan, dan hanya bersikap menerima kemudian kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Sedangkan klausul dalam perjanjian baku menurut Prof. Dr. Mariam Danis Badruzaman, setelah membedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut :⁶⁹

1. perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

⁶⁹ Mariam Danis Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 50.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Dari klausul perjanjian baku diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengusaha inti dengan plasma termasuk jenis klausul perjanjian baku yang pertama. Dalam perjanjian yang dilakukan plasma dengan perusahaan inti, kedudukan plasma (dari segi ekonomi) sangat lemah. Sementara kedudukan perusahaan inti sangat kuat. Hal ini dapat diketahui bahwa dari proses perjanjian yang bersifat kolektif (plasma) serta jenis perjanjian baku tersebut diterima oleh para plasma pada umumnya dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur (dalam hal ini perusahaan inti dan BDNI) yang posisinya relatif kuat dari plasma;
2. Plasma sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian kerjasama tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhannya para plasma terpaksa menerima perjanjian di maksud;
4. Bentuk dari perjanjian kerjasama adalah tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan perusahaan inti maupun plasma.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut setiap orang mempunyai hak untuk dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, namun di dalam kebebasan tersebut juga terkandung “tanggung jawab”. Dalam suatu perjanjian asas kebebasan berkontrak tersebut juga mengandung tanggung jawab, sehingga diharapkan mampu memelihara keseimbangan dan perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Menurut Prof. Mariam Daus Badrulzaman, SH dapat dimengerti bahwa⁷⁰ : asas kebebasan berkontrak tersebut diatas mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontras sebagai asas diberi sifat, sebagai berikut : asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak/perjanjian akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Hanya saja dalam pembuatan suatu perjanjian yang lain tidak dapat dikesampingkan mengenai asas perjanjian yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini terkandung maksud bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang

⁷⁰ Mariam Daus Badrulzaman, *ibid*, hal, 45.

pada waktu diadakan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁷¹

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, memang pada dasarnya setiap orang boleh saja untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaannya, maupun syarat-syaratnya, dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis. Asas ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari ketentuan diatas dapat dimengerti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontras dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian-perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Sehubungan dengan telah dibuatnya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka akibat dari perjanjian tersebut berlaku sebagai

⁷¹ A. Qirom M., op.cit, hal. 19.

undang-undang bagi para pihak dalam hal ini antara PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai perusahaan inti dan plasma. Dengan demikian timbullah perikatan bagi mereka karena perjanjian. Sebenarnya dalam perjanjian yang paling penting adalah isinya. Keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan pada isi perjanjian. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka salah satu pihak sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya.⁷²

Berkaitan dengan hal diatas, di dalam pasal 1338 KUHPdata tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat penting, yaitu janji itu mengikat, janji itu menimbulkan hutang yang harus dipenuhi. Karena janji saja (yang memenuhi pasal 1320 KUH Pdt) sudah mengikat, maka orang mengatakan bahwa perjanjian menurut KUH Pdt mempunyai sifat atau ciri konsensual. Menurut P Scholdten bahwa orang terikat kepada apa yang dijanjikan sebenarnya merupakan suatu kebutuhan masyarakat, adalah sulit untuk membayangkan suatu kehidupan masyarakat, dimana pihak yang satu tak dapat mengandalkan janjinya kepada yang lain.⁷³

Melihat isi perjanjian kerjasama antara Plasma dan Perusahaan Inti tersebut, memang secara formal telah memenuhi standar perjanjian. Berdasarkan hal diatas dapat dilihat adanya niat kurang baik dari pihak

⁷² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 354.

⁷³ J. Satrio, *ibid*, hal. 359

Perusahaan Inti terhadap Plasma. Hal ini dapat dilihat dari cara penandatanganan Perjanjian Kerjasama serta ada hal-hal lain yang merupakan hak Plasma yang tidak dimuat secara tegas dalam perjanjian. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap perjanjian ini, maka masalah tersebut tidak secara jelas dimuat dalam perjanjian dan termasuk cara mengatasinya/ menyelesaikannya, misalnya ternyata para Plasma tidak mengetahui bahwa dalam Akad Kredit baik yang berupa Kredit Investasi maupun Kredit Modal Kerja adalah berbentuk dollar (Amerika).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini secara yuridis formal perjanjian baku tetap sah dan mengikat para pihak. Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang tertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani. Dapat diduga bahwa setiap orang yang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Walaupun perjanjian baku akan membawa akibat hukum yang mengikat, tetapi hal ini perlu ditertibkan. Dalam perjanjian baku kedudukan kreditur/perusahaan sangat kuat dan masyarakat selaku plasma maupun debitur di pihak yang lemah. Posisi yang kuat membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-haknya dan sedikit kewajibannya. Tentunya buat selanjutnya adalah bagaimana cara melindungi atau memberi perlindungan kepada masyarakat

sebagai pihak yang lemah dalam proses perjanjian. Dalam hal ini yang dapat berperan pembentuk undang-undang, pemerintah, pengadilan, notaris maupun konsultan hukum.

C. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja Dengan Plasma.

Dalam bahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa PT. Dipasena Citra Darmaja merupakan suatu perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan budidaya tambak udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR), dimana PT. Dipasena sebagai Perusahaan Inti dan Petani Tambak sebagai Palsmanya. Hubungan antara Perusahaan Inti dengan Plasma merupakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud adalah didasarkan atas asas kebersamaan kedudukan (kesetaraan), keselarasan dan peningkatan ketrampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 334/KPTS/IK. 210/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 tentang Pengembangan Budidaya udang dengan pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 509/KPTS/IK.120/7/ 1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);

3. Ditindaklanjuti oleh Keputusan Gubernur Nomor : 5 Tahun 1996 tanggal 23 Pebruari 1996 tentang Kerjasama Kemitraan Usaha Budidaya Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 1997 tentang Kemitraan;
5. Keputusan Dirjen Perikanan Nomor 1251/KPTS/KL.420/ III/1998 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Dipasena Citra Darmaja (PPPUW DCD) yang mewakili para plasma, maka terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi ketidak puasan para plasma terhadap perusahaan inti terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Para Plasma berpendapat bahwa pihak perusahaan inti selama mengadakan kerjasama kemitraan tidak melakukan secara transparan terhadap manajemen. Hal ini sebenarnya sudah beberapa kali ditanyakan pada pihak perusahaan inti. Hal yang paling mendasar dan dipermasalahkan para plasma yaitu, mulai dari awal dilakukan perjanjian sampai sekarang sehingga masalah tersebut menjadi menumpuk, yaitu :

1. bahwa pada awal pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara perusahaan inti dengan plasma, para plasma dikumpulkan disuatu tempat dan dilakukan secara kolektif, diburu-buru dengan waktu agar segera menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Para plasma tidak

- sempat membaca serta takut protes karena plasma masih sangat takut tidak mendapatkan pekerjaan;
2. pada saat menandatangani perjanjian akad kredit, para plasma dikondisikan pada tempat yang sangat asing dan pelaksanaannya dilakukan secara kolektif, diburu-buru menyelesaikan penandatanganan setumpuk berkas yang berupa blangko-blangko sehingga tidak diberi kesempatan untuk membaca isi blangko tersebut serta tidak dibacakan oleh Bank maupun perusahaan inti;
 3. Pada saat pembekalan/training, dijelaskan bahwa plasma setelah lunas kreditnya akan mendapatkan lahan tambak dan berikuk rumah dan peralatan budidaya lainnya. Jangka waktu kredit diberitahukan/diinformasikan 8 (delapan) tahun dan apabila belum lunas diberikan kesempatan 2x1 tahun (2 tahun), sehingga paling lama para plasma sudah melunasi kreditnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara plasma dengan perusahaan inti ternyata jangka waktu tersebut tidak disebutkan secara tegas dan jelas.

Setelah perjalanan kerjasama kemitraan tersebut ada yang sudah berlangsung 8 (delapan) tahun bahkan ada yang lebih, ternyata tidak seorangpun dari 9.032 orang plasma yang sudah dapat melunasi kreditnya. Mulai saat itulah para plasma bertanya-tanya dan mulai mempermasalahkan kepada perusahaan inti. Kegiatan para plasma yang ingin mengetahui secara jelas kedudukan dan kepastian tentang hutangnya maupun hak

kepemilikannya tersebut mereka namakan "perjuangan". Perjuangan / kegiatan tersebut dilakukan beberapa kali, yaitu :

1. Perjuangan Tahun 1997

Pada tahun 1997 para plasma mulai menanyakan kepada perusahaan inti mengapa sampai sekarang belum ada diantara plasma yang dapat melunasi hutangnya, sehingga belum mendapatkan haknya untuk memiliki tambaknya. Pihak perusahaan inti menganggap para plasma ikut campur dalam urusan inti, sehingga banyak plasma yang diintimidasi/ditekan dan ditakut-takuti akan di di Putus Hubungan Kerjasamanya (PHKS) dan sebagainya. Hal ini semakin santer dan puncaknya terjadi pada bulan September tahun 1997, terjadi unjuk rasa massal yang berjumlah 9.000 orang plasma di lokasi Bumi Dipasena.

Akan tetapi perjuangan para plasma tersebut tidak membawa hasil, justru berakibat di PHKS nya tokoh Plasma yaitu Sdr. Sucipto Suroso.

2. Perjuangan Tahun 1998

Akibat dari adanya unjuk rasa massal tersebut, maka para plasma yang lain ditekan dengan ditakut-takuti oleh pihak perusahaan inti. Semakin lama para plasma semakin tidak tahan, akhirnya terjadi pengumpulan massa lagi untuk melakukan unjuk rasa yaitu pada bulan Agustus tahun 1998. Dari unjuk rasa ini menghasilkan kesepakatan dengan pihak perusahaan inti yaitu yang berupa Surat Kesepakatan

Bersama (SKB) tanggal 3 September 1998, yang isinya antara lain tentang :

- a. bahwa telah disepakati pihak perusahaan inti akan melakukan/ melaksanakan .open manajemen (manajemen terbuka) kepada plasma;
- b. harga udang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan inti dengan pihak plasma yang diwakili oleh forum plasma;
- c. bahwa Organisasi Aspirasi Plasma akan segera diwujudkan;
- d. bahwa permintaan bagi hasil dari nilai jual udang telah disepakati (sebagai pengganti peraturan bonus);
- e. bahwa Biaya Hidup Bulanan Petambak (BHBP) disepakati sejumlah/sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap bulan diluar paket;
- f. Pemutusan Hubungan Kerja Sama (PHKS)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan tetap mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
 - ketentuan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Inti dan Plasma;
 - pola kemitraan yang dilakukan adalah mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian R.I;
 - larangan melakukan mencuri, asusila, perjudian, mabok-mabokan atau madat.

Setelah terjadi kesepakatan tersebut, maka untuk menjaga/mengantisipasi hal-hal dikemudian hari dan untuk mempersatukan para plasma pada tanggal 30 September 1998 di notaris Jenmerdin Bandar Lampung dibentuklah organisasi plasma yang diberi nama PERHIMPUNAN PETAMBAK PLASMA UDANG WINDU DIPASENA CITRA DARMAJA (PPPUW DCD) berdasarkan Akta Notaris Nomor: 34/1998.

3. Perjuangan Tahun 1999

Dari kesepakatan pada bulan September 1998 tersebut di atas, pada mulanya terjalinlah komunikasi yang baik antara perusahaan inti dengan plasma. Namun mulai bulan Januari tahun 1999 setelah Pimpinan PT. Dipasena Citra Darmaja diambil alih oleh Sdr. Samsul Nursalim, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan terhadap isi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 1998 tersebut.

Akibat penyimpangan-penyimpangan terhadap isi Surat Kesepakatan tersebut maka menyulut kemarahan dan kekecewaan para plasma. Tindakan yang dilakukan yang menyebabkan kekecewaan para plasma antara lain menakut-nakuti para plasma, melakukan PHKS secara sepihak, menyampaikan pengaduan kepada pihak-pihak terkait (Kepolisian, Dinas Perikanan).

Melalui PPPUW DCD para plasma melakukan upaya/solusi yang baik untuk mengatasi ketimpangan masalah antara perusahaan inti dan plasma. Oleh sebab itu terjadilah pertemuan dengan mediator pihak

pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan Propinsi Lampung pada pertengahan bulan Maret 1999 di dilanjutkan tanggal 30 Maret 1999 di BKPMD Propinsi Dati I Lampung.

Pada saat terjadi pertemuan tersebut sangat disayangkan pihak perusahaan inti tidak menyambut dengan baik, hal ini terbukti 2 (dua) kali pertemuan dengan mediator pihak pemerintah tidak satupun wakil dari perusahaan inti yang menghadirinya. Pertemuan tersebut tidak membawa kesepakatan dan menyelesaikan masalah, sehingga setelah para pengurus PPPUW DCD yang mewakili para plasma kembali ke Bumi Dipasena, terjadilah PHKS secara paksa dan sepihak dari perusahaan inti terhadap Ketua Umum dan Ketua I PPPUW DCD yaitu Sdr. Sari dan Sdr. A. Zamhari pada tanggal 10 April 1999.

Selanjutnya para Pengurus PPPUW DCD mengatakan bahwa dengan adanya PHKS secara sepihak tersebut pada tanggal 14 April 1999 di BKPMD Bandar Lampung diadakan pertemuan antara perusahaan inti (yang diwakili Komisaris Utama PT. DCD), Dinas Perikanan dan PPPUW DCD yang menghasilkan Surat Dinas Perikanan Nomor : 503/803/523-Btnl/99, perihal Pola Kemitraan Budidaya Tambak Udang tanggal 20 April 1999. Namun Surat Dinas Perikanan inipun oleh Perusahaan Inti dilanggar, terbukti Pjs. Ketua Umum dan Koordinator Infra Bumi Dipasena PPPUW DCD yaitu Sdr. Nana Supena dan Sdr. Nur Mizan di PHKS oleh perusahaan inti. Selain itu juga ada pemaksaan penggantian dari plasma menjadi petambak karyawan, kalau tidak

bersedia maka plasma tersebut juga di PHKS secara sepihak oleh perusahaan inti.

Pertemuan demi pertemuan telah dilakukan dan kesepakatan demi kesepakatan telah beberapa kali dibuat, tetapi menurut para plasma selama ini tidak pernah ditepati oleh perusahaan inti. Bahkan sehabis dibuat kesepakatan dengan inti, maka ada saja pengurus PPPUW DCD yang di PHKS secara sepihak oleh perusahaan inti. Sebagai wujud kekecewaan dari para plasma, maka terjadilah gelombang unjuk rasa secara massal dengan pusat konsentrasi di Bumi Dipasena, dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 28 April 1999.

Dalam unjuk rasa massal tersebut menurut pengurus PPPUW DCD yang mewakili para plasma, para plasma tidak melakukan perbuatan yang anarkis tetapi justru sebaliknya dari perusahaan inti mensikapi terlalu berlebihan dengan mengadakan sabotase antara lain pemutusan jembatan penghubung antar desa/blok, pengerahan Pam Swakarsa, pengerahan aparat keamanan yang hanya melindungi kepentingan perusahaan inti, penghadangan pengiriman sembako, intimidasi dengan melakukan pengancaman dan penekanan mental kepada para plasma. Unjuk rasa inipun berakhir dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh perusahaan inti dan wakil plasma yang tergabung dalam PPPUW DCD dan diketahui oleh Tim Pemda Tingkat I Lampung Ir. Indra Ahmad AM, pada hari Rabu tanggal 28 April 1999 yang isi intinya disepakati untuk diadakan pertemuan lebih lanjut antara

Direksi PT. D. C. D, PPPUW DCD dan Instansi terkait pada tanggal 1 Mei 1999 di Bandar Lampung.

Untuk selanjutnya, ternyata pada tanggal 1 Mei 1999 gagal mencapai kesepakatan, karena pihak perusahaan inti tidak menghadiri dan tidak mengirim wakilnya, untuk itu dilanjutkan pada tanggal 4 Mei 1999. Ternyata pada tanggal 4 Mei 1999 dialog dengan perusahaan inti tidak mendapat kesepakatan, oleh karena itu akan dilanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang yang akan dimediasikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Pada pertemuan tersebut para plasma melalui wakilnya PPPUW DCD menuntut haknya berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor : 1251/KPTS/KL.420/II/98 tanggal 12 Pebruari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola PIR pada bagian pendahuluan poin 1 - 3 tentang asas kemitraan yaitu Kemitraan usaha perikanan berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan dan peningkatan ketrampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra, melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang saling memerlukan, saling memperkuat kedudukan dan saling menguntungkan.

Dalam perjalanan waktu, beberapa kesepakatan dan permohonan atau tuntutan plasma kurang mendapat perhatian bahkan tidak dilaksanakan oleh perusahaan inti. Oleh karena itu agar mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung maupun Tingkat Nasional, maka para plasma yang dikoordinir oleh

PPPUW DCD pada tanggal 13 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1999 melakukan unjuk rasa secara massal di lokasi Lapangan Korpri Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang kebetulan letaknya didepan Kantor DPRD Tingkat I Lampung dan depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Menurut pengurus PPPUW DCD para plasma yang melakukan unjuk rasa tersebut adalah semua plasma yang berjumlah 9.032 orang. Sedangkan keluarganya tetap dilokasi Bumi Dipasena, hanya saja menurut informasi dari sesama plasma yang mendapat khabar dari keluarganya para keluarga plasma yang dilokasi diintimidasi dan diusir bahkan anak-anak mereka yang masih sekolah dikeluarkan dari sekolahnya. Melihat kondisi yang demikian diantara para keluarga plasma ada yang nekat menyusul dan ikut unjuk rasa di lokasi Lapangan Korpri Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Permasalahan yang menjadi dasar sehingga para plasma melakukan unjuk rasa sebenarnya tidak adanya transparansi dari pihak perusahaan inti. Hal ini dapat diketahui dari beberapa plasma yang diwawancarai pada dasarnya memberikan informasi sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini plasma tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah hutang mereka karena ada yang sudah 8 - 10 tahun bergelut menjadi plasma ternyata belum lunas juga. Pada waktu ditanyakan pada perusahaan mendapat jawaban jangankan lunas, bahkan hutang mereka ada yang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.1000.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menurut

para plasma hal ini tidak masuk akal, karena pada saat memulai kerjasama hutang para plasma hanya Rp.135.000.000,- (seratus tigapuluh lima juta rupiah). Sudah diangsur beberapa tahun hutangnya malah membengkak.

2. Para plasma memberikan gambaran bahwa setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan para plasma panen. Setiap panen rata-rata menghasilkan Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Dari hasil tersebut misalnya untuk biaya hidup bulanan, biaya operasi, biaya benur dan lain-lain selama 3 - 4 bulan kalau dibulatkan anggap saja Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), kemudian untuk angsuran selama 3 (tiga) - 4 (empat) bulan tersebut mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Seharusnya setiap panen para plasma dengan hitungan yang global tersebut mendapatkan penghasilan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tetapi kenyataannya setiap panen selama ini para plasma tidak pernah mendapatkan sisa hasil dari produksinya tersebut, katanya sisa hasil usaha ini didepositokan atas nama plasma, sehingga selama ini para plasma hanya mendapatkan Biaya Hidup Bulanan Petambak yang besarnya dari Rp.170.000,- naik menjadi Rp.300.000,- dan setelah unjukrasa menjadi Rp.500.000,- dan terakhir pada saat terjadinya unjuk rasa (Oktober 1999) biaya hidup bulanan petambak sebesar Rp.600.000,- Diluar itu para plasma tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Oleh karena itu para plasma tidak dapat menerima

hutangnya semakin melonjak drastis sampai ratusan juta rupiah. Hal ini semata-mata terjadi karena tidak adanya transparansi manajemen dari perusahaan inti kepada plasma.

3. Para plasma tidak setuju dengan kebijakan perusahaan inti yang mem-PHKS-kan pengurus PPPUW DCD yang mewakili plasma memperjuangkan hak-hak plasma.
4. Para plasma tidak setuju mengalihkan lahan tambak dari lahan tambak milik plasma kepada karyawan dan lahan tersebut dijadikan lahan inti.
5. Para plasma berpedoman bahwa lahan tersebut milik plasma, hal ini terbukti bahwa semua lahan yang telah bersertipikat hak milik atas nama plasma, bukan atas nama perusahaan inti. Oleh karena itu perusahaan inti tidak berhak mem-PHKS-kan Plasma, sebab Plasma bukan karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja (Perusahaan Inti);
6. Perusahaan inti juga memasukkan lahan milik petani tambak merupakan asset perusahaan inti yang merupakan satu group dengan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), yaitu " Group Gajah Tunggal" milik Syamsul Nur Salim. Sehingga pada saat kondisi BDNI collaps/kritis akan dilikuidasi maka BDNI mengajukan pinjaman Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan menjaminkan lahan tambak miliknya plasma. Oleh karena itu masalah kredit plasma ini juga melibatkan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebab semua asset BDNI termasuk PT.

Dipasena Citra Darmaja (didalamnya termasuk lahan tambak plasma) merupakan agunan BDNI pada waktu memperoleh BLBI.

7. Para plasma juga menuntut perbaikan harga jual udang yang selama ini ditentukan sepihak oleh perusahaan inti, oleh sebab itu para plasma menghendaki harga jual udang berdasarkan harga lokal/nasional dan berdasarkan harga yang ditentukan oleh Dinas Perikanan Tingkat I Propinsi Lampung atau Dinas Perikanan Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung.
8. Para plasma menuntut transparansi dan cicilan hutang plasma setiap panen dari awal hingga sekarang. Hal ini untuk mengetahui berapa besar sisa hutang para plasma dan menuntut Syamsul Nursalim mundur dari jabatannya sebagai Direksi PT.Dipasena Citra Darmaja, karena dinilai arogan dalam memimpin PT. DCD.
9. Hilangkan Aparat bersenjata (TNI) dari wilayah Dipasena dan hapuskan Satgas PT. DCD;
10. Direksi harus berfungsi mengatur manajemen perusahaan Inti bukan sebagai pengawas petambak, jadi kedudukan perusahaan inti harus setara/sejajar dengan plasma;
11. Selain tuntutan di atas, para plasma juga menuntut seperti yang telah dilakukan dan diberikan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung pada tanggal 4 Mei 1999.

Untuk menjembatani permasalahan antara plasma dengan perusahaan inti, maka pada tanggal 14 dan 15 Oktober telah dilakukan

rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang, DPRD Tingkat I Lampung, BKPM, BPN Tingkat I Lampung. Pertemuan tersebut dirasa tidak kondusif, karena pada saat rapat yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I Lampung, pihak PT. DCD dihadiri oleh Syamsul Nursalim, Jend. Pol. Purn. Sanusi serta Penasihat Hukum PT. DCD dan dari Plasma diwakili oleh Pengurus PPPUW DCD, keluarga plasma (isteri dan anak-anak para plasma) memasuki ruangan rapat dengan histeris, karena keluarga plasma tidak diperkenankan untuk tetap tinggal di lokasi Bumi Dipasena, dan para pengunjuk rasa diancam untuk di PHKS melalui pengumuman di Media Massa, oleh karena itu pertemuan ditunda.

Pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 16 Oktober 1999 dilakukan pertemuan lagi dan dilakukan secara bertahap untuk menampung keinginan masing-masing pihak, sehingga dapat mendekatkan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dari pertemuan yang dilakukan secara bertahap tersebut dan dilanjutkan dengan pertemuan lengkap. Namun dari hasil pertemuan tersebut tetap saja tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan, tetapi diperoleh beberapa opsi yang ditawarkan antara lain bahwa :

1. Syamsul Nursalim bersedia keluar dari PT. DCD apabila semua Pengurus PPPUW yang berjumlah kurang lebih 200 orang plasma juga keluar dari Bumi Dipasena (sebagai Plasma);

UPT-PUSTAK-UNDIP

2. Para Petani Tambak (Plasma) bersedia keluar dari lokasi Bumi Dipasena (lokasi tambak), apabila diberikan ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Namun PT. DCD selaku perusahaan inti dalam hal ini Syamsul Nursalim menyanggupi sebesar 6xRp.676.000,- =Rp.4.056.000,- (empat juta limapuluh enam ribu rupiah).

Mengingat beberapa kali diadakan pertemuan dan belum juga menghasilkan kesepakatan, pimpinan rapat mengundang kembali untuk rapat menggunakan ruang BKPMD Propinsi Lampung pada tanggal 18 Oktober 1999. Setelah diadakan diskusi yang cukup mendalam, pimpinan rapat/Wakil Ketua DPRD Tingkat I Lampung merancang 3 (tiga) butir kesepakatan yang sangat mendasar, yaitu :

1. Hubungan antara PT. Dipasena Citra Darmaja selaku perusahaan inti dan Petambak Plasma merupakan hubungan kemitraan dan akan menjalankan kemitraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Seluruh plasma tanpa kecuali untuk kembali kerumahnya masing-masing di lokasi Bumi Dipasena, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (kembali kepada posisi sebagai plasma, mengingat lahan tersebut milik plasma dan plasma kembali dengan aman tanpa intimidasi serta dijaga oleh pihak Keamanan Polri dan Denpom;
3. Membuat Tim yang terdiri dari unsur PPPUW DCD, PT. DCD, DPRD Tingkat I Lampung, Pemda Tingkat I Lampung, BPN (Badan

Pertanahan Nasional), BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), untuk membahas hal-hal yang paling mendasar (hak dan kewajiban) dan Tim mulai bekerja pada tanggal 21 Oktober 1999.

Berdasarkan rancangan butir kesepakatan tersebut di atas, pihak perusahaan inti bersikukuh pada pendiriannya bahwa tidak setuju terhadap butir 2 di atas yaitu : selu-ruh plasma tanpa kecuali untuk kembali kerumah masing-masing di Bumi Dipasena Tulang Bawang (kembali posisi sebagai plasma), mengingat lahan tersebut milik plasma dan plasma kembali dengan aman tanpa intimidasi serta di jaga untuk seterusnya oleh pihak keamanan yaitu Polri dan Denpom. Melihat kondisi demikian pimpinan dewan bersama dengan Pemda dan PPPUW DCD terpaksa mengambil sikap membuat kesepakatan secara penuh butir 1,2 dan 3 di atas, sambil menunggu kebijakan yang bersifat toleransi dari PT. DCD sebagai perusahaan inti.

Setelah disosialisasikan, kesepakatan tersebut oleh pengurus PPPUW DCD kepada plasma, ternyata para plasma belum dapat menerimanya secara penuh, dikarenakan pihak PT. DCD sebagai perusahaan inti bersikukuh pada pendiriannya. Mengingat kesepakatan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh pihak perusahaan inti, maka pertemuan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober 1999, dengan menghadirkan juga Kakanwil BPN, Kakanwil Departemen Koperasi, Dirjen. Perikanan dan BPPN Pusat bertempat di DPRD Tingkat I Lampung.

Pada waktu para plasma PT. DCD melakukan unjuk rasa tersebut, ternyata para karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja yang dikoordinir oleh Perwakilan Karyawan PT. DCD yaitu Sumurung L. Tobing pada tanggal 19 Oktober 1999 juga melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Tingkat I Lampung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Pada waktu unjuk rasa tersebut para karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja mengeluarkan "*Pernyataan Sikap*" yang pada dasarnya isi pernyataan sikap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyadari kenyataan bahwa yang menggantungkan hidup pada PT. Dipasena Citra Darmaja tidak hanya plasma yang berjumlah kurang lebih 9 032 orang, tetapi juga karyawan yang berjumlah kurang lebih 11.000 orang serta masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup baik langsung ataupun tidak langsung. Untuk mensikapi konflik yang sudah terjadi sejak tahun 1997 antara para plasma dengan perusahaan inti serta memuncak pada unjuk rasa ini dihalaman Kantor DPRD Tingkat I Lampung (Depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung), maka seluruh karyawan PT. DCD yang bergabung dalam Persatuan Karyawan PT. DCD (PEKAD) menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebagian petambak plasma yang tergabung dalam PPPUW DCD dan dikoordinir oleh pengurusnya telah mengakibatkan dan meng-arah kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Tatanan kerja yang sewajarnya sudah tidak diindahkan lagi oleh sebagian besar plasma;

2. Kenyamanan dan ketenangan kerja para karyawan sudah tidak didapatkan;
3. Telah tercipta keresahan dan ketakutan di kalangan karyawan dan keluarganya karena sikap memaksakan kehendak dari sebagian plasma bahkan sudah menjurus kepada ancaman perusakan infrastruktur yang ada di lokasi pertambangan;
4. Produktivitas yang semakin menurun;
5. Perusahaan terancam tutup sehingga seluruh karyawan akan kehilangan pekerjaan.

Melihat pernyataan sikap dari karyawan yang demikian itu, para plasma tidak memberikan tanggapan apa-apa. Justru sebagian besar terutama para pengurus PPPUW DCD menenangkan para plasma, sebab pengurus PPPUW DCD menduga sebenarnya karyawan tersebut terpaksa berbuat demikian karena desakan dan untuk melindungi perusahaan inti. Para plasma bersikap demikian karena sebenarnya diantara karyawan PT. DCD tersebut masih banyak yang saudara bahkan anak atau adiknya sendiri. Begitu juga aparat Pemerintah Daerah melarang para plasma mensikapi dengan melakukan tindakan yang anarkis terhadap sebagian karyawan yang berunjuk rasa kurang lebih 1.250 (seribu duaratus lima puluh) orang tersebut. Oleh karena itu dalam beberapa pertemuan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Tingkat I Lampung, pernyataan sikap para karyawan yang melakukan unjuk rasa tidak pernah masuk dalam agenda untuk dibahas.

Selama para plasma melakukan unjuk rasa di Bandar Lampung, maka perusahaan inti melakukan pengusiran terhadap keluarga plasma yang ada dilokasi Bumi Dipasena. Bahkan sudah ada beberapa anak-anak plasma yang sedang menempuh sekolah di lokasi Bumi Dipasena, oleh Kepala Sekolah masing-masing dikeluarkan serta oleh perusahaan inti setiap anak yang dikeluarkan diberi uang untuk pindah sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah). Melihat kondisi yang demikian, maka Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI.P) DPRD Tingkat I Lampung menyatakan sikap :

Atas tuntutan petani plasma terhadap PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai perusahaan inti, maka Fraksi PDI.P merumuskan pointer-pointer persyaratan sebagai berikut :

1. PT. Dipasena Citra Darmaja menghormati dan menghargai proses penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan petani tambak/plasma ketimbang kepentingan perusahaan semata-mata dengan tidak melakukan upaya-upaya penyelesaian yang bersifat setengah hati dan mendua, sehingga tidak melakukan Keputusan sepihak yang bersifat menekan seperti yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PT. DCD dengan cara melakukan Pengumuman di media massa sebagaimana dimuat 2x terbitan Lampung;
2. Tidak melakukan tindakan sepihak dengan cara mengusir / mengeluarkan keluarga para petani tambak (plasma) yang menuntut penyelesaian persoalan di DPRD Tingkat I Lampung, cara-cara

tersebut merupakan pelecehan terhadap DPRD I Lampung dan melanggar hak asasi manusia serta Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;

3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada intimidasi dengan mempergunakan aparat keamanan, satgas serta Pamong Desa untuk menekan dan mengeluarkan keluarga petani tambak secara sepihak;
4. Menjamin keamanan serta kenyamanan keluarga petambak selama proses penyelesaian berlangsung.

Menurut Fraksi PDI.P Proses Penyelesaiannya adalah :

1. Harus ada re-design atas isi perjanjian dalam hubungan antara petani plasma dengan perusahaan inti dengan mempergunakan asas kesetaraan hak dan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam Pola TIR;
2. Memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan harga dengan mengacu kepada mekanisme pasar yang berlaku;
3. Memberikan kebebasan kepada petani plasma untuk memasarkan kepada pihak lain jika kesepakatan harga tidak tercapai;
4. Memberikan kebebasan kepada petani untuk mendirikan serikat kerja, menjadi anggota serta menjalankan kegiatan serikat pekerja dimana petani plasma menjadi anggota tanpa intervensi dan tekanan dari perusahaan inti;

5. Menarik seluruh aparat keamanan dari lokasi Bumi Dipasena (PT. DCD) karena hal tersebut telah memanfaatkan aparat keamanan untuk kepentingan perusahaan dan merupakan eksploitasi atas aparat keamanan untuk menekan petani plasma demi kepentingan perusahaan semata;
6. Membangun kemitraan dengan asas kesetaraan dengan kedudukan PT. DCD :
 - a. Sebagai pembinaan dan pengembangan terhadap petani plasma seperti pengadaan sarana produksi dan distribusinya kepada plasma seperti bibit udang, pupuk, pakan udang, dan lain-lain;
 - b. Menjamin pemasaran dengan cara menampung hasil produksi plasma dengan berpedoman kepada harga pasar yang berlaku pada saat itu;
 - c. Melakukan kegiatan peningkatan ketrampilan melalui ketrampilan dan pendidikan;
 - d. Memberikan pinjaman modal kepada plasma dengan syarat-syarat yang tidak merugikan kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya syarat sahnya perjanjian.

Pembahasan selanjutnya untuk mencari solusi masalah antara plasma dengan perusahaan inti yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 1999 yang seyogyanya akan dilaksanakan di DPRD Tingkat I Lampung. Namun mengingat situasi dan kondisi yang memanas, pimpinan Dewan mengalihkan pertemuan di Kantor BKPMD Propinsi Lampung guna

mendapatkan informasi lebih banyak terutama yang berkaitan dengan masalah pertanahan, perbankan dan perkoperasian serta aspek kemitraan.

Pada rapat tersebut mendapatkan informasi dari yang hadir, antara lain :

1. Seluruh plasma yang berunjuk rasa kurang lebih 9.032 orang telah mendapat sertipikat tanah hak milik yang saat ini diagunkan ke Bank untuk mendapatkan kredit;
2. Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) menyanggupi untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) bagi seluruh plasma dalam waktu dekat;
3. Mengingat BDNI selaku Bank Kreditor telah di Beku Operasionalkan (BBO) dan telah diambil alih oleh BPPN serta PT. DCD termasuk salah satu perusahaan dibawah pengawasan BPPN melalui PT. Tunas Sepadan Investama, maka BPPN menjanjikan tanggal 15 Nopember 1999 setiap neraca plasma telah selesai diaudit oleh ouditor Arthur Anderson yang ditugaskan BPPN dan hasil auditnya akan diserahkan kepada masing-masing plasma;
4. Para plasma dapat membantu koperasi secara terpisah dari koperasi yang dibentuk oleh inti sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
5. Direktorat Jenderal Perikanan menegaskan kembali bahwa azas kemitraan adalah kesetaraan usaha yang menguntungkan kedua belah pihak dan diharapkan dapat berkesinambungan, maka perjanjian

kerjasama harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan perusahaan inti dengan plasma menurut Assiten II Sekwilda. Propinsi Lampung yaitu Bapak Chairullah Gultom, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tingkat I Lampung, Kadis. Perikanan Tingkat I Lampung, Kabid III BKPM D. Propinsi Lampung dan para pengurus PPPUW DCD sendiri bahwa selalu terbentur pada masalah pihak PT. DCD sebagai perusahaan inti tidak memberi toleransi atas kembalinya pengurus PPPUW DCD ketembaknya masing-masing, walaupun pimpinan DPRD dan Pemerintah Propinsi Lampung telah memberi waktu yang cukup lama kepada PT. DCD selaku perusahaan inti untuk merubah sikapnya.

Disisi lain para plasma telah berlarut-larut menempati halaman DPRD Tingkat I Lampung, yang sudah mengarah pada keadaan yang semakin memprihatinkan. Sehingga dikhawatirkan terancamnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta kelancaran aktivitas Pemerintah Daerah bersama DPRD Tingkat I Lampung. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan aparat keamanan terpaksa harus mengambil sikap yang dapat disepakati PPPUW DCD guna seluruh plasma tanpa terkecuali, termasuk pengurus PPPUW DCD yang telah di PHKS mau kembali ditempatnya semula di Bumi Dipasena. Secara rinci kesepakatan tersebut berisi antara lain :

1. Seluruh petambak plasma DCD tanpa terkecuali termasuk pengurus PPPUW DCD yang di PHKS dan petambak plasma pengganti yang dikaryawankan atau di PHKS dikembalikan posisi statusnya seperti semula dan menempati rumahnya masing-masing dengan jaminan keselamatan lahir dan batin beserta kebutuhan logistik dan transportasi ke Bumi Dipasena;
2. Surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) diberikan kepada masing-masing petambak plasma selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 1999;
3. Pola kerjasama didasari atas saling menguntungkan dan adanya kesepakatan PT. DCD selaku perusahaan inti dan plasma yang diwakili oleh pengurus PPPUW DCD yaitu transparansi harga jual udang, sarana dan prasarana budidaya udang, bagi hasil harga jual udang, tidak ada PHKS sejak tanggal 22 Oktober 1999.

Kesepakatan tersebut di atas ditandatangani pada hari Jum'at pukul 11.00 BBWI tanggal 22 Oktober 1999. Guna lebih meyakinkan atas sikap tersebut di atas, maka seluruh unsur yang terkait antara lain :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat I Lampung;
- Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
- POLDA Lampung;
- Danrem yang diwakili oleh Dan Denpom Lampung;
- Pengurus PPPUW DCD,

semuanya ikut menandatangani dan sekaligus mengadakan sosialisasi bersama pada hari yang sama pukul 15.00 BBWI.

Setelah disosialisasikan dilaksanakan dan dapat dipahami oleh para plasma, dengan dukungan satu unsur keamanan dari Polda Lampung (kurang lebih 35 orang) dan 6 orang anggota dari Den POM Lampung dengan 157 buah bus. Para plasma diberangkatkan kembali ketempatnya masing-masing di Bumi Dipasena. Para plasma tiba ditempat lokasi Bumi Dipasena antara pukul 22.00 BBWI sampai dengan pukul 04.00 BBWI dan di lokasi telah dinantikan oleh Pemda Tingkat II Tulang Bawang.

Sangat disayangkan bahwa usaha yang dilakukan aparat yang terkait di atas bersama dengan PPPUW DCD oleh pihak PT. Dipasena Citra Darmaja tetap tidak mau menerima pengurus PPPUW DCD kembali ke lokasi Bumi Dipasena. Unsur keamanan yang mendampingi para plasma (termasuk pengurus PPPUW DCD) tidak dapat berbuat banyak karena pihak perusahaan inti telah menghadangnya di pintu gerbang masuk lokasi Bumi Dipasena dengan kurang lebih 6.000 orang Pam Swakarsa yang dibentuknya, dipimpin oleh Kolonel. Purn. AL. Barmawi.

Menurut pihak Perusahaan PT. Dipasena Citra Darmaja selaku perusahaan inti, bahwa Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 1999 dianggap tidak sah, karena pihak perusahaan inti tidak ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan inti

menuduh bahwa Pemerintah Daerah (Tim Mediasi) tidak netral lagi. Hal ini diungkapkan oleh Humas PT. Dipasena Citra Darmaja bapak Agus Ismail Munawar dan Kuasa Hukum PT. Dipasena Citra Darmaja, yang pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan inti tetap tidak dapat menerima lagi pengurus PPPUW DCD yang berjumlah 200 orang untuk kembali ke lokasi Bumi Dipasena dan tetap mem PHKS kan, sebab menurut perusahaan inti pengurus PPPUW DCD inilah dianggap biang kerok dan tidak mau menerima musyawarah untuk menyelesaikan kasus plasma. Hal ini akan berbahaya buat kelangsungan perusahaan, karyawan dan plasma itu sendiri.

Walaupun Pemerintah Daerah mengancam akan mendatangkan dan mengganti dengan investor baru, pihak perusahaan inti tetap pada pendiriannya menolak pengurus PPPUW DCD kembali ke lokasi Bumi Dipasena. Perusahaan inti berpendapat bahwa Tim Mediasi hanya ingin memindahkan plasma agar tidak lagi melakukan unjuk rasa di Depan DPRD Tingkat I dan Depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, artinya yang penting bubar dulu, pulang dulu dari unjuk rasa. Dalam hal ini perusahaan inti tetap tegas dengan putusan semula, sebab PT. Dipasena Citra Darmaja bukan perusahaan gelap, semua punya izin dan selalu memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

Perusahaan inti berpendapat bahwa apabila pengurus PPPUW DCD tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum (Gugat ke Pengadilan). Agus Salim M selanjutnya mengemukakan bahwa

keputusan mem PHKS pengurus PPPUW DCD dibarengi dengan beberapa kompensasi, tetapi waktu didesak apa bentuk kompensasi tersebut beliau tidak mengatakan secara tegas dan akan dihitung terlebih dahulu.

Berdasarkan tanggapan yang dilakukan oleh perusahaan inti kepada para plasma yang ditolak kembali ke lokasi Bumi dipasena membuat kondisi yang terjadi sangat mengecewakan semua pihak. Oleh karena itu hari itu juga pengurus PPPUW DCD, para plasma bersama anak dan isteri serta perangkat alat rumah tangga, terpaksa pergi lagi berbondong-bondong kembali ke Bandar Lampung pada tanggal 23 Oktober 1999. Melihat hal ini sebenarnya sungguh sangat memprihatinkan dan menyinggung rasa kemanusiaan, bahkan dapat dikatakan perusahaan inti dalam hal ini telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Bapak Chairullah Gultom (Ass.II Sekwilda. Prop. Lampung), tindakan pengusiran terhadap plasma tersebut oleh perusahaan inti (PT. DCD) diluar batas kemanusiaan karena mereka memiliki hak atas tanah/tambak/lahan yang ada di lokasi Bumi Dipasena. Masalah perusahaan inti dengan plasma akan terus dibahas oleh Tim, terutama tuntutan plasma soal transparansi neraca keuangan dan kredit yang berjalan selama ini.

Mensikapi hal tersebut pada tanggal 25 Oktober 1999 bertempat di Gedung Sumpah Pemuda Way Halim Bandar Lampung,

maka, Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung mengadakan rapat Muspida bersama-sama Ketua DPRD Tingkat I Lampung. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan pengusiran, intimidasi oleh pihak PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai perusahaan inti kepada seluruh plasma melalui unsur keamanan perusahaan sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia;
2. Untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih luas terutama tindakan yang mengarah pelanggaran Hak Asasi Manusia, intimidasi dan keresahan yang berkepanjangan terhadap penduduk, petani/petambak plasma, maka rapat Muspida meminta kepada Kapolda untuk dapat menarik aparat keamanannya (Polri) yang diperbantukan kepada PT. Dipasena Citra Darmaja. Apabila keberadaan personil Polri masih dibutuhkan hendaknya dapat di BKO kan melalui satuan pengamanan setempat atau Polres setempat dengan tugas mengamankan semua pihak (petani tambak plasma dan perusahaan inti/PT. DCD), tidak ada keberpihakan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; Dan Lanal juga telah menyatakan kesediaannya untuk menarik seluruh personil Angkatan Laut yang ditugaskan di Bumi Dipasena.

Pada kesempatan audiensi Pemerintah Daerah yang dilakukan/dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

bersama Ketua DPRD Tingkat I Lampung kepada Ibu Wakil Presiden RI tanggal 27 Oktober 1999 dalam rangka melaporkan kesiapan pelaksanaan puncak acara Hari Sumpah Pemuda Nasional di Bandar Lampung. Pada kesempatan pertama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung telah melaporkan secara lengkap konflik antara Plasma dengan PT. Dipasena Citra Darmaja selaku Perusahaan Inti. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan mengingat keterbatasan kewenangan yang ada pada daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 29 Oktober 1999 terjadi konflik fisik antara para karyawan PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma di halaman kantor DPRD Tingkat I Lampung. Sehingga terdapat korban luka-luka yang terpaksa dirawat di rumah sakit. Pada hari yang sama sebelum terjadinya konflik fisik, pemerintah daerah telah mengadakan pertemuan dengan unsur Muspida bersama-sama dengan Ibu Ketua DPRD Tingkat I Lampung dan memutuskan antara lain sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Propinsi Lampung membuat surat kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN yang merupakan instansi pusat yang berwenang dalam mengeluarkan persetujuan penanaman modal, dengan maksud untuk menekan agar PT. Dipasena Citra Darmaja (dalam hal ini Syamsul Nursalim) dapat merubah sikap /kebijaksanaan yang tanpa kompromi dalam menyelesaikan konflik. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung telah

mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Menteri Negara
 Penanaman Modal/Pembinaan BUMN Nomor :
 523.3/2463/05/1999 tanggal 30 Oktober 1999, perihal :
 Peninjauan kembali persetujuan Izin Usaha Tambak Udang PT.
 Dipasena Citra Darmaja.

Dari penelitian terlihat memang dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perusahaan inti dengan plasma tidak harmonis. Para plasma merasa tidak puas terhadap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan inti. Cara mengungkapkan ketidakpuasan tersebut para plasma melakukan unjuk rasa secara massal. Perbuatan yang dilakukan para plasma tersebut sudah merupakan tindakan sosial, sebab tindakan tersebut berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada pihak lain. Bertitik tolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial diatas, Weber mengemukakan ada 5 (lima) ciri pokok yang menjadi sasaran dalam tindakan sosial, yaitu :⁷⁴

1. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subjektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata;
2. Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif;

⁷⁴ George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Benda, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 45.

3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan-tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam;
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu;
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Selain itu pada ciri-ciri diatas, tindakan sosial juga masih mempunyai ciri-ciri yang lain. Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang. Sedangkan jika dilihat sasarannya, maka sasarannya tersebut dapat tertuju kepada seseorang/beberapa /kumpulan orang.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa para plasma melakukan tindakan sosialnya ditujukan kepada perusahaan inti. Dari data-data yang ditemukan, dalam aksinya tersebut juga menyangkut masalah-masalah masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini terlihat dari tuntutan para plasma dinilai dari proses perjanjian. Pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama dan harapan ingin memiliki lahan tambak karena waktu perjanjian yang disepakati telah berakhir, atau setidaknya ingin mengetahui berapa sisa kewajiban angsurannya untuk mendapatkan haknya tersebut.

Untuk memahami motif dari tindakan sosial yang dilakukan para plasma tersebut, maka digunakan beberapa metode. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam 4 (empat) tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami, tipe-tipe tersebut yaitu :⁷⁵

1. *Zwerk rational*

Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *Zwerk rational* tidak absolut. Ia juga dapat menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya itu.

2. *Werk trational action*

Dalam tindakan tipe ini aktor diatas dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.

3. *Afectual action*

Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami. Tindakan ini kurang atau tidak rasional.

⁷⁵ George Ritzer, *ibid*, hal. 47.

rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam 4 (empat) tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami, tipe-tipe tersebut yaitu :⁷⁵

1. *Zwerk rational*

Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *Zwerk rational* tidak absolut. Ia juga dapat menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakannya itu.

2. *Werk trational action*

Dalam tindakan tipe ini aktor diatas dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.

3. *Afectual action*

Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami. Tindakan ini kurang atau tidak rasional.

⁷⁵ George Ritzer, *ibid*, hal. 47.

4. Traditional action

Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja.

Dari beberapa tipe diatas, maka tindakan para plasma yang melakukan unjuk rasa karena tidak puas terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditujukan pada perusahaan inti merupakan tipe *Zwerk rational*. Hal ini dapat diketahui bahwa tindakan para plasma merupakan tindakan sosial murni. Dalam hal ini tindakan para plasma tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuannya. Tujuan yang diharapkan para plasma juga tidak absolut, terbukti beberapa kali menerima kesepakatan dengan perusahaan inti yang dimediasikan oleh Pemda Lampung. Dari kesepakatan tersebut terlihat merupakan penyelesaian kompromis, artinya plasma tidak bertahan secara kaku dari beberapa hal yang menjadi tuntutan.

Permasalahan yang muncul antara perusahaan inti dengan plasma sebenarnya suatu bentuk kenyataan telah gagalnya kebijakan pemerintah dalam membudayakan ekonomi rakyat. Hal ini juga tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalannya kerjasama para pihak. Seperti terlihat ternyata para plasma tidak memiliki bukti setoran untuk angsuran kredit yang dibayar dengan hasil panen melalui perusahaan inti. Padahal setiap panen para plasma tidak pernah menjual hasilnya dengan pihak lain serta tidak pernah menerima secara riil sisa hasil usahanya,

tetapi semua untuk membayar angsuran kredit (baik kredit investasi maupun kredit modal kerja) serta didepositokan.

Sebenarnya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi ukuran tujuan akhir adalah kemakmuran rakyat oleh karena itu dapat dimengerti bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Permasalahan yang dialami para plasma kalau dikaji merupakan akumulasi dan proses berjalannya perjanjian kerjasama yang telah bertahun-tahun, dan para plasma hanya mengandalkan kepercayaan semata dari pihak perusahaan inti. Sehingga terlihat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih lemah. Terbukti Pemerintah Daerah tidak berinisiatif menegur perusahaan inti agar memberikan bukti-bukti tentang hasil panen para plasma serta bukti angsuran kredit maupun bukti setoran deposito plasma dari sisa hasil panen setelah untuk membayar angsuran kredit.

Keadaan di atas tidak terlepas dari kekuasaan masa lalu yaitu konglomerat dan birokrat memang merupakan dua kelompok masyarakat yang waktu sebelum reformasi menentukan merah birunya perekonomian Indonesia. Merekalah yang paling berperan dalam menentukan kegiatan

produksi, mereka pula yang paling banyak menikmati hasil-hasilnya, sementara segala kegiatan, yang mereka lakukan sangat sulit dikendalikan oleh masyarakat. Sehubungan hal diatas, diungkapkan oleh Drs. Revrisond Baswir, MBA yaitu :⁷⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan masyarakat sulit membedakan mana yang konglomerat dan mana yang birokrat, seperti siapa yang lebih berkuasa diantara keduanya. Sebagaimana dapat disaksikan dalam perbincangan mengenai kapitalisme birokrat atau bisnis anak pejabat, para konglomerat dan birokrat itu kini cenderung lebar menjadi satu kesatuan.

Dalam memecahkan problematika kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, selain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga perlu ada pembaharuan sosial. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial harus seimbang dan terpadu. Dalam dasa warsa ini, tingkat pertumbuhan yang tinggi tetap diyakini akan dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan sosial seperti penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk memahami lebih jauh permasalahan yang dirasakan para plasma, dapat dilihat dari paradigma definisi sosial yang tergambar dalam tindakan sosial diatas, dengan teori aksi. Pada dasarnya menurut teori aksi ini manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Selain itu juga ditentukan bahwa realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Dalam hal ini tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma,

⁷⁶ Revrisond Baswir. Op. Cit, hal. 5.

kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep fakta sosial.

Beberapa asumsi fundamental teori aksi dikemukakan oleh Hinkle sebagai berikut :⁷⁷

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek;
2. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan;
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, treknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya;
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya;
6. Ukuran-ukuran aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Dari teori aksi tersebut terlihat bahwa perilaku plasma dalam menunjukkan ketidakpusannya kepada perusahaan inti dengan tindakan sosial melalui aksi. Tindakan tersebut dipilih dan disadari untuk mencapai

⁷⁷ Geor Ritzer, loc. Cit, hal, 53.

tujuan agar mempunyai kedudukan dalam tawar-menawar yang seimbang dengan pihak perusahaan inti.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang teori aksi ini, Talcot Parsons menyatakan bahwa walaupun teori aksi ini berurusan dengan unsur-unsur yang paling mendasar dari kehidupan sosial namun, ia mengakui bahwa unsur-unsur yang mendasar itu tidaklah berurusan dengan keseluruhan struktur sosial. Kemudian Talcot Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:⁷⁸

1. Adanya individu selaku aktor;
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif, cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya;
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan;
5. Aktor berada di bawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa para plasma dalam melakukan unjuk rasa dikoordinir oleh PPPUW oleh karena itu para PPPUW yang memilih dan menentukan cara melakukan unjuk rasa untuk mencapai

⁷⁸ Geoge Ritzer, *ibid*, hal. 57.

tujuan para plasma. Bagaimanapun dalam melakukan kegiatannya para plasma juga terikat dengan norma-norma, nilai-nilai yang ada.

PT. Dipasena Citra Darmaja sebagai perusahaan inti, kalau dilihat dari proses perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dengan plasma, selain kurang mempunyai niat baik juga telah dapat dikatakan melakukan P.M.H. Dalam pasal 1365 KUH Pdt disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu, para plasma juga dapat menggunakan pasal 1366 KUH Pdt yaitu setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Dilihat dari beberapa tuntutan para plasma yang melakukan unjuk rasa dapat diketahui perusahaan inti tidak transparan dalam kerjasama dengan para plasma. Ketidaktransparan ini terlihat dari :

- Para plasma tidak pernah mendapatkan penjelasan bahwa sebenarnya akad kredit yang ditandatangani berupa dollar (\$ US), padahal yang diterangkan sejumlah Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Penentuan harga utang secara sepihak.
- Para plasma tidak pernah diberi bukti setoran angsuran kredit maupun sisa hasil usaha.

- Menyatakan hutang plasma menjadi lebih besar dari semula yaitu berkisar Rp. 400.000.000 sampai dengan 1 milyar padahal perjanjian sudah berjalan 8 – 10 tahun.
- Melakukan PHKS secara sepihak terhadap plasma.

Dalam hal kerjasama tersebut perusahaan inti tidak dapat membuktikan tidak dapatnya ia melakukan prestasi untuk menyerahkan tambak kepada plasma adalah diluar kesalahannya atau keadaan memaksa. Senada dengan hal ini, Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa jika satu pihak telah melanggar kewajibannya dalam perjanjian yang mengikat pihak tersebut, biasanya tidak ada pembedaan baginya bahwa pelanggaran itu bukanlah kesalahannya.⁷⁹

Selain perusahaan inti telah melakukan PMH, dapat juga dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dalam wanprestasi ini ada yang dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara yang sepatutnya atau terdapat hal-hal dimana pelaksanaan prestasinya tidak dilakukan pada waktunya. Oleh karena itu, wanprestasi dalam perjanjian dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :⁸⁰

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

⁷⁹ Abdul Kadir Muhammad, op. Cit, hal. 156.

⁸⁰ Riduan Syahrani, op. cit, hal 248.

Untuk itu perusahaan Inti telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam pasal 1234 KUH Pdt, yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selain itu juga diatur dalam pasal 1239 KUH Pdt yang menyatakan tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang sudah memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Oleh karena itu sebenarnya para plasma yang merasa tidak puas dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan merasa dirugikan oleh perusahaan inti dapat menempuh jalur hukum. Dalam hal ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang (seperti yang tertulis dalam perjanjian). Selain itu kalau ada dugaan bahwa perusahaan inti tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dari plasma melalui hasil panen yang tidak disetorkan ke BDNI maka dapat menuntut secara pidana kepada Kepolisian setempat. Hal ini dilakukan kalau memang jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan PT. Dipasena Citra Darmaja selaku perusahaan inti tidak melaksanakan sesuai dengan aturan tentang kemitraan seperti yang diatur dalam :

- Kepmentan No. 334/Kpts./IK.210/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR)..

- Kepmentan No. 509/Kpts./IK.120/7/95 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).
- Keputusan Gubernur Tk I Lampung No. 5 tahun 1996 tentang Kerjasama Kemitraan Usaha Budidaya Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Kepditjenkan Nomor. 1251/Kpts./IK./420/II/98 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola PIR.

Dan peraturan tersebut diatas dapat diketahui beberapa pengertian pokok dalam kemitraan antara lain :

- Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperhatikan dan saling menguntungkan.
- Asas kemitraan usaha perikanan berdasarkan asas persamaan kedudukan (kesetaraan), keselarasan dan peningkatan ketrampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu hubungan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- Tujuan kemitraan usaha perikanan yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber

daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

D. Peran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dalam Membina dan Membantu Menyelesaikan Permasalahan Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja Dengan Plasma.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yaitu wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Tingkat II Tulang Bawang, Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung, Kasubdin Bina Usaha Tani Nelayan Dinas Perikanan Tingkat I Lampung, Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung, Ketua/Wakil Ketua dan anggota DPRD Tingkat I Lampung dan Kepala BKPM Tingkat I Lampung tentang Peran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Dalam membina dan Membantu Menyelesaikan Permasalahan Kerjasama Kemitraan Antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma pada dasarnya akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

Tujuan Pembinaan terhadap pengusaha kecil pada intinya akan mewujudkan pengusaha kecil yang tangguh :

1. Memiliki usaha yang efisien, sehat dan mandiri;
2. Mampu menjadi unsur kekuatan ekonomi rakyat yang memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional;

Sedangkan prioritas pembinaan pengusaha kecil yaitu yang :

1. Paling membutuhkan pembinaan;

2. Mempunyai dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan nilai tambah;
3. Orientasi Ekspor;
4. Memiliki kaitan usaha ke Hulu dan ke Hilir;
5. Merupakan mata pencaharian pokok penduduk;
6. Merupakan usaha yang bersifat turun temurun/tradisional.

Untuk dapat mewujudkan usaha seperti yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu :

1. Adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan dari masyarakat untuk membangun sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan usaha kecil;
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membuka peluang usaha bagi pengusaha kecil;
3. Berlangsungnya proses transformasi dan globalisasi ekonomi semakin memperluas bidang usaha yang dapat ditangani pengusaha kecil.

Secara umum Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung melakukan kebijaksanaan umum untuk meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peranserta pengusaha kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Sedangkan Strategi Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, khususnya Dinas Perikanan Tingkat I Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar, dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Meningkatkan kesempatan* usaha seluas-luasnya :
 - 1). merangsang daya tarik investasi;
 - 2). menyediakan sarana promosi pemasaran, informasi pasar dan jaringan distribusi;
 - 3). perlindungan dari persaingan tidak sehat, dan praktek tidak jujur.
 - b. Memberikan kepastian usaha meliputi :
 - 1). pencadangan usaha terhadap proses produksi dan pemasaran tertentu;
 - 2). pencadangan lokasi usaha.
2. Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber modal dan memperkuat struktur modal.
3. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi, yaitu :
 - a. Inovasi dan pembaharuan teknologi;
 - b. Pemerajaan dan rehabilitasi sarana usaha;
 - c. Peningkatan ketrampilan teknis.
4. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen :
 - a. Diklat (Pendidikan dan Latihan) kewirausahaan dan ketrampilan teknis;
 - b. Mendorong peran instansi pemerintah, swasta, BUMN, assosiasi dan penyuluhan;
 - c. Konsultasi dan penyuluhan;

- d. Pengembangan sistim manajemen;
 - e. Aspek organisasi.
5. Meningkatkan kemitraan yang mantap, dengan cara :
- a. Pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) atau TIR (Tambak Inti Rakyat);
 - b. Bapak Angkat, Dagang Sub Kontrak dan pembinaan;
 - c. Inventarisasi potensi usaha untuk kemitraan;
 - d. Menyediakan media temu usaha;
 - e. Kampanye dan promosi kemitraan.

Menurut Dinas Perikanan Tingkat I Propinsi Lampung, pembinaan yang dilakukan khusus mengenai hubungan kemitraan/kerjasama antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma sebenarnya selama ini sering dilakukan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1996/1997 hubungan kemitraan/kerjasama tersebut sangat harmonis dan tidak ada hambatan terhadap hasil produksi udang dari kerjasama tersebut. Oleh karena itu PT. Dipasena Citra Darmaja mendapat julukan nama suatu perusahaan tambak udang yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini tidak berlebihan karena selama ini hasil produksi udang windu dari kerjasama/kemitraan tersebut tiap tahun meningkat dan di ekspor keluar negeri antara lain ke Jepang, Amerika Serikat (USA), Inggris, Hongkong, Taiwan, Australia, Jerman, Cina, Kanada, Perancis, Singapura, Korea, Bangkok dan Thailand.

Hanya saja sejak adanya permasalahan kerjasama/kemitraan antara plasma dengan perusahaan inti berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yang diperoleh dari Dinas Perikanan Tingkat I Lampung, bahwa hasil udang beku

dari PT. Dipasena Citra Darmaja yang di ekspor tersebut menurun yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 1996, hasil yang diperoleh sebanyak 13.217.944,40 Kg, dengan nilai jual US \$ 144.426. 516,61;
2. Pada tahun 1997 volume udang windu yang dihasilkan sebanyak 9.941.730.02 Kg, dengan nilai jual US \$ 117.609.586,29;
3. Pada tahun 1998, volume hasil udang windu yang didapatkan adalah sebanyak 5.789.666,43 dengan total nilai jual sebesar US \$ 98.908.870,87.

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan di atas, sejak tahun 1997 unjuk rasa secara massal memprotes kebijakan dan menuntut transparansi manajemen oleh Plasma terhadap perusahaan inti semakin gencar. Oleh karena itu hasil produksi tahun 1999 belum dapat didata secara pasti. Menurut pihak perusahaan inti tahun 1999 perusahaan inti menderita kerugian yang sangat besar karena para plasma tidak bersedia menanam udang. Bahkan sampai sekarang bulan April tahun 2000, belum semua plasma bersedia menanam udang seperti sebelum adanya unjuk rasa. Mereka menunggu terlebih dahulu penyelesaian tuntutan mereka yang sampai sekarang belum ada kepastian dan untuk sementara baru ada beberapa kesepakatan yang belum final/tuntas. Permasalahan para plasma dengan perusahaan inti tersebut juga menjadi agenda pembahasan dalam sidang DPR RI di Jakarta yang sampai sekarang belum juga ada penyelesaiannya.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kerjasama/kemitraan antara PT. Dipasena Citra Darmaja selaku perusahaan inti dengan masyarakat petani tambak sebagai plasma, Pemerintah Daerah terutama Dinas Perikanan baik Tingkat II Tulang Bawang maupun Tingkat I Propinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya, kegiatan dan program untuk mencari solusi penyelesaian. Usaha-usaha tersebut dapat dilihat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Membuat Rencana Kerja Tim Mediasi Pemda Lampung Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Antara Petani Tambak Plasma dengan PT. Dipasena Citra Darmaja. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa sumber masalahnya adalah :

- a. Menyangkut Perjanjian Kerjasama/Kemitraan.

Kondisi yang dapat diketahui bahwa dari segi Perjanjian kerjasama/kemitraan ini dapat diidentifikasi meliputi :

- 1). Blangko perjanjian induk dan perjanjian pendukungnya tidak diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung c/q. Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung;
- 2). Harga udang windu yang dihasilkan dari kerjasama tersebut ditetapkan oleh perusahaan inti secara sepihak;
- 3). Perusahaan inti tidak melaporkan kegiatan kemitraan kepada Gubernur KDH. c/q. Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung;

- 4). Pemutusan Hubungan Kerjasama/Kemitraan (PHKS/ PHK) pada umumnya hanya dilakukan perusahaan inti (sepihak) dan dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5). Nilai dan posisi kredit plasma (Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja (KI dan KMK) tidak terinci harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- 6). Manajemen pembukuan plasma dilakukan oleh perusahaan inti tidak secara transparan;
- 7). Peraturan harga saprodi ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan inti.

Sedangkan langkah-langkah yang telah ditempuh/dilakukan sebagai Tim Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu :

1. Mengajukan untuk merubah konsep perjanjian kemitraan induk dan pendukung yang harus dibuat bersama baik perusahaan inti dan plasma yang diketahui oleh Pemda (Gubernur KDH c/q. Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung);
2. Masing-masing plasma harus memiliki photo copy perjanjian induk dan perjanjian pendukung lainnya masing-masing;
3. Dinas perikanan membuat daftar harga udang secara periodik / minggu sebagai bahan acuan penetapan kesepakatan harga udang;
4. Penentuan harga udang sesuai harga pasar setelah dikurangi biaya manajemen yang besarnya sesuai dengan kesepakatan;

5. Jika perusahaan inti tidak membuat laporan kemitraan, gubernur berhak menegur;
6. Mekanisme proses PHKS / PHK harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
7. PT. Dipasena Citra Darmaja harus mempersiapkan data-data tentang Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) pada plasma angsuran dan sisa kredit;
8. PT. Dipasena Citra Darmaja menyiapkan data untung rugi dan cash flow setiap plasma melakukan panen;
9. Pemda perlu menunjuk akuntan publik untuk mengaudit posisi pembukuan hutang piutang masing-masing plasma;
10. Penetapan harga saprodi dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh perusahaan inti (PT.DCD) dan petani tambak plasma diketahui oleh Pemda.

b. Dalam hal Transparansi.

Untuk menjaga hubungan baik dan harmonis, maka transparansi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para pihak, khususnya oleh perusahaan inti. Selama ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan inti dan plasma dalam melakukan kerjasama/ kemitraan, menyangkut transparansi, antara lain :

- 1). Kredit investasi dan kredit modal kerja plasma tidak terperinci, seharusnya kredit investasi dan kredit modal kerja diketahui oleh plasma setelah hasil panen (maksimal 5 bulan sekali). Oleh karena

itu Tim Mediasi berpendapat bahwa perusahaan inti harus memberikan data kredit investasi dan kredit modal kerja setiap setelah panen dilakukan;

- 2). Data laba/rugi dan cash flow masing-masing plasma tidak diberikan saat panen, seharusnya hal ini harus diberikan masing-masing plasma setelah panen. Oleh karena itu perusahaan inti diharuskan memberikan laporan laba/rugi dan cash flow masing-masing plasma setelah panen;
- 3). Selama ini plasma belum membuat pembukuan hasil produksi dan saprodi serta biaya-biaya yang diterima dari inti. Padahal sebenarnya pembukuan rinci sarana produksi agro input dan nilainya serta biaya-biaya lain yang diterima dari inti harus dibukukan oleh plasma termasuk hasil produksi udang yang disetorkan ke perusahaan inti.

c. Aspek Formula Bisnis

Dalam aspek formula bisnis ini ada beberapa hal yang hanya dilakukan sepihak oleh perusahaan inti, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak plasma. Hal-hal tersebut antara lain :

- 1). Harga udang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan inti. Sebenarnya harga udang ditetapkan dengan hasil kesepakatan perusahaan inti dengan plasma berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Tingkat I Lampung. Oleh karena itu Dinas Perikanan Tingkat I Lampung harus membuat

daftar harga udang sesuai dengan harga yang berlaku setiap minggu;

2). Nilai agro input (benur, pakan, obat-obatan, kincir, pupuk dan peralatan lain) selama ini ditetapkan sepihak oleh perusahaan inti.

Oleh karena itu sebenarnya harus dibuat kesepakatan antara perusahaan inti dan plasma tentang penetapan nilai agro input yang harus diketahui oleh Pemerintah Daerah.

d. Pengalihan Lahan

Dalam hal pengalihan lahan yang berupa lahan tambak dan sebidang tanah berikut rumah di atasnya selama ini dialihkan dari lahan tambak plasma menjadi tambak karyawan secara sepihak oleh perusahaan inti. Seharusnya pengalihan lahan tambak eks plasma menjadi tambak karyawan tidak ada, yang ada pengalihan tambak eks plasma menjadi tambak inti dan pengalihan tambak inti harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka perusahaan inti harus menyiapkan dokumen-dokumen / data kepemilikan lahan tambak terhadap yang telah di PHKS secara sepihak maupun yang pengganti.

Selain itu, perubahan kepemilikan lahan dari plasma ke pengganti yang belum jelas (dalam hal ini yang diketahui sementara berjumlah 386 petani tambak/plasma). Dalam hal ini seharusnya ada kejelasan perubahan kepemilikan tambak eks plasma ke tambak

pengganti dan perlu diadakan klasifikasi terhadap eks plasma yang terkena PHKS.

e. Pemutusan Hubungan Kerjasama (PHKS).

Dalam hal PHKS ini ada beberapa hal yang menjadi permasalahan antara perusahaan inti dengan plasma, antara lain :

1). Perusahaan inti melakukan PHKS secara sepihak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya PHKS harus dilakukan setelah mengikuti peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Tim Mediasi dalam menghadapi masalah ini berpendapat bahwa melakukan tindakan PHKS harus dilakukan melalui musyawarah antara inti dan PPPUW (sebagai organisasi plasma) dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- wanprestasi / pelanggaran / kriminal yang telah dilakukan plasma;
- hak dan kewajiban plasma dan PHKS diketahui oleh Gubernur KDH c/q. Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung.

2). Selama ini, Petunjuk Operasional (PO) yang dibuat oleh perusahaan inti secara sepihak untuk melakukan PHKS terhadap plasma. Sebenarnya PO dibuat secara bersama antara perusahaan inti dan plasma diketahui oleh Pemerintah Daerah/Gubernur. Untuk selanjutnya, PPPUW DCD harus mensosialisasikan kepada para anggota plasmanya.

- 3). Plasma yang diduga melakukan pelanggaran langsung di PHKS secara sepihak oleh perusahaan inti tanpa mendapat kesempatan membela diri. Seharusnya plasma diberi hak membela diri didepan tim yang dibentuk perusahaan inti dengan plasma dan mencantumkan jenis pelanggaran yang telah dilanggar. Oleh karena itu kalau sekarang belum ada tim tersebut, Tim Mediasi berpendapat perlu dibentuk tim penilai PHKS yang terdiri dari perusahaan inti dan plasma.
- 4). Hak dan kewajiban plasma tidak dijelaskan oleh perusahaan inti pada saat pelaksanaan PHKS, seharusnya pada saat melakukan PHKS terhadap plasma agar diikuti dengan pemberian hak sesuai dengan kredit yang telah dibayar. Oleh karena itu perusahaan inti perlu menyiapkan data pembukuan plasma yang telah di PHKS.
- 5). Selama ini petambak pengganti eks plasma tidak dilaporkan oleh perusahaan inti kepada Pemerintah Daerah. Hal ini telah menyalahi prosedur, seharusnya petambak pengganti dilaporkan kepada Pemerintah Daerah c/q. Dinas Perikanan. Oleh karena itu perusahaan inti harus menyerahkan data dan syarat-syarat petambak pengganti serta syarat-syarat calon plasma (tambak pengganti) dan harus diketahui oleh Pemerintah Daerah.

Khusus mengenai penyelesaian petani tambak/plasma sebanyak 386 orang plasma yang dialihkan menjadi petani tambak karyawan, untuk

menyelesaikan masalah tersebut Tim Mediasi melakukan kegiatan-kegiatan mengumpulkan dan menganalisa terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Daftar dan copy sertipikat hak milik atas nama 386 orang plasma yang terkena PHKS secara sepihak oleh perusahaan inti;
- b. Data kemitraan dan bentuk kesepakatan kerjasama dengan PT. Dipasena Citra Darmaja terhadap 386 orang petani tambak yang di PHKS;
- c. Data kontrak nilai kredit investasi dan kredit modal kerja terhadap masing-masing plasma sebanyak 386 orang;
- d. Data setoran dari masing-masing plasma (386 orang) ke Bank sejak awal kontrak sampai saat di PHKS;
- e. Tanda bukti PHKS yang dilakukan oleh PT. Dipasena Citra Darmaja selaku perusahaan inti terhadap 386 plasma;
- f. Bentuk kerjasama antara petani pengganti 386 PHKS dengan perusahaan inti (PT. DCD);
- g. Nilai kredit dan setoran ke Bank dari masing-masing petani tambak/plasma pengganti PHKS sejak awal pengga- rapan s/d sekarang;
- h. Melakukan pertemuan seluruh anggota Tim untuk melakukan analisa data a s/d g tersebut di atas yang telah diperoleh.

Sedangkan cara penyelesaian terhadap masalah 5 (lima) orang petani tambak/plasma yang merupakan pengu- rus PPPUW DCD yang juga dilakukan PHKS secara sepihak oleh perusahaan inti, antara lain : Nana Sumpena, Nur Mizan, Malarudin, Zamhari dan sari, Tim Mediasi telah melaksanakan pengumpulan dan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Daftar dan photo copy sertipikat hak milik atas nama 5 (lima) orang plasma tersebut yang terkena PHKS secara sepihak oleh perusahaan inti;
- b. Bentuk kesepakatan kerjasama antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan 5 (lima) orang plasma tersebut;
- c. Terhadap kontrak nilai kredit dan jumlah setoran yang telah dilakukan bagi 5 (lima) petani tambak/plasma yang terkena PHKS sehingga tidak aktif melakukan usaha budidaya;
- d. Terhadap sebab terjadinya PHKS melalui bukti-bukti terjadinya PHKS untuk 5 (lima) orang plasma;
- e. Melaksanakan pertemuan Tim Mediasi lapangan untuk penyelesaian PHKS dengan tujuan akhir plasma yang di PHKS dapat bekerja kembali sebagai plasma atau keluar dengan menempuh jalur hukum.

Dalam membantu menyelesaikan permasalahan / konflik yang terjadi antara perusahaan inti dengan plasma, sebenarnya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan Dinas perikanan Tingkat I Lampung sudah berupaya semaksimal mungkin. Hal ini dapat diketahui dari beberapa langkah/usaha yang dilakukan antara lain :

1. Sebagai mediator pertemuan antara perusahaan inti dengan plasma di tempat Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Lampung pada tanggal 31 Juli 1998;
2. Pertemuan lanjutan antara perusahaan inti dengan plasma di Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Lampung tanggal 4 Agustus 1998;

3. Pertemuan lanjutan pada tanggal 6 Agustus 1998 di Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Lampung antara perusahaan inti dengan plasma, dengan hasil :
- a. Pihak perusahaan inti (PT. DCD) menyampaikan data ke-2 (dua) plasma dengan sistem Accounting secara global;
 - b. Terjadi perbedaan data keuangan antara plasma dengan perusahaan inti yang sangat besar;
 - c. Dinas Perikanan Tingkat I Lampung menyarankan dengan perusahaan inti membuat sistem laporan keuangan secara umum dan rinci yang mudah dimengerti oleh pihak plasma, mengenai :
 - Berapa jumlah kewajiban keuangan plasma baik dilihat dari kredit investasi maupun kredit modal kerja;
 - Berapa jumlah hak-hak keuangan plasma seperti hasil panen, jumlah deposito plasma di Bank yang selama ini tidak diketahui plasma;
 - d. Perusahaan inti (PT. DCD) dapat menerima usaha tersebut di atas dan akan menyiapkan data yang dimaksud pada pertemuan berikutnya yaitu tanggal 10 Agustus 1998;
 - e. Pada tanggal 10 Agustus 1998 para plasma (yang mewakili) sudah menunggu di Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Lampung dari pagi hingga sore hari, tetapi dari perusahaan inti tidak datang tanpa memberi alasan maupun mengutus wakilnya seperti yang telah disepakati;

- f. Akhirnya secara sepihak para plasma tidak bersedia lagi untuk melanjutkan musyawarah.
4. Sebagai mediator pada pertemuan tanggal 28 September 1998 antara perusahaan inti dengan plasma (PPUW DCD) di Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Lampung, dengan hasil kesepakatan :
- a. Bahwa harga pembelian udang oleh perusahaan inti kepada plasma telah disepakati seharga Rp.81.000/Kg untuk size 30 atau sebesar 90% dari harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Tingkat I Lampung;
 - b. Bahwa harga penjualan pakan udang dari pihak inti ke plasma, telah disepakati sebesar rata-rata Rp.10.500,-/Kg;
 - c. Harga-harga tersebut di atas apabila dikemudian hari tidak sesuai lagi dapat ditinjau atau dirubah setiap waktu (minimal dua bulan/dianggap perlu) dengan jalan musyawarah/mufakat kedua belah pihak.
5. Pada tanggal 30 Maret 1999 Dinas Perikanan Tingkat I Lampung melayangkan Surat Tegoran kepada Direktur PT. Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) yaitu sdr. Syamsul Nursalim, yang intinya bahwa berdasarkan beberapa kali kesepakatan yang telah dilanggar oleh perusahaan inti, maka disampaikan bahwa :
- a. Perjanjian kemitraan antara perusahaan inti (PT. DCD) dengan plasma yang ada saat ini agar dapat diperbaiki dan diperbaharui sesuai dengan acuan SK. Mentan No.509/Kpts/IK.120/7/95 jo Kpts. Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor : 5 tahun 1996, jo PP Nomor :

- 44 Tahun 1997 jo Kpts. Ditjend. Perikanan Nomor : 1251/Kptas./KL.420/II/98;
- b. Mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang berjanji. Berkaitan dengan itu maka klausul-klausul kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian pokok kerjasama kemitraan antara perusahaan inti dengan plasma harus dijalankan oleh para pihak secara baik dan benar;
 - c. Setiap permasalahan yang timbul antara perusahaan inti dengan plasma agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan prinsip dasar hukum hubungan inti plasma;
- 6. Menjadi mediator bersama-sama dengan BKPMD dalam pertemuan antara plasma dengan inti di ruang BKPMD Propinsi Lampung pada tanggal 14 April 1999;
 - 7. Menjadi mediator pertemuan antara plasma dengan inti pada tanggal 28 April 1999;
 - 8. Menjadi mediator bersama dengan Dinas Perikanan Tingkat II Tulang Bawang, BKPMD Lampung, Polda Lampung, Kakanwil Deptan. Prop. Lampung, Kakanwil. Depnaker Prop. Lampung Bappeda Tk. I Lampung, PPPUW DCD, PT. DCD dan Penasihat Hukum PT. DCD pada tanggal 1 Mei 1999 dalam pertemuan dan musyawarah antara plasma dengan inti

di ruang Bappeda Tingkat I Lampung dengan Pimpinan Rapat Ass. II Sekwilda Tk. I Lampung dalam pembahasan :

- hubungan kemitraan/legal aspek;
- aspek transparansi manajemen;
- aspek bisnis/harga udang;
- pengalihan lahan.

9. Menjadi mediator bersama-sama dengan Sekditjend. Perikanan, PT. DCD, Plasma, BKPMMD Lampung, Biro Perekonomian Pemda Tk. I Lampung, Kepala Dinas Perikanan Tk. II Tulang Bawang dalam pertemuan dan musyawarah antara plasma dengan perusahaan inti (PT. DCD) di Kantor Dinas Perikanan Tingkat I Lampung pada tanggal 7 Mei 1999.
10. Mengirim surat dinas kepada Ketua BPPN Pusat untuk meminta penjelasan status debitur PT. Dipasena Citra Darmaja karena Bank Krediturnya (BDNI) telah diambil alih oleh pemerintah (dilikuidasi).
11. Pada tanggal 15 Mei Gubernur KDH Tk. I Lampung melalui Surat No.330/1110/05/1999 menegur Syamsul Nursalim sebagai Pimpinan PT. DCD untuk menyelesaikan permasalahan dengan plasma, karena para plasma melakukan unjuk rasa mulai tanggal 14 Mei 1999 di depan Kantor Gubernur (Lapangan Korpri) sehingga mengganggu aktivitas Pemda Tk. I Lampung.
12. Pada tanggal 15 Mei 1999 Gubernur KDH Tk. I Lampung juga membuat surat dinas Nomor : 330/1115/05/1999 ditujukan kepada Menteri

Investasi/Ketua BKPM yang intinya berisi bahwa mohon kepada Bapak Menteri dapat menugaskan TIM Inter Departemen guna meneliti kembali persetujuan PMDN dalam rangka usaha budidaya tambak udang PT. DCD yang dilakukan dengan Pola TIR.

13. Pada tanggal 17 Mei 1999 Gubernur KDH Tingkat I Lampung menerbitkan Surat Perintah Nomor : 825.4/ 1126/ 09/1999 yang isinya Membentuk Tim Mediasi Lapangan.

Tim Mempunyai Tugas :

1. Menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerjasama;
2. Mengkaji ulang hubungan kemitraan antara PT. DCD selaku perusahaan inti dengan petani tambak selaku plasma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun manajemen dan mekanisme transparansi usaha;
4. Menyelesaikan permasalahan pengalihan lahan tambak;
5. Mengupayakan kesepakatan harga jual udang produk para petani tambak plasma kepada PT. DCD selaku inti;
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung melalui Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati. I Lampung.

14. Berdasarkan Surat Perintah Gubernur tersebut, maka pada tanggal 8 Juni 1999 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Melalui Surat Keputusan Nomor : B/221/DD.IV/HK/TB/1999 membentuk Tim Forum Mediasi Lapangan yang beranggotakan :

- Penanggung jawab : Bupati KDH Tk. II Tulang Bawang
- Penasehat : 1. Ass. II Sekwilda Tk. I Lampung
2. Ketua BKPMMD Lampung
3. Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung
- Ketua/Anggota : Isgiyanti, BSC (Kasubdin Bina Usaha Tani
Nelayan Dinas Perikanan Tingkat I Lampung)
- Wk.Ketua/Anggota : Drs. Husni Hannam (Ass.II Sekwilda
Tk. II Tulang Bawang)
- Sekret./ anggota : Siswanto (Kasi Bina Usaha Tani Nelayan Dinas
Perikanan Tk. I Lampung)
- Wk.Sek./Anggota : Ir. M. A. Sinaga (Kepala Dinas Perikanan Dati II
Tulang Bawang)

- I. Anggota Unsur Pemda Lampung;
- II. Anggota Unsur PPPUW DCD;
- III. Anggota Unsur PT. Dipasena Citra Darmaja.

Tim ini Mempunyai Tugas :

1. Menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerjasama;
2. Mengkaji ulang hubungan kemitraan antara PT. DCD selaku perusahaan inti dengan Plasma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun manajemen dan mekanisme transparansi usaha;
4. Menyelesaikan permasalahan pengalihan lahan tambak;

5. Mengupayakan kesepakatan harga jual udang produkpara plasma kepada PT. DCD selaku inti;
 6. Hasil pelaksanaan Tim agar dilaporkan dan pertanggungjawaban kepada Bupati KDH Tingkat II Tulang Bawang dan akan disampaikan kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
15. Berdasarkan laporan Ketua Tim Mediasi Pemda Lampung pada akhir bulan Juni 1999 sebagai berikut :
- a. Secara teratur setiap Minggu pada bulan Juni 1999 telah melakukan pertemuan dengan seluruh anggota Tim Forum Mediasi Lapangan bertempat di Bumi Dipasena Tulang Bawang. Sampai dengan akhir bulan Juni 1999 telah dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan masing-masing setiap pertemuan dilakukan selama 2-3 hari untuk membahas keabsahan 358 plasma pengganti serta 5 orang plasma yang di PHKS Inti (PT. DCD);
 - b. Dari hasil tersebut belum diperoleh titik temu karena masing-masing dari anggota Forum Mediasi Lapangan yang berasal dari PT. DCD maupun PPPUW DCD belum dapat melepaskan atributnya dan masih mengedepankan kepentingannya masing-masing sehingga diskusi penyelesaian tahapan agenda pola kemitraan berjalan sangat lambat dan alot;
 - c. Hasil sementara Tim Forum Mediasi sampai dengan tanggal 24 Juni 1999 sebagai berikut :

- 1). Tim Forum Mediasi lapangan baru dapat membahas 358 petambak (plasma) pengganti serta 5 (lima) orang plasma yang di PHKS;
 - 2). Petani tambak (plasma) pengganti sebanyak 330 orang telah berada dilokasi dan sisanya 28 orang plasma pengganti masih berada di luar lokasi karena belum ada kesepakatan ;
 - 3). Dua orang anggota Tim Forum Mediasi Lapangan dari unsur PPPUW DCD mengundurkan diri karena merasa tuntutan yang diusulkan anggotanya tidak dapat diselesaikan;
 - 4). 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang plasma yang di PHKS telah diselesaikan PT. DCD secara musyawarah sedangkan 3 (tiga) orang plasma yang di PHKS lainnya belum dapat diselesaikan;
 - 5). Disarankan oleh Tim Forum Mediasi bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Tim seyog-yanya Bapak Bupati KDH Tk. II Tulang Bawang dapat memanggil perusahaan PT. DCD agar perusahaan dapat membuka diri dan berniat baik untuk menyelesaikan permasalahan kemitraan budidaya tambak udang secara baik.
16. Pada tanggal 4 Agustus 1999 Gubernur KDH. Tingkat I Lampung mengirimkan surat dinas nomor : 580/1774/05/ 1999 kepada Pimpinan BPPN di Jakarta, yang isinya pada dasarnya sehubungan dengan BDNI yang sekarang telah diambil alih (Bank Take Over/BTO) oleh pemerintah sementara BDNI merupakan kreditur PT. Dipasena Citra

Darmaja dengan bidang usaha Budidaya Tambak Udang yang berlokasi di Bumi Dipasena (Kecamatan Menggala) Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung, dengan ini disampaikan :

Bahwa PT. Dipasena Citra Darmaja sampai saat ini manajemen perusahaannya masih mempunyai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan mitra kerjanya (plasma). Oleh karena itu dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut diharapkan BPPN dapat memberikan informasi antara lain :

- a. Data status PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Biru Laut Khatulistiwa yang merupakan debitur BDNI di Propinsi Lampung yang assetnya telah diambil alih oleh Pemerintah;
- b. Data jumlah sisa kredit dari masing-masing petani tambak udang (plasma) dari PT. DCD pada BDNI yang berstatus Bank Beku Operasional (BBO).

17. Pada tanggal 7 September 1999 di Kantor Pemda Lampung diadakan rapat kasus kemitraan yang dihadiri oleh Gubernur KDH Tingkat I Lampung, Assisten II Sekwilda Tk. I Lampung, Kepala Dinas Perikanan Tk. I Lampung, Kepala Biro Perekonomian Pemda Tk. I Lampung dan Para Direksi PT. DCD. Hasil rapat tersebut pada prinsipnya secara ringkas terlihat dalam kesimpulan rapat yaitu :

- a. Gubernur berkeinginan untuk membina iklim usaha Investasi di Lampung yang kondusif;

UPT-PUSTAKA-UNDEF

- b. Agar kondisi dan laporan yang cepat, benar dan sumber yang dapat dipercaya khususnya dari pihak perusahaan;
 - c. Agar kondisi masyarakat Lampung dapat berusaha dengan tenang dan damai;
 - d. Jika perusahaan PT. DCD dapat mengatasi permasalahannya dengan pihak plasma secara baik, maka kegiatan Tim Mediasi dapat di status quo-kan. Dalam mengatasi segala permasalahan PT. DCD harus selalu bermusyawarah dengan PPPUW dan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku (SK. Mentan No. 334/1986 dan Kepmentan No. 509/1995;
 - e. Untuk status kepemilikan PT. DCD karena BDNI telah di BBO, maka menunggu informasi dari BPPN pusat.
18. Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung pada tanggal 16 Oktober 1999 menyatakan sikap secara tertulis yang ditandatangani oleh Gubernur KDH Tingkat I Lampung, sehubungan dengan unjuk rasa massal yang dilakukan para plasma dari tanggal 13 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Pernyataan sikap tersebut memperhatikan bahwa :
- 1. Hubungan antara PT. DCD selaku perusahaan inti dan petambak udang selaku plasma merupakan hubungan kemitraan, acuan yang dipergunakan ialah :
 - a). Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 334/KPTS/ IK.210/6/1986 tanggal 4 Juni 1986, tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);

- b). Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 509/KPTS/ IK.120/7/95 tanggal 13 Juli 1995, tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);
 - c). Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
 - d). Keputusan Dirjen Perikanan Departemen Pertanian Nomor : 1251/KPTS/KL.420/II/98 tanggal 12 Pe-bruari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);
2. Konflik yang terjadi antara perusahaan inti dengan plasma bertitik tolak dari pemahaman yang berbeda terhadap pengertian kemitraan, terkait dengan interest-interest tertentu, pengertian kemitraan sering disimpangkan dalam pelaksanaannya. Pengertian-pengertian tersebut antar lain :
- a). Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan usaha perikanan ialah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri;
 - b). Azas Kemitraan

Kemitraan usaha perikanan berdasarkan azas persamaan kedudukan (kesetaraan), keselarasan dan peningkatan ketrampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui

perwujudan sinergi kemitraan, yaitu hubungan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

- c). Kemitraan usaha perikanan antara perusahaan inti dengan plasma dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang diketahui oleh Gubernur KDH Tk. I Lampung(cq. Dinas Perikanan Tk I), Bupati KDH Tingkat II Tulang Bawang (cq. Dinas Perikanan Tk. II) atau yang ditunjuk.

3. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku kreditor petambak plasma telah berstatus Bank Beku Operasi (BBO) dan telah diambil alih oleh BPPN, demikian juga dengan PT. DCD selaku perusahaan inti dengan beberapa perusahaan lainnya telah diambil alih pula oleh BPPN dengan menunjuk PT. Tunas Sepadan Investama selaku perusahaan induk (Holding Company). Memperhatikan status BDNI (kreditor), plasma (debitor) dan PT. DCD (Anfalis), maka konflik yang ada harus diambil alih dan menjadi tanggung jawab BPPN dan perlu diselesaikan secepat mungkin.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung mengambil sikap sebagai berikut :

1. Dalam kerjasama kemitraan antara plasma dengan inti (PT. DCD) agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Kemitraan antara plasma dan inti (PT. DCD) adalah dalam hubungan yang setara, bukan seperti hubungan perusahaan dengan

karyawannya; dalam hubungan kesetaraan tidak dibenarkan adanya PHK/PHKS secara sepihak; sekiranya hal tersebut dicantumkan dalam perjanjian kerjasama yang dapat melemahkan posisi salah satu pihak, maka perjanjian kemitraan tersebut batal adanya, karena tidak sejalan dengan ketentuan tentang azas kemitraan;

3. Penyelesaian konflik yang berlarut-larut mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, ekonomi serta jalannya pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah menyarankan agar kemitraan tetap berjalan dengan baik, namun sekiranya tidak dapat dilaksanakan maka pemerintah daerah merekomendasikan agar dilakukan pemutusan hubungan perjanjian Hubungan Kerjasama Kemitraan sehingga para petambak (plasma) yang ada dapat menjadi petambak rakyat yang dikelola oleh Koperasi, sedangkan hubungan dengan inti merupakan hubungan bisnis; hal tersebut dapat kiranya dikelola dan diproses lebih lanjut oleh BPPN.

19. Pemda Tk. I Lampung ikut menandatangani (mengetahui) Surat yang dibuat PPPUW DCD sehubungan permintaan jaminan keamanan yang ditujukan kepada Kapolda Lampung dan Dan. Den. Pom II/3 Lampung pada tanggal 18 Oktober 1999, disebabkan kekhawatiran plasma terhadap tindakan sewenang-wenang dari perusahaan inti (PT. DCD) karena plasma akan kembali kelokasi Bumi Dipasena setelah unjuk rasa secara massal. Surat tersebut selanjutnya ditanggapi dan dipenuhi oleh POLDA Lampung dan DAN. DEN. POM II/3 Lampung.

20. Pada tanggal 19 Oktober 1999 Gubernur KDH Tingkat I Lampung melalui surat dinas Nomor : 523.3/2371/05/1999 memberi tegoran dan peringatan kepada Pimpinan PT. DCD (Syamsul Nursalim) sehubungan unjuk rasa massal para plasma di Pemda Tk. I Lampung yang belum berakhir, untu dapat :

- a. mengupayakan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat petambak plasma dengan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan kemitraan;
- b. memberikan hak-hak normatif kepada seluruh plasma tanpa kecuali, sehingga kondisi-kondisi aman dan sejuk dalam berusaha dapat tercipta;
- c. hubungan kemitraan yang selama ini menjadi titik sentral permasalahan sehingga timbulnya konflik yang berkepanjangan dan hal-hal mendasar lainnya, akan dibahas lebih lanjut.

21. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung mengirim Surat Nomor : 503/-/523-BTNL/1999 tentang *Telaah Staff* yang berisi pada pokoknya antara lain :

1. Data dan Fakta :

- para plasma yang sudah bermitra 8 s/10 tahun lebih belum ada yang melunasi hutang pokoknya (memiliki tambak udang yang digarapnya);
- rata-rata hutang para plasma DCD sampai saat ini membengkak sampai 3x dari hutang pokok;

- substansi perjanjian kemitraan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu format dan substansi perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. DCD dengan plasma hendaknya disesuaikan dengan format dan substansi yang perjanjian kemitraan yang telah dibuat oleh Dinas Perikanan Tingkat I Prop. Lampung.

2. Hasil Analisa ✱:

- mendengar dan mempelajari keluhan para plasma yang unjuk rasa dari tanggal 13 s/d 22 Oktober 1999, bahwa selama ini butir-butir kesepakatan yang telah dibuat tidak ditindak lanjuti oleh PT. DCD (selaku perusahaan inti);
- adanya dugaan PT. DCD tidak ingin menyelesaikan kasus ini dengan baik dan cepat;
- Azas kemitraan adalah persamaan kedudukan antara inti dengan plasma dan saling menguntungkan;
- berdasarkan klausul pasal 1266 KUH Perdata bahwa pembatalan/ pengakhiran perjanjian harus di mintakan kepada hakim, dengan demikian harus ada putusan pengadilan negeri terlebih dahulu;
- oleh karena itu PT. DCD tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasama (PHKS) kemitraan secara sepihak maupun dengan menolak kehadiran, kepulangan pengurus PPPUW DCD kelokasi pertambakan (Bumi Dipasena) dengan alasan apapun.

3. Intimidasi, pengusiran yang dilaksanakan oleh PT. DCD dalam hal ini PAM Swakarsa yang dibantu aparat keamanan yang ada (Brimob dan Marinir) dapat memicu masalah HAM, seyogyanya aparat keamanan yang semula dan fasilitas perusahaan telah bertindak diluar ketentuan yang ada. Oleh karena itu agar aparat yang ditugaskan tersebut dapat ditarik oleh masing-masing induk pasukannya.

22. Pada tanggal 28 Oktober 1999 Kepala Dinas Perikanan Tingkat I Lampung melalui Surat Nomor : 503/-/523-BTNL /1999 mengirimkan *Telaah Staff* kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung, yang pada pokoknya berisi :

1. Berdasarkan Data dan Fakta :

- a. Berita Acara hasil rapat tanggal 18 Oktober 1999 yang dibuat oleh unsur DPRD Tk. I Lampung, PT. DCD dan Pemda Lampung di tolak PT. DCD;
- b. Unsur PT. DCD hadir pada rapat tanggal 18 Oktober 1999, tetapi menolak menandatangani Berita Acara Kesepakatan hasil rapat;
- c. Dilokasi (Bumi Dipasena) PT. DCD telah dijaga oleh Marinir dan Brimob atas permintaan perusahaan dan ikut mengusir pengurus PPPUW DCD;
- d. Sehubungan Berita Acara tersebut tidak dapat dilaksanakan maka kredibilitas/akuntabilitas publik Pemda Tingkat I Lampung menurun;

2. Berdasarkan pelanggaran dan pelecehan yang dilakukan PT. DCD maka pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Meminta pemerintah pusat untuk mencabut surat izin PT. DCD yang dikeluarkan oleh Menives/BKPMMD. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan tersebut sudah tidak dapat dibina lagi atas usul dari BKPM Propinsi Lampung;
- b. Menganakan sanksi administrasi sesuai pasal 14 SK. Mentan Nomor : 509/KPTS/IK.120/7/95. Pengenaan sanksi administrasi berupa mengusulkan kepada Mentan (cq. Dirjend Perikanan) agar menghentikan sementara kegiatan ekspor PT. DCD seperti :
 - tidak mengeluarkan Sertifikat Mutu (SM);
 - tidak mengeluarkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sanksi ini dapat dicabut kembali setelah kegiatan kemitraan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Keuntungan dan Kerugian

a. Kerugiannya :

- pengenaan sanksi administrasi dapat berakibat penghentian sementara kegiatan ekspor sehingga PAD berkurang;
- Sanksi pencabutan izin dapat berakibat PT. DCD tidak beroperasi lagi sehingga dapat mem PHK para karyawannya, lebih lanjut aset atau sarana dan prasarana milik

inti dapat rusak jika tidak cepat dialihkan kepada perusahaan lainnya.

b. Keuntungannya

- untuk pencabutan izin, para plasma DCD dapat bebas dari intimidasi perusahaan PT DCD yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- penghentian eksport sementara memberi pelajaran PT. DCD (Syamsul Nursalim) agar dapat menerapkan kegiatan kemitraan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan PT. DCD tidak arogan.

23. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 1999 Pemerintah Daerah Tingkat

I Lampung yang terdiri dari :

- Gubernur KDH Tingkat I Lampung (Drs. Hi. Oemarsono);
- Wakil Ketua DPRD Tk. I Lampung (Mochtar Hasan, SH);
- Ketua Pansus DPRD Tk.I Lampung (Hi.M. Yusuf Djaiz,SE)
- Ass.I BKPM Bid. Pengendalian (Hidayatullah);
- Wakapolda Lampung (Kol. Pol. M.D. Primanto);
- Ass.II Sekwilda.Prop. Lampung (Chairullah Gultom);
- Kakansospol Prop. Lampung (Drs. A. Azis);
- Kadis. Perikanan Tk. I Lampung (Ir.Helmi Machmud);
- Kabid.III BKPM Prop. Lampung (Mukhlis);
- Ass.II Pemda Kab. Tulang Bawang (Drs. Husni Hannan);
- Anggota Pansus DPRD Propinsi Lampung (13 orang).

telah melakukan rapat pembahasan PT. Dipasena Citra Darmaja (PT. DCD) di Pendopo Gubernur dengan kesimpulan hasil rapat bahwa :

1. Pada masa kepemimpinan TW. Sendra dan Harijanto, PT. DCD dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa adanya gejala-gejala sosial, tetapi setelah BDNI terlikuidasi (BBO) dan manajemen perusahaan PT. DCD ditangani Syamsul Nursalim timbul masalah-masalah yang mengakibatkan terjadi-nya beberapa kali unjuk rasa oleh plasma Dipasena secara besar-besaran. Hal ini diduga bahwa Syamsul Nursalim berupaya memanfaatkan keadaan yang terjadi untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya;
2. Penelusuran komponen kredit dari BDNI yang telah di BBO harus jelas, apakah dalam bentuk rupiah atau Dollar (US.\$), untuk itu BPPN harus segera mengaudit kredit plasma PT. DCD;
3. Sehubungan dengan adanya informasi bahwa Presiden RI meminta agar plasma PT. DCD sebanyak kurang lebih 250 orang untuk kembali ke lokasi, maka perlu adanya keterpaduan tugas antara POLRI dan Tim Pemda Prop. Lampung dan Pemda Kabupaten Tulang Bawang ;
4. Dari informasi yang diterima dari beberapa plasma, bahwa banyak kredit-kredit yang ditandatangani oleh plasma dan isteri-isterinya yang tidak diketahui jumlahnya baik dalam bentuk rupiah maupun dollar (AS.\$), sehingga PT. DCD secara tidak langsung perlahan-lahan melakukan proses pemiskinan terhadap plasma.

Untuk itu diharapkan agar BPPN dapat segera mengaudit dan Tim akan segera meng-cross chek dengan data di lapangan;

5. Forum rapat sepakat kurang lebih 250 orang plasma (Pengurus PPPUW DCD) dikembalikan dengan aman ke lokasi Bumi Dipasena dan diberi kesempatan untuk berusaha kembali;
6. Sepanjang Syamsul Nursalim dapat mengikuti aturan ketentuan yang berlaku, maka Tim akan mempertimbangkan kembali untuk tidak mengganti Syamsul Nursalim;
7. Harus dilakukan revisi perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. DCD dengan Plasma, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan saling menguntungkan serta adil;
8. Perlu adanya klarifikasi kredit plasma yang dilakukan oleh BPPN selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 1999;
9. Kegiatan Tim terpadu antara Pansus DPRD Tk. I Lampung, Tim Pemda Prop. Lampung dan Pemda Kabupaten Tulang Bawang, Tim Inter Departemen dan Polda Lampung sebagai mediator penyelesaian kasus kemitraan masalah :
 - PHKS/PHK;
 - Kerjasama kemitraan;
 - Pengalihan tambak Plasma;
 - Formulasi harga jual udang;
 - Transparansi usaha.

Secara umum dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa, dapat dikatakan bahwa pola penyelesaian sengketa perdata dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, baik negosiasi secara langsung (negosiation simplister) maupun melibatkan pihak ketiga sebagai mediator/mediasi.
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi melalui pengadilan.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara melalui arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun yang bersifat institusi.

Berdasarkan pola penyelesaian diatas ternyata dalam menuntut haknya para plasma menempuh cara dengan pola yang pertama, yaitu dengan cara negosiasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator/tim mediasi. Dengan kata lain cara yang ditempuh para plasma tersebut memilih cara non litigasi.

Secara umum memang dapat dipahami sehingga para plasma lebih memilih pola penyelesaian dengan non litigasi. Hal ini tidak terlepas dari bukti-bukti yang tidak dimiliki oleh para plasma, serta kelemahan yang ada apabila penyelesaian melalui litigasi, yaitu antara lain :

1. Dalam proses litigasi waktunya sangat lama, hal ini dapat dilihat dari proses di Pengadilan Negeri, yang memakan waktu sebelum putusan. Setelah putusan dijatuhkan tidak sedikit yang membuat kecewa atau tidak memuaskan bagi pencari keadilan.
2. Untuk proses selanjutnya juga sangat lama, yaitu setelah putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Banding), sampai dengan

Mahkamah Agung (Kasasi) sehingga juga menggunakan biaya yang sangat besar. Sebab prinsip proses peradilan secara cepat, sederhana dan murah dalam kenyataannya jauh berbeda.

3. Kurangnya pengetahuan dibidang hukum.
4. Masih lemahnya sistem hukum acara perdata yang berlaku, terutama dalam hal pembuktian. Sistem yang digunakan adalah bukti formal padahal hal ini tidak pernah diberikan oleh pihak perusahaan kepada para Plasma.
5. Terjadi krisis terhadap wibawa hukum yang terjadi di lembaga peradilan, seperti pihak yang menang hanya di atas kertas dan untuk selanjutnya tidak dapat di eksekusi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat mendorong para plasma menempuh pola penyelesaian dengan non litigasi adalah :

1. Pola penyelesaian yang tidak terlalu formal.
2. Lebih efektif dan terfokus pada pokok permasalahan
3. Para pihak dapat berunding secara komprehensif dalam menyelesaikan masalah.
4. Waktu penyelesaian singketa tidak terlalu lama sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak begitu besar.
5. Para pihak diposisikan pada tingkat yang sama.

Berdasarkan data-data hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Daerah tampung dalam (hal ini Dinas Perikanan) bertindak selaku mendiator.

Untuk menjadi mediator, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mediator, antara lain :

1. Bersifat netral, tidak berperan sebagai hakim yang mengadili. Oleh karena itu tidak berwenang mengambil keputusan;
2. Memfungsikan diri sebagai fasilitator yang mengatur tata cara pertemuan dan mengarahkan agar tidak terjadinya stagnasi bagi kedua belah pihak;
3. Menciptakan situasi yang tidak formal dalam pertemuan tersebut dan penyelesaiannya tidak terlalu berpatokan pada dasar-dasar hukum yang disepakati dalam perjanjian semula/sebelumnya;
4. Terhadap hasil yang telah dicapai oleh para pihak tidak dianggap oleh para pihak sebagai putusan tetapi penyelesaian/kompromis, serta dibuat secara tertulis.

Pola penyelesaian diatas yang menggunakan pola non litigasi atau alternatif Dispute Resalation (ADR) menurut Yahya Harahap, terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu :⁸¹

1. Good Office
2. Mediation
3. Concidiation

Antara ketiga bentuk penyelesaian diatas merupakan rangkaian (connected system atau sistem koneksitas atau kombinasi; dan diantara ketiganya saling berkaitan serta selalu menempatkan mediasi ditengah-tengah dalam posisi yang netral.

⁸¹ Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 180.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. Good Office

Connected to mediation dengan arus proses seperti berikut :

- Para pihak terlebih dahulu dianjurkan mencari penyelesaian sendiri diantara mereka.
- Pada tahap ini mediator sebagai pihak ketiga yang netral belum turut campur tangan mengatur penyelesaian sengketa;
- Seandainya tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan dengan cara kompromi maka cara pihak menyampaikan hasil kompromi tersebut kepada mediator.

Apabila diantara para pihak tidak memenuhi kesepakatan dalam penyelesaian masalahnya, maka perlu upaya lebih lanjut, yaitu :

- Proses penyelesaian dilanjutkan dibawah bimbingan mediator.
- Mediator dalam hal ini bertindak netral tidak berfungsi sebagai hakim.
- Diarahkan agar kedua belah pihak tersebut sama-sama merasa dimenangkan dengan prinsip win-win solution.
- Apabila sama sekali tidak dicapai kesepakatan dalam penyelesaian berarti sistem good office yang dikoneksikan dengan mediasi mengalami stagnasi, prosesnya harus dihentikan.

2. Mediation

Sistim mediasi yang dikombinasikan dengan sistem konsiliasi dilakukan dengan arus sebagai berikut :

- Langkah pertama, sengketa diproses melalui cara mediasi dengan ketentuan bahwa sejak awal proses penyelesaian para pihak telah didampingi oleh mediation sebagai pihak ketiga yang netral. Bilamana dalam proses tersebut dicapai kesepakatan damai, maka permasalahannya dianggap selesai dengan suatu kompromi.
- Apabila melalui mediasi tidak menghasilkan mufakat, maka proses penyelesaian melalui cara konsiliasi. Dalam hal ini mediator berubah fungsi dan kedudukan sebagai konsiliator dan berhak membuat suatu rumusan penyelesaian yang ditawarkan kepada kedua belah pihak untuk dipelajari dan dipahami, apabila konsep itu disepakati maka solusi ini menjadi resolution.

3. Consiliation

Apabila konsiliator tidak berhasil mewujudkan penyelesaian dalam bentuk resolution, maka proses konsiliasi dihentikan. Langkah selanjutnya sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase dan konsiliator dapat bertindak sebagai arbiter dan atau diselesaikan melalui pengadilan.

Selanjutnya menurut Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH bentuk penyelesaian konflik seperti diatas merupakan bentuk penyelesaian konflik pra-juridis dan masuk kelompok ketiga yang meliputi :

- Lembaga pengaduan
- Perdamaian
- Musyawarah dan
- Penyelesaian dengan pihak penengah

Ciri penyelesaian konflik ini adanya instansi ketiga yang ikut terlibat, yaitu atas prakarsa dari salah satu pihak yang bersengketa. Pekerjaan menyelesaikan konflik demikian ini bukan merupakan pekerjaan, tetapi hanya dilakukannya secara insidental atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Kedudukan pihak penengah dalam hal ini sangat kuat dan dapat menghasilkan penyelesaian sementara, dapat menunjukkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian lain, dapat menjanjikan dukungan untuk masa sesudah penyelesaian konflik nanti dan dapat melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa supaya melakukan kompromi dengan ancaman akan menghentikan usaha-usahanya.⁸²

Pemerintah Daerah selaku mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan antara perusahaan inti dan nplasma dapat melakukan beberapa kegiatan, yang menurut Buku Panduan Elips Project, antara lain :⁸³

1. Menciptakan Forum, dalam hal ini meliputi :
 - Menetapkan aturan dasar;
 - Menumbuhkan rasa simpati dan kepercayaan;
 - Memberikan kesempatan mendengar;
 - Mengembangkan dan menjelaskan informasi;
2. Mengumpulkan dan membagikan informasi, meliputi :
 - Mengembangkan informasi lebih lanjut;
 - Menyelidiki keinginan para pihak;

⁸² Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang, 1990, hal. 39.

⁸³ Elips Project, *Diktat Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, 1998, hal. 212.

- Membantu para pihak menaksir dan menilai kepentingan;
- Mengajar para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah;

3. Pemecahan masalah meliputi :

- Memindahkan kerjasama
- Mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu atau permasalahan.
- Membuat alternatif-alternatif atau pikiran-pikiran.
- Menilai pilihan;
- Membantu para pihak menaksir, menilai dan memprioritaskan kepentingan mereka;

4. Pengambilan Keputusan, meliputi :

- Membantu para pihak memperkecil perbedaan;
- Menegaskan dan menjelaskan kesepakatan;
- Membantu para pihak membandingkan usulan-usulan.
- Penyelesaian dengan alternatif yang diluar kesepakatan;
- Menekan para pihak;
- Menekan formula menjaga nama baik;
- Membantu para pihak menangani pokok permasalahan;
- Membantu para pihak memperingati kesepakatan.

Berkaitan dengan hal diatas menurut Hadi Wuryan, SH. CN, MH ada 3 (tiga) elemen pokok dalam mediasi, yaitu :⁸⁴

⁸⁴ Hadi Wuryan, *Penggunaan Mediasi (Alternative Dispute Resolution/ADR), Arena Hukum (Majalah Fak. Hukum Unibraw)*, Nomor : 9, November 1999, hal. 73.

1. Proses mediasi adalah suatu proses dimana mediator mengakomodasikan dan memfasilitasikan negosiasi para pihak yang bersengketa dengan cara membantu mengidentifikasi permasalahan, mencari jalan keluar dan memandu kearah penyelesaian yang ditentukan sendiri oleh mereka (yang bersengketa).
2. Pendekatan, mediasi memerlukan metodologi pendekatan antar para pihak yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kepercayaan;
3. Filosofi, filosofi dasar dari mediasi adalah kemampuan menyelesaikan sendiri sengketa dengan merata prospek masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dimengerti bahwa kehadiran mediator semakin diperlukan dalam membantu penyelesaian suatu sengketa, hal ini disebabkan :

1. Mediator membuka komunikasi yang efektif, sistematis dan terstruktur. Komunikasi dalam negosiasi hanya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sulit dilakukan, umumnya dalam hal ini para pihak sudah tertanam rasa antipati satu sama lain;
2. Mediator mengidentifikasi permasalahan. Kadangkala masalah utama sudah berbaur dengan berbagai isu yang sesungguhnya tidak relevan tugas mediator mengidentifikasi masalah dan memfokuskan negosiasi pada masalah yang sudah teridentifikasi.
3. Mediator mendekatkan jurang perbedaan pendapat. Para pihak yang bersengketa umumnya sudah terpaku pada persepsi negatif terhadap satu sama lain sehingga telah mematok tuntutan tertentu. Mediator mengajak

para pihak untuk melihat secara realistis tuntutan mereka dan membimbing mencari jalan keluar.

4. Mediator menjamin kerahasiaan dan mengarahkan agar sengketa tidak berlanjut ke peradilan.

Secara umum, Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan membantu masalah yang dihadapi investor. Hal ini untuk menjaga agar investasi yang dilakukan konglomerat justru merugikan pemerintah dan masyarakat. Senada hal di atas seperti yang diungkapkan oleh Anwar Nasution, yaitu :⁸⁵

“Menunjukkan bahwa adanya konglomerat-konglomerat ini belum tentu menyumbang pada peningkatan efisiensi, penurunan biaya produksi, dan peningkatan produktivitas ekonomi nasional. Oleh karenanya, konglomerat-konglomerat seperti itu belum tentu memberikan manfaat positif bagi ekonomi nasional secara keseluruhan, akan tetapi justru menjadi beban tambahan dalam keadaan ekonomi yang tengah mengalami kesulitan. Hutang-hutang luar negeri beberapa konglomerat besar yang diambil alih pemerintah baru-baru ini, seperti ini misalnya, tidak menambah beban hutang luar negeri negara.”

Hal diatas tidak terlepas juga dengan peran pemerintah daerah pada masa lampau mengenai penerapan hukum yang dilakukan dalam bentuk penetapan-penetapan dalam melaksanakan ketentuan hukum tertentu. Penerapan hukum pada umumnya dilakukan oleh pejabat administrasi negara, seperti pengesahan pendirian perseroan terbatas, pemberian izin penanaman modal dan sebagainya. Hal tersebut juga tidakd apat dilepaskan dari budaya hukum itu sendiri, dimana kaum birokrat masih menganggap hubungan

⁸⁵ Anwar Nasution, op. cit, hal. 17

dengan pengusaha dengan konsep Paternalistis dan hubungan patron-klien.⁸⁶

Selain itu juga sikap tidak menghargai hukum dimasa ini dapat dijelaskan dari pengalaman sejarah masyarakat Indonesia pada masa lalu.⁸⁷

Dengan demikian tidak berlebihan kalau para plasma melalui PPPUW meminta bantuan sebagai mediator dan menggantungkan harapan terhadap permasalahan yang dihadapi dengan perusahaan Inti kepada Pemerintah Daerah Lampung.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang maupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, jelas terlihat sebenarnya Pemerintah Daerah Lampung telah berupaya keras ingin membantu, mencari solusi, menekan bahkan mengancam pihak PT. DCD untuk segera menyelesaikan permasalahan kerjasama kemitraan antara PT. DCD (selaku perusahaan inti) dengan petani tambak (selaku Plasma).

Hanya saja dalam hal ini, memang kalau dilihat dari proses penyelesaian dan konflik permasalahan yang tidak kunjung selesai, patut kiranya dapat diduga bahwa memang pihak PT. DCD (khususnya Syamsul Nursalim) selaku Pimpinan PT. DCD kurang adanya niat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan plasma. Hal ini terlihat bahwa telah berulang kali terjadi beberapa kali kesepakatan yang dimediasikan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang

⁸⁶ Ageul Wahid, *Hukum dan Perkembangan Ekonomi*, Majalah Fak. Hukum Universitas Brawijaya, Nomor : 9, November 1999.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

maupun Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung selama ini selalu dilanggar oleh pihak perusahaan inti (PT. DCD) serta tidak ada kebijaksanaan untuk dapat menerima kembali Pengurus PPPUW DCD dan simpatisan lainnya kelokasi Bumi Dipasena. Padahal mereka juga mempunyai hak untuk kembali ke lokasi. Hal ini juga sangat disayangkan oleh Pemda Propinsi Lampung, sebab Syamsul Nursalim terlalu keras dan ingin menang sendiri bahkan cenderung terlalu arogan.

Bahkan dilapangan ditemukan informasi bahwa apabila terjadi protes atau usulan di lokasi Bumi Dipasena sebelum plasma melakukan unjuk rasa secara massal, Syamsul Nursalim selalu mengatakan bahwa tanah-tanah yang ada (tambak udang ini) adalah milik pribadi Syamsul Nursalim. Padahal dapat diketahui dari beberapa foto copy sertifikat hak milik yang ada adalah telah jelas tertulis nama masing-masing plasma. Contoh Sertipikat Hak Milik Nomor : 74/Mgl., Surat Ukur Nomor : 112/1991 tanggal 1 Pebruari 1991, luas : 6.150 M2, tertulis Nama Pemegang Hak **ABDUL SYUKUR (sekarang sebagai Ketua PPPUW DCD)**. Serta Sertipikat Hak Milik Nomor : 2258, Surat Ukur Nomor : 6895/1993 tanggal 26 Juni 1993, luas : 7.150 M2, tertulis Nama Pemegang Hak **MISNA (sekarang Pengurus PPPUW DCD)**.

Selain itu, ada beberapa kredit yang tidak jelas yang berupa blangko kosong yang disodorkan kepada isteri-isteri para plasma untuk ditandatangani. Hal ini sangat merugikan plasma, sebab sejak menandatangani blangko tersebut sampai sekarang para isteri-isteri plasma maupun plasma

sendiri tidak pernah mendapatkan uang dari surat-surat (blangko) yang ditandatangani tersebut. Lebih lanjut dapat diketahui bahwa kalau alasan membengkaknya pinjaman (kredit) para plasma yang selama ini dijadikan alasan oleh perusahaan inti adalah krisis ekonomi. Pahal krisis ekonomi dimulai pada bulan Juni 1997. Disisi lain harga/pasaran udang dengan adanya krisis ekonomi justru melambung tinggi yang menurut para plasma mencapai Rp.120.000,-/Kg (seratus dua puluh ribu/Kg). Dari kondisi ini sebenarnya walaupun ada kenaikan tetapi tidak begitu tinggi, sebab angusuran yang telah dilakukan para plasma (menurut perjanjian yang ditandatangani tahun 1990,1991,1992,1993) sudah berjalan cukup lama (5 - 7 tahun) serta harga udang windu juga tinggi. Dengan demikian hutangnya sudah jauh berkurang. Hal ini kelihatan tidak wajar kalau yang dijadikan alasan pihak perusahaan inti hutang plasma membengkak minimal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d. Rp 1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah) setiap plasma.

Menurut Humas BPPN yaitu Franklin Richard segera mungkin BPPN akan mengaudit seluruh hutang plasma yang dijamin PT. DCD. Oleh sebab itu, sebenarnya hutang plasma secara pasti sampai sekarang belum dapat disebutkan, hanya saja diharapkan hasil audit nanti mudah-mudahan hutang plasma tidak sebesar itu. Sebenarnya, hutang para plasma tersebut adalah tanggung jawab PT. DCD sebab kredit para plasma tersebut merupakan kredit lunak yaitu melalui program Kredit Koperasi kepada Anggota (KKPA) dan dijamin oleh PT. DCD. Oleh karena itu, kredit tersebut sebenarnya harus berupa rupiah bukan dollar (AS \$).

Dilain pihak, karena berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan tersebut dan desakan beberapa pihak terhadap pergantian Pimpinan PT. DCD, maka pada tanggal 10 Maret 2000 para pemegang saham yang didominasi jaringan usaha PT. Gajah Tunggal Group melakukan rapat khusus dan menunjuk *Boyke Ghozali* sebagai Pimpinan PT. Dipasena Citra Darmaja menggantikan *Syamsul Nursalim*. Dengan pergantian tersebut Humas BPPN (Franklin Richard) mengaharapkan pemimpin baru PT. DCD ini tidak lagi memperkeruh suasana hubungan kemitraan dengan plasma. Paling tidak kredit yang telah disalurkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai usaha solusi membantu menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Lampung dapat meminta bantuan BPPN untuk :

1. Menjadwal ulang dengan menghitung lagi kredit para plasma. Diharapkan dapat diketahui secara pasti membengkaknya utang plasma dan dapat tahu pasti hutang yang sebenarnya.
2. Mengharapkan/memutihkan hutang plasma dengan syarat-syarat khusus dari BPPN (seperti yang termasuk kelompok plasma yang berhasil dan telah melaksanakan perjanjian 8 s/d 10 tahun).
3. Membebaskan sebagian hutang plasma kepada Gajah Tunggal Group sebagai kelompok yang memiliki saham PT BDNI dan PT Dipasena Citra Darmaja.
4. Menunjuk investor baru untuk menyelamatkan usaha yang pernah terbesar di Asia Tenggara tersebut.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab-Bab di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Secara singkat gambaran umum PT. Dipasena Citra Darmaja adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Dipasena Citra Darmaja selaku perusahaan inti yang melakukan kerjasama kemitraan dengan Plasma dalam usaha tambak udang, didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 174 tanggal 23 Oktober 1987 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Nomor : C.2-3224.HT.01.01 TH'88 tanggal 9 April 1988. Hadir sebagai sentra industri baru dipesisir timur Kabupaten Tulang Bawang (dahulu Lampung Utara) Propinsi Lampung. Kegiatannya dibidang agribisnis berintikan budidaya perairan (aqua culture) dengan komoditas udang windu untuk di ekspor.
 - b. Untuk usaha tersebut PT. Dipasena Citra Darmaja telah mendapatkan izin :
 - 1). Surat Pencadangan Tanah untuk pengembangan tam- bak udang PT. Dipasena Citra Darmaja dari Ketua BKPM D Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 594/542/I/BKPM D/1988

tanggal 11 April 1988 luas areal dicadangkan + 12.500 Ha dengan lokasi Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Tulang Bawang);

- 2). Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 228/I/PMDN/88 tanggal 19 April 1988. Dalam surat tersebut dijelaskan penambahan areal di atas 100 Ha harus menggunakan Pola TIR dengan perbandingan 60% untuk Inti dan 40% untuk Plasma;
- 3). Surat Keputusan Izin Lokasi tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor ; 14/IL/PMDN/1988 tanggal 25-5-1988. Luas areal = 12.500 Ha dengan lokasi Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang Tulang Bawang).
- 4). Surat Keputusan Izin Lokasi tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 20/IL/PMDN/1988 tanggal 30-12-1988 tentang Perubahan Luas Areal Izin Lokasi dari + 12.500 Ha menjadi 16.250 Ha (setelah diadakan pengukuran secara Kadesteral oleh Direktorat Agraria Propinsi Lampung).

- 5). Tanah yang dijadikan lokasi adalah tanah negara, maka tidak perlu melakukan pembebasan dan ganti rugi kepada pihak lain.
- c. Dipilihnya wilayah tersebut dengan pertimbangan :
- 1). Letaknya sangat cocok untuk mendapatkan suplai air laut bagi kebutuhan sekitar 18.064 unit tambak;
 - 2). Lokasi sebelumnya belum dimanfaatkan berupa tanah gambut/hutan rawa (swampy areas) yang tidak produktif;
2. Isi yang dimuat dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha antara masyarakat Kecamatan Menggala, Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Propinsi Lampung (sebagai Plasma) dengan PT Dipasena Inti Daramajaya (sebagai Perusahaan Inti) tidak seimbang. Bentuk perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku/standar artinya para plasma menandatangani perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya atau isinya sudah dibakukan/dibuat oleh perusahaan Inti dan Plasma tidak dapat memperbaiki atau merubahnya. Oleh karena itu isi dalam perjanjian kerjasama tersebut posisi perusahaan Inti sangat kuat dan posisi Plasma sangat lemah. Jenis perjanjian yang ditandatangani para Plasma terdiri dari Perjanjian Induk dan Perjanjian Pendukung lainnya. Hal ini diterima para plasma karena mereka takut tidak mendapatkan pekerjaan.
 3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan usaha di Daerah Tingkat II Tulang Bawang Propinsi Lampung khususnya mengenai kemitraan usaha tambak udang antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma belum

berjalan sesuai dengan maksud, asas dan tujuan dari kemitraan itu sendiri. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan usaha belum berjalan sesuai dengan asas, maksud dan tujuan dari kemitraan. Hal ini dapat terlihat bahwa PT. Dipasena selaku perusahaan inti belum menganggap sejajar kedudukannya dengan plasma. Para petani tambak yang menjadi plasma masih cenderung dianggap sebagai buruh/karyawan dari perusahaan inti dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Banyak keputusan/kebijakan yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan inti tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan plasma maupun dengan wakil plasma sehingga kebijakan tersebut cenderung merugikan plasma, seperti pemutusan hubungan kerjasama, tidak transparan terhadap harga udang maupun angsuran kredit

4. Peran Pemerintah Daerah Lampung dalam membina dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan kerjasama kemitraan antara PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Plasma sebenarnya sudah sangat maksimal. Beberapa pertemuan antara Plasma dan Perusahaan Inti dilakukan dan sebagai mediatornya adalah Dinas Perikanan maupun Pemda (baik Tingkat II Tulang Bawang maupun Tingkat I Propinsi Lampung) serta dihasilkan pula beberapa kesepakatan. Hanya saja semua kesepakatan tersebut dalam prakteknya tidak pernah dilaksanakan atau diingkari oleh perusahaan inti. Berbagai upaya juga telah dilakukan baik

oleh DPRD Tingkat I Lampung, Dinas Perikanan Tingkat I Lampung, Gubernur KDH Tingkat I Lampung serta BKPMD Lampung tetapi hingga sekarang masalah tersebut belum selesai. Pemerintah Daerah Lampung sementara ini berkesimpulan bahwa perusahaan inti kurang mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalahnya dengan plasma. Oleh karena itu permasalahan tersebut diserahkan dengan Pusat (Jakarta) baik dengan BPPN maupun juga dengan DPR RI bahkan juga dengan Menives RI.

B. Saran

1. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor : 1251/Kpts./KL.420/II/98 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola PIR, maka seharusnya perjanjian kerjasama yang dibuat antara Plasma dengan Perusahaan Inti (PT. Dipasena Citra Darmaja) sebelum berlakunya peraturan tersebut agar disesuaikan/diganti;
2. Agar setiap isi perjanjian memuat secara jelas, rinci dan seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta sebelum ditandatangani terlebih dahulu dibacakan atau dipelajari terlebih dahulu oleh masing-masing para pihak;

3. Dalam Perjanjian Kemitraan adalah kedudukan antara perusahaan inti dengan plasma adalah seimbang, oleh sebab itu tidak ada Pemutusan Hubungan Kerjasama Kemitraan secara sepihak kecuali atas Keputusan Pengadilan.
4. Bahwa Peran Pemerintah Daerah (dalam hal ini khususnya Dinas Perikanan baik Tingkat II Tulang Bawang (dahulu Lampung Utara) maupun Tingkat I Lampung dalam melakukan pembinaan harus lebih ditingkatkan walaupun belum ada masalah. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya masalah dikemudian hari seperti Kasus Dipasena ini.
5. Selain itu Pemerintah Daerah Lampung dapat meminta bantuan BPPN untuk :
 - 1) Menjadwal ulang dengan menghitung lagi kredit para plasma. Diharapkan dapat diketahui secara pasti membengkaknya utang plasma dan dapat tahu pasti hutang yang sebenarnya.
 - 2) Mengharapkan/memutihkan hutang plasma dengan syarat-syarat khusus dari BPPN (seperti yang termasuk kelompok plasma yang berhasil dan telah melaksanakan perjanjian 8 s/d 10 tahun).
 - 3) Membebaskan sebagian hutang plasma kepada Gajah Tunggal Group sebagai kelompok yang memiliki saham PT BDNI dan PT Dipasena Citra Darmaja.

- 4) Menunjuk investor baru untuk menyelamatkan usaha yang pernah terbesar di Asia Tenggara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian dan G. Fan Mely, *Kerangka Landasan Pembangunan Dan Lepas Landas*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Anoraga, Pandji, *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- ArifinM. Siregar, *prolog Dalam Sumber Daya Manusia; Kesempatan Kerja Dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 1992.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Baswir, Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Chotim, Erna Ermawati, *Sub Kontrak dan Aplikasinya Terhadap Pekerja Perempuan, Kasus Industri Kecil Batik Pekalongan*, Penerbit Akatiga, Pusat Analisis Sosial, Bandung, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Echols, John M, Shadily, Hassan, *Kamus Inggris - Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Elips Project, *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi (Diktat)*, 1998.
- Faisal, Sanapia, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang, 1990.
- Fitrial, Marahuddin dan Ian R. Smit (Editor), *Ekonomi Perikanan Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hadi Wuryan, *Penggunaan Mediasi (Alternative Dispute Resolution) ADR*, Majalah Fak. Hukum Universitas Brawijaya, Nomor : 9, November 1999.

- Hartono, Sunaryati, CFG, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Hartono, Sri Redjeki, *Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan*, Makalah, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 13 September 1997.
- , *Aspek Hukum Restrukturisasi Perusahaan*, Makalah, Semarang, Nopember 1998.
- , *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP Semarang, 1995.
- Harahap. M, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hafsah, Muhammad Jafar, *Kemitraan Usaha, Konsep Dan Strategi*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1999.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981.
- H.W. Arnolt (Penyunting), *Pembangunan Dan Pemerataan (Indonesia di Masa Orde Baru)*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Indrawijaya, Adam I, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Jomo, Frans Wiryanto, *Membangun Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1986.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Kartasapoetra.G, Kartasapoetra. RG, Kartasapoetra.AG, Setiady.A, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Krisnamurthi, Bayu, *Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil*, Jurnal Tiga Bulanan CIDES, AFKAR, Vol.V, No.3/1998.
- Kuntjoro Jakti , Dorodjatun, *Demokrasi Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1998.

- Kusumah, Mulyana.W, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Lubis, T. Mulya, Buxbaum, Richard. M, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Linton, Ian, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Halirang, Jakarta, 1997.
- Marbun. BN, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, liberty, Yogyakarta, 1986.
- Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Semarang, 14-15 Mei 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mulyosudarmo, Suwato, *Pemutusan Hubungan Kerja Kajian PHK Dalam RUU Ketenagakerjaan*, Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus 1997.
- Mofichoem Sofwan, Sri Soedesi, *Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1975.
- M. Isnaeni, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Nasabah*, Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi, Edisi XI, Agustus 1998.
- Naisbitt, John, (alih bahasa : Budijanto), *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- Nasution S, Thomas.M, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nasution, Anwar, *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia Jakarta, Jakarta, 1987.
- Ngadiyono, *Kelembagaan Dan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nuwtram, Pudji, Ihalauw, John.J.O.I, *Manajemen Usaha Kecil*, Satya Wacana, Semarang, 1985.

- Patrik, Purwahid, *Asas-Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- , *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- , *Penyalahgunaan Keadaan, Kapita Selekta Hukum Perdata*, (Semarang, Jurusan Hukum Perdata Fak. Hukum, UNDIP, 1986).
- , *Hukum Jaminan (Edisi Revisi Dengan UUHT)*, Diktat, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1996.
- Pieter Kuin, *Perusahaan Trans Nasional*, Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarta, 1987.
- Polama, Margareth.M, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- , *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- , *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Sinar Baru Bandung, TT.
- Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rudianto, Doddy, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Di Indonesia*, Golden Terayon Press, Jakarta, 1996.
- Ritzer, George, (Penyadur : Alimandan), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- Sagir, Soeharsono, *Masalah-masalah Ekonomi Indonesia Dekade 80-an*, Alumni, Bandung, 1985.

- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, UGM, Yogyakarta, 1994.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Siagian, Presentl, *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*, Satya Wacana, Semarang, 1989.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofian, (Editor), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- , *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- ✶ Suyanto, S. Rahmatun dan Mujiman, Ahmad, *Budidaya Udang Windu*, Penebar Swadaya, Jakarta, Cetakan XII Tahun 1999.
- Soepriyanto, Janje Bambang, *Micro-Lending Untuk Micro-Entrepreneurs, Sebuah Model Kemitraan*, Makalah, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 13 September 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- , *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Oktober, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

- , *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang, 1990.
- Soedjendro, J. Kartini, *Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1996.
- Soetrisno, Lukman, *Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil Dan Menengah*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- , *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Suryadiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, 1985.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Somodiningrat, M. Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Stauss, Anselm dan Corbin, Juliet (Penyadur : Ghony, HM. Djunaidi), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Syaifuddin, Hatifah, *Pengertian dan Usaha Kecil*, Jurnal Analisis Sosial, Edisi 6 / Nopember 1997.
- Syahrani, Ridun, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

The Kian Wie (Penyunting), *Dialog Kemitraan Dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Tjiptoherijanto, Prijono, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Van Der Burght, F. Tengher (Penyadur: Supriadi, Wila Candrawila), *Buku Tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Verhagen, Koenraad, *Pengembangan Keswadayaan*, Puspaswara, Jakarta, 1996.

Wahid, Abdul, *Hukum dan Perkembangan Ekonomi*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Nomor : 9, November 1999.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1997.

Wirosardjono, Soetjipto, *Pengembangan Swadaya Nasional*, LP3ES, Jakarta, 1992.

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1995 *Tentang Usaha Kecil*.

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1999.

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 Tahun 1997 *Tentang Kemitraan*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1998 *Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*.

Keputusan Presiden RI Nomor : 99 Tahun 1998 *tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan*.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 334/Kpts./IK.210/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 *Tentang Pengembangan Budidaya Udang Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR)*.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 509/Kpts./IK.120/7/95 Tanggal 13 Juli 1995 *Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)*.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/Kpts./OT.210/10/97 Tanggal 13 Oktober 1997 *Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 944/Kpts./OT.210/10/97 tanggal 13 Oktober 1997 *Tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian.*

Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor : 1251/Kpts./ KL.420/II/98 Tanggal 12 Pebruari 1998 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola PIR.*

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 5 Tahun 1996 Tanggal 23-2-1996 *Tentang Kerjasama Kemitraan Usaha Budidaya Perikanan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.*